



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA, KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667,
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ambonbpbl@gmail.com

Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Kementerian Kelautan dan Perikanan
di-
J a k a r t a

17 Januari 2025

SURAT PENGANTAR
Nomor : B.193/BPBLA/TU.210/II/2025

No	Jenis Dokumen Yang dikirim	Banyaknya
1.	Penyampian Laporan Kinerja Tahun 2024 Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	1 (satu) rangkap

Penerima
Nama Jabatan :

Pengirim
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tanda tangan dan cap
Nama :
Diterima tanggal :
No.Telepon :

Sarwono

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kerjasama dari semua pihak yang terkait lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, sehingga Laporan Kinerja Tahun 2024 Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon ini dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun 2024 yang tertuang dalam pelaksanaan program kerja sebagai upaya pencapaian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Laporan ini mencakup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan kegiatan lainnya yang mendukung tugas pokok dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon melalui program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 oleh setiap bagian di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

Laporan kinerja ini diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Laporan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat.

Ambon, 17 Januari 2025

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Sarwono, S.St.Pi

Pernyataan Telah Direviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat menjadi tanggung Jawab satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami tersebut, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan ini.

Jakarta, 18 Januari 2025

Analisis Perencanaan
Tim Reviu Laporan Kinerja
Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Kementerian Kelautan dan Perikanan



Insan Kamil, A.Md, SP
NIP.198004202006041002

Daftar ISI

Kata Pengantar	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Grafik	vii
Daftar Tabel	viii
Ringkasan Eksekutif	1
I. Pendahuluan	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Maksud dan Tujuan	6
1.3. Tugas dan Fungsi	6
1.4. Sumberdaya Manusia	9
1.5. Isu Strategis Pengembangan Budidaya Laut di Wilayah Kerja	10
1.6. Sistematika Penyajian Laporan	12
II. Perencanaan dan Penetapan Kinerja	14
2.1. Visi	14
2.2. Misi Presiden	15
2.3. Arahan Utama Presiden	16
2.4. Kebijakan dan Strategi KKP	16
2.5. Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon	18
2.6. Penetapan Kinerja	20
2.7. Pengukuran Kinerja	32
III. Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	34
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama	34
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	38
3.2.1. Sasaran kegiatan I, Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat Di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	38
3.2.2. Sasaran Kegiatan II, Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	40

3.2.3. Sasaran Kegiatan III, Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan di Wilayah Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	68
3.2.4. Sasaran kegiatan IV, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	74
3.3. Akuntabilitas Keuangan	98
3.4. Evaluasi dan Analisis Penggunaan Anggaran	106
3.5. Upaya Efisiensi Penggunaan Anggaran	109
IV. Penutup	110
4.1. Simpulan	110
4.2. Permasalahan/Kendala yang dihadapi	110
4.3. Langkah Perbaikan	110
V. Lampiran	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPBL Ambon Tahun 2024	8
Gambar 2. Capaian IKU + IKM BPBL Ambon 2024	33
Gambar 3. Produksi Planlet Rumput Laut	43
Gambar 4. Kegiatan penyerahan bantuan sarana KBRL	49
Gambar 5. Bibit rumput laut kultur jaringan	50
Gambar 6. Calon induk Ikan kakap putih (<i>Lates calcarifer</i>)	52
Gambar 7. Kegiatan penyaluran bantuan benih ikan	57
Gambar 8. Calon induk Ikan Kuwe (<i>Caranx</i> sp)	60
Gambar 9. Kegiatan Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan	63
Gambar 10. Bantuan Benih Ikan Hias Laut 2024	67
Gambar 11. Diagram Kejadian Penyakit Ikan	69
Gambar 12. Pemeriksaan Sampel Laboratorium Keskanling BPBL Ambon	71
Gambar 13. Kriteria Penilaian Indeks Profesionalitas ASN	77
Gambar 14. Sertifikat Kegiatan dalam penilaian Indeks Profesionalitas ASN ...	77
Gambar 15. Capaian IKU IKPA Tahun 2024	87

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Komposisi Pegawai Lingkup BPBL Ambon 2024	9
Grafik 2.	Pendidikan Pegawai (PNS dan PPPK) Lingkup BPBL Ambon 2024 .	10
Grafik 3.	Golongan Pegawai (PNS) Lingkup BPBL Ambon 2024	10
Grafik 4.	Perbandingan Capaian IKU PNBP Satker Laut	39
Grafik 5.	Capaian IKU Produksi Bibit Rumput Laut Satker Laut	43
Grafik 6.	Capaian IKU Bantuan KBRL Satker Laut	49
Grafik 7.	Capaian IKU Bantuan Calon Induk Laut Satker Laut	53
Grafik 8.	Capaian IKU Bantuan Benih Ikan Laut Satker Laut	55
Grafik 9.	Produksi Calon Induk Ikan Laut Satker Laut	59
Grafik 10.	Capaian IKU Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan	62
Grafik 11.	Capaian IKU Bantuan Bioflok	65
Grafik 12.	Capaian IKU Bantuan Benih Ikan Hias Laut	66
Grafik 13.	Capaian IKU Pengujian Sampel Laboratorium Satker Laut	70
Grafik 14.	Capaian IKU Pengujian Sampel AMR Satker Laut	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon	18
Tabel 2.	Komposisi Anggaran BPBL Ambon 2024	20
Tabel 3.	Sebelum dan sesudah Perubahan Target Kinerja BPBL Ambon	27
Tabel 4.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	34
Tabel 5.	Capaian IKU Nilai PNBPN BPBL Ambon Tahun 2024	38
Tabel 6.	Capaian IKU Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	42
Tabel 7.	Rincian Bahan Konstruksi 1 (satu) Unit Kebun Bibit Rumput Laut	45
Tabel 8.	Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara	46
Tabel 9.	Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Pulau Morotai Propinsi Maluku Utara	46
Tabel 10.	Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat	47
Tabel 11.	Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kota Tual Provinsi Maluku	47
Tabel 12.	Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara	47
Tabel 13.	Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara	48
Tabel 14.	Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat	48
Tabel 15.	Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kota Tual Propinsi Maluku	48
Tabel 16.	Capaian IKU Bantuan Sarana dan Prasarana Kebun Bibit Rumput Laut BPBL Ambon	49
Tabel 17.	Capaian IKU Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat	51
Tabel 18.	Capaian IKU Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	54
Tabel 19.	Rincian Bantuan Benih Ikan Laut	54
Tabel 20.	Capaian IKU Produksi Calon Induk Ikan Laut yang diproduksi BPBL Ambon	58
Tabel 21.	Rincian Produksi Calon Induk Unggul	59

Tabel 22.	Kegiatan Diseminasi Teknologi Budidaya tahun 2024	61
Tabel 23.	Capaian IKU Layanan Diseminasi Teknologi Perikanan Budidaya Bidang Pembesaran Ikan	62
Tabel 24.	Capaian IKU Bantuan Sarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok BPBL Ambon	64
Tabel 25.	Capaian IKU Bantuan Benih Ikan Hias Laut BPBL Ambon	65
Tabel 26.	Capaian IKU Prasarana Produksi yang direhabilitasi BPBL Ambon	68
Tabel 27.	Capaian IKU Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan	70
Tabel 28.	Capaian IKU Persentase sampel Surveillance Resistensi Antimikroba yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	73
Tabel 29.	Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN BPBL Ambon	75
Tabel 30.	Capaian IKM Hasil Penilaian Konsensus ZI di BPBL Ambon	80
Tabel 31.	Capaian IKM Persentase penyelesaian LHP BPK atas satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	83
Tabel 32.	Capaian IKM Nilai Rekon SAKIP lingkup BPBL Ambon	83
Tabel 33.	Capaian IKM Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	86
Tabel 34.	Capaian IKM Nilai Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPBL Ambon	87
Tabel 35.	Capaian IKM Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPBL Ambon	89
Tabel 36.	Capaian IKM Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa BPBL Ambon	90
Tabel 37.	Capaian IKM Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPBL Ambon	92
Tabel 38.	Deskripsi Tone Berita	93
Tabel 39.	Capaian IKM Persentase Pemberitaan Netral Positif terhadap Total Pemberitaan Sektor Perikanan Budidaya	94
Tabel 40.	Capaian IKM Pengawasan kearsipan BPBL Ambon	95
Tabel 41.	Capaian IKM Indeks Pengelolaan Kepegawaian	96
Tabel 42.	Capaian IKM Pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan KUSUKA	98
Tabel 43.	Pagu dan Realisasi Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon per Jenis Belanja Tahun 2024 dan 2023	99

Tabel 44. Data realisasi anggaran pada indikator kinerja utama (IKU) program prioritas	100
Tabel 45. Efisiensi Anggaran pada indikator kinerja utama (IKU) program prioritas	105

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (BPBL Ambon) sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan penerapan teknik perbenihan dan pembudidayaan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya induk/benih ikan dan lingkungan perairan disekitarnya. Lingkup wilayah kerja BPBL Ambon meliputi wilayah Maluku, Sulawesi, Papua dan Papua Barat. Cakupan wilayah kerja yang cukup luas yakni mencakup Indonesia bagian timur, secara langsung berdampak pada besarnya tanggung jawab yang diemban dengan tugas pokok dalam hal budidaya laut dimana BPBL Ambon dituntut mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di bidang perikanan budidaya laut guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan kegiatan budidaya laut di wilayah kerja melalui peningkatan kinerja dan kebijakan program yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2024 ini merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis BPBL Ambon. Laporan Kinerja adalah dokumen evaluasi untuk mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBL Ambon dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kegiatan.

Pada tahun 2024, BPBL Ambon menetapkan 4 sasaran kegiatan dan 25 indikator kinerja utama. Masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi balai. Dalam mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2024, jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 33.724.991.000 (Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) yang tertuang dalam DIPA Nomor-032.04.2.567720/2024 tanggal 24 November 2023. Dengan adanya revisi anggaran di tahun 2024 ini, besaran alokasi anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 32,927,549.000 (Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh

Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Realisasi Anggaran sampai dengan akhir Desember tahun 2024 sebesar Rp. 32.737.688.664 (Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) atau 99,42% dari total pagu anggaran. Proses pencapaian Indikator kinerja utama pada tahun 2024 IKU utama telah dicapai dan dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan.

Berikut adalah penjabaran persentase capaian IKU sampai dengan September tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. IKU nilai PNBPN lingkup BPBL Ambon tercapai Rp. 1.047.956.775,00 atau 108,22% dari target tahunan.
2. IKU Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat tercapai 100,00% dari target tahunan.
3. Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang disalurkan tercapai 100,00% dari target tahunan
4. Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat tercapai 150,00% dari target tahunan
5. Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat tercapai 100,72% dari target tahunan.
6. Calon induk ikan laut yang diproduksi di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Ekor), tercapai 4.191 ekor atau 102,47% dari target tahunan.
7. Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon 110% dari target tahunan.
8. Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang disalurkan ke masyarakat 100% dari target tahunan.
9. Persentase bantuan benih ikan hias laut yang tersalurkan ke masyarakat tercapai 260% dari target tahunan
10. Prasarana produksi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang direhabilitasi sebanyak 1 Unit di tahun ini
11. Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (%), tercapai 279,78% dari target tahunan.

12. Persentase Pengujian Sampel Antimikrobal Resistance (AMR) (%) tercapai 157,14% dari target tahunan.
13. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Nilai), sebesar 88,32 di akhir semester kedua;
14. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai) tercapai 79,78 di akhir semester kedua;
15. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Ambon (%) tercapai 100% pada akhir semester kedua;
16. Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai) tercapai 82,80 pada akhir semester kedua;
17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Ambon (%), tercapai 100% pada akhir tahun 2024;
18. Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tercapai 97,21 akhir semester kedua;
19. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%), tercapai 85,93% pada akhir semester kedua
20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%), tercapai 82,89% pada akhir semester kedua
21. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%), tercapai 87,60% pada akhir semester kedua
22. Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tercapai 100% pada akhir tahun 2024
23. Nilai Pengawasan Kearsipan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Indeks) tercapai 69,85 pada akhir semester kedua
24. Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks), tercapai 2,00 pada akhir semester kedua.
25. Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan KUSUKA lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%), tercapai 96,36% pada akhir semester kedua.

Beberapa Indikator Kinerja Utama lingkup BPBL Ambon pada tahun 2024 telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penyusunan perencanaan dan kesesuaian pelaksanaan teknis di lapangan sehingga proses ketercapaian kinerja 2024 dapat dilaksanakan dengan baik.

Tindak lanjut penerapan rekomendasi adalah penyusunan target perencanaan kinerja di 2024 harus disusun sebaik mungkin dengan mempertimbangkan berbagai faktor teknis dimulai dari perencanaan anggaran hingga pelaksanaan kegiatan prioritas yang sesuai dengan visi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

1.1. Latar Belakang

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, telah mengamanatkan agar melakukan pembangunan berbagai bidang secara berkelanjutan. Fokus RPJMN 2020 – 2024, yaitu memantapkan pembangunan keunggulan kompetitif berbasis SDA, SDM Berkualitas, dan Kemampuan IPTEK sehingga diharapkan dapat terwujud : (i) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas; (ii) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (iii) meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan (iv) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (v) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (vi) membangun lingkaran hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (vii) memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Sesuai dengan arahan RPJMN tersebut, selama kurun waktu tahun 2020-2024, fokus kebijakan pembangunan perikanan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut : (i) teknologi produksi melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah; (ii) Sosial Ekonomi, melalui keterlibatan semua stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; dan (iii) Keberlanjutan lingkungan, melalui aktivitas perikanan budidaya ramah lingkungan dan memperhatikan daya dukung lingkungan dan (iv) berorientasi pasar, perikanan budidaya memproduksi komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan pasar. Arah kebijakan perikanan budidaya tersebut dengan potensi dan keunggulan karakteristik yang ada, diyakini mampu memberi kontribusi pada 9 (sembilan) agenda pembangunan nasional pemerintah (NAWACITA), diantaranya mewujudkan kemandirian ekonomi (termasuk pembudidaya ikan), serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi budidaya yang memiliki daya saing dan berkelanjutan. Adapun strategi yang ditempuh untuk mewujudkan arah

kebijakan pembangunan perikanan budidaya tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut : (i) Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan; (ii) Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan ; dan (iii) Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya.

Dengan ditetapkan nya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budidaya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dengan masing-masing IKU seperti yang tercantum pada Renstra dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budidaya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja antara lain :

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon kepada seluruh *stakeholders*;
2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun anggaran 2024 dalam upaya perbaikan kinerja atas tahun sebelumnya; dan sebagai bahan inputan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan uji terap teknik dan kerjasama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan serta bimbingan teknis perikanan budidaya laut yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor : 6/PERMEN-KP/2014 yang diperbaharui dalam Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 yang diuraikan lebih rinci dalam fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan teknis dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan;
2. Pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya laut;
3. Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi perikanan budidaya laut;
4. Pelaksanaan sertifikasi system perikanan budidaya laut;
5. Pelaksanaan kerjasama teknis budidaya laut;
6. Pengelolaan dan pelayanan system informasi dan publikasi perikanan budidaya laut;
7. Pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya laut;
8. Pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya laut;
9. Pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu dan sarana produksi perikanan budidaya laut;
10. Pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut; dan
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah menjadi Eselon IIIa dengan struktur organisasi terdiri atas:

1. Kepala Balai
2. Sub Bagian Umum
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, tersaji pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi BPBL Ambon Tahun 2024

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh 1 Kasubag Umum, kelompok Kerja dan seluruh pegawai yang berjumlah 62 orang dengan kompetensi yang berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu mewujudkan tercapainya kinerja yang akuntabel.

Adapun tugas masing-masing bagian dalam struktur organisasi BPBL Ambon adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

2. Kelompok Kerja

Tim Kelompok Kerja merupakan tim mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai IKU yang satker. Tim kerja terdiri dari pejabat fungsional umum dan tertentu yang menjalankan kegiatan kerekrayasaan, pengujian, pendampingan, penerapan standar/sertifikasi perbenihan dan pembudidayaan ikan air laut, pengendalian hama dan penyakit ikan, pengawasan benih/budidaya serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

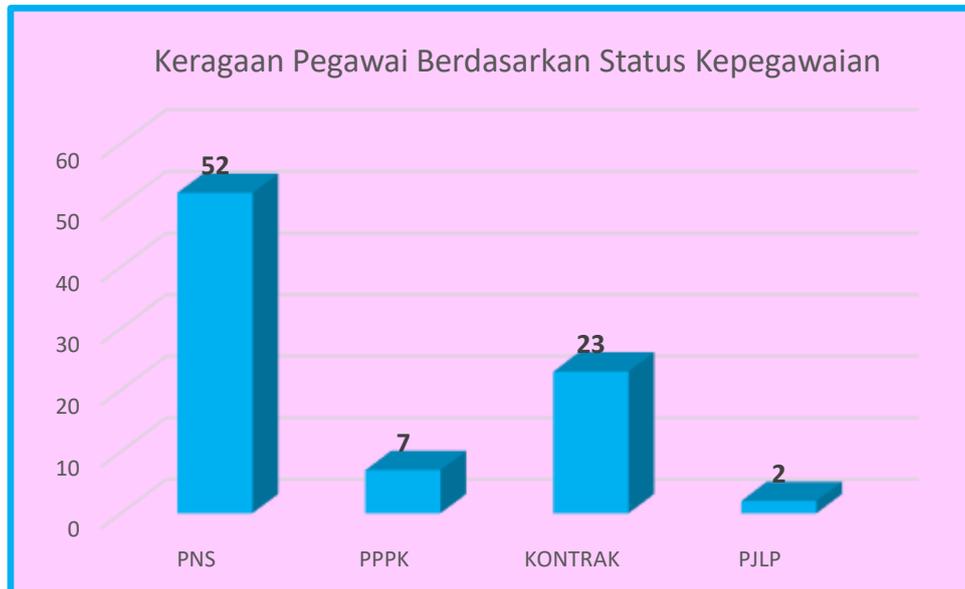
Pejabat fungsional tertentu di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon terdiri dari : Analis Akuakultur, Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengelola Kesehatan Ikan, Statistisi, dan Pranata Humas.

Selain 2 bagian utama yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan SK Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon No. 05/Kpts/BPBLA/OT.210/I/2022 tentang Struktur Organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon 2022 terdiri dari 4 divisi yakni:

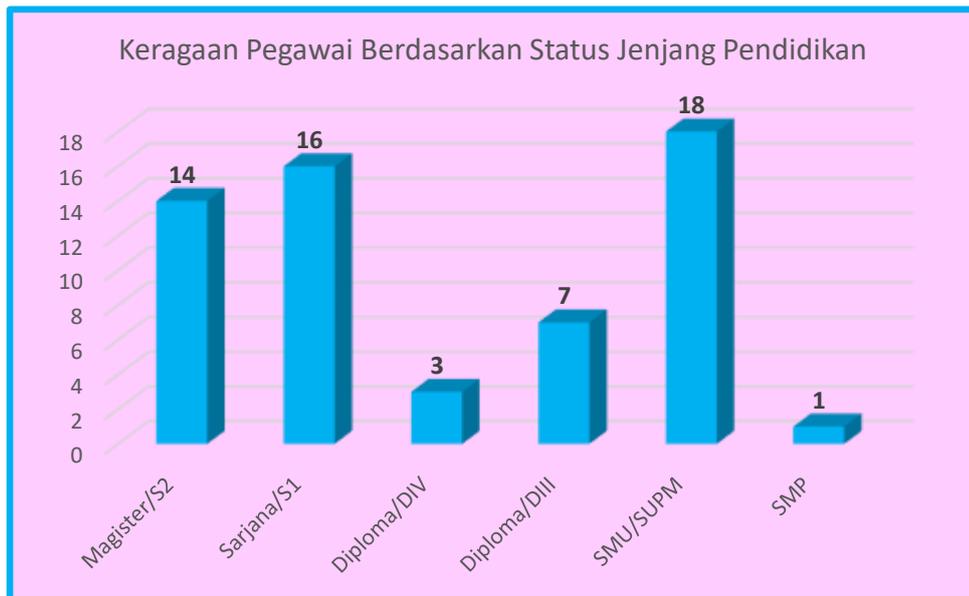
1. Divisi Produksi Benih Ikan Konsumsi
2. Divisi Produksi Calon Induk dan Rumput Laut
3. Divisi Produksi Benih Ikan Hias Laut
4. Divisi Pengelolaan Laboratorium

1.4. Sumberdaya Manusia

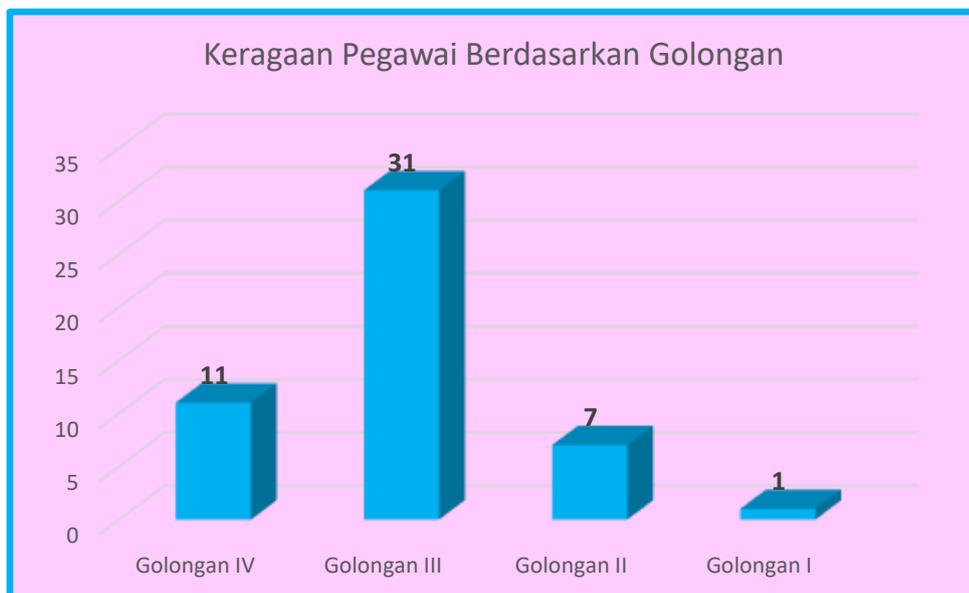
Jumlah Pegawai BPBL Ambon pada tahun 2024 terdiri dari 59 ASN (PNS dan PPPK) serta tenaga kontrak yang diuraikan sebagai berikut :



Grafik 1. Komposisi Pegawai Lingkup BPBL Ambon 2024



Grafik 2. Pendidikan Pegawai (PNS dan PPPK) Lingkup BPBL Ambon 2024



Grafik 3. Golongan Pegawai (PNS) Lingkup BPBL Ambon 2024

1.5. Isu Strategis Pengembangan Budidaya Laut di Wilayah Kerja

Pengembangan budidaya laut atau dikenal dengan Marikultur terus dikembangkan. Didukung dengan potensi yang cukup besar, marikultur juga dinilai akan dapat berkontribusi banyak untuk mendorong Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Secara umum data produksi perikanan budidaya pada 2024 ditargetkan 24,85 juta ton, dimana produksi ikan dan udang sebesar 12,5 juta ton

dan rumput laut 12,33 juta ton, dan ikan hias 1,64 Miliar ekor. Pengembangan kegiatan marikultur di wilayah kerja juga terus dilakukan guna mendukung peningkatan nilai produksi nasional khususnya produksi komoditas unggulan laut yang dikembangkan sampai saat ini.

Maluku menjadi salah satu provinsi kepulauan dengan potensi laut yang cukup besar, data menunjukkan potensi laut Maluku dapat mencapai 3,9 Juta ton dengan estimasi nilai perolehan sekitar Rp. 117 Triliun. Dengan kekayaan laut yang melimpah, sektor perikanan laut berpeluang besar dalam mendukung perekonomian nasional. Dalam hal pengembangan budidaya laut di Maluku memiliki beberapa komoditas unggulan. Komoditas unggulan yang dikembangkan dan memiliki nilai ekonomis penting antara lain beberapa jenis ikan kerapu, ikan kakap putih, dan ikan bubara atau Ikan Kuwe. Selain ikan konsumsi, ikan hias juga menjadi sektor andalan pengembangan budidaya. Ikan clownfish atau ikan badut atau banyak dikenal ikan nemo telah menjadi salah satu primadona komoditas ikan hias laut yang dibudidayakan. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon saat ini telah mampu mengembangkan teknologi budidaya ikan hias clownfish dengan melakukan hybridisasi induk sehingga diperoleh varian yang beraneka ragam corak dan warna, tercatat lebih dari 50 varian clownfish yang telah dihasilkan dan memiliki nilai jual tinggi dipasaran.

Selain itu Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya juga tengah fokus dalam mengembangkan komoditas unggulan rumput laut. Budidaya rumput laut menggunakan teknik kultur jaringan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan produksi rumput laut di Indonesia. Teknik ini telah diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan tujuan untuk menggenjot produksi rumput laut dan memperbaiki kualitas bibit rumput laut yang ada di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan produksi rumput laut, KKP juga telah membangun kawasan-kawasan sentra budidaya rumput laut di beberapa daerah seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Kawasan-kawasan ini sepenuhnya menggunakan bibit rumput laut hasil dari kultur jaringan.

Bibit rumput laut hasil kultur jaringan juga telah disalurkan kepada kelompok pembudidaya dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil

produksi rumput laut secara keseluruhan. Dengan penerapan teknik kultur jaringan, diharapkan produksi rumput laut di Indonesia dapat terus meningkat dan menjadikan Indonesia sebagai produsen rumput laut nomor satu di dunia.

Beberapa isu dan permasalahan dalam pengembangan budidaya laut di wilayah timur Indonesia antara lain:

1. Penyediaan, distribusi induk dan benih berkualitas masih terbatas;
2. Mahalnya biaya pakan dalam budidaya;
3. Ancaman infeksi penyakit;
4. Keterbatasan sarana dan prasarana perikanan budidaya sehingga berdampak rendahnya nilai produksi
5. Implementasi konsep biosecurity yang belum memadai sehingga intensitas infeksi penyakit pada ikan budidaya masih terus terjadi;
6. Masih rendahnya kualitas SDM pembudidaya di wilayah kerja
7. Masih rendahnya akses pasar yang menunjang pemasaran produk budidaya, dan
8. Akses permodalan bagi pembudidaya masih rendah

1.6. Sistematika Penyajian Laporan kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini disajikan ringkasan mengenai tujuan, sasaran, capaian kinerja, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta antisipasi untuk menanggulangi permasalahan yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi dari Balai Perikanan Perikanan Budidaya Laut Ambon sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Budidaya, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan Laporan kinerja.

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, pada bab ini disajikan rencana strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2020-2024. Rencana kinerja tahun 2024 dan indikator keberhasilan pencapaian penetapan kinerja berupa target program prioritas.

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, pada bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK), evaluasi dan analisis capaian kinerja termasuk didalamnya keberhasilan dan kegagalan pencapaian target serta hambatan/kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan di tahun sebelumnya. Serta akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.

Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan kendala serta upaya tindak lanjut untuk perbaikan tahun mendatang.

Lampiran, pada bab ini berisi data dukung yang diperlukan dalam penjelasan/pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV.

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Arahan utama Presiden yang kemudian disinkronkan dengan 7 agenda pembangunan RPJMN tahun 2022-2024, sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMN 2020-2024, antara lain:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

2.1. Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Untuk visi pembangunan nasional 2020-2024 menggunakan Visi Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”. Visi ini diartikan di mana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia maju sesuai pada cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan UUD 1945. Sedangkan visi KKP 2020 – 2024 adalah “Terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2020 – 2024 yang sejalan dengan visi presiden, wakil presiden dan KKP adalah “Terwujudnya masyarakat

perikanan budidaya yang sejahtera dan sumberdaya perikanan budidaya yang berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”.

2.2. Misi Presiden

Visi di atas dapat diwujudkan dengan pelaksanaan Misi Presiden dalam Nawacita II, antara lain:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia, melalui peningkatan daya saing SDM dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui peningkatan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon bertanggung jawab untuk membantu dalam penyelenggaraan pembangunan perikanan budidaya laut di lingkup wilayah kerjanya adapun visi dan misi yang ingin diwujudkan oleh BPBL Ambon sejalan dengan visi dan misi Ditjen Perikanan Budidaya yang mengacu pada visi misi presiden dan wakil presiden 2020 – 2024. Penerapan dan pelaksanaan visi misi dilakukan secara bertanggungjawab didasari sikap gotong royong, yang saling mendukung memberi manfaat dan memberikan nilai tambah dari sisi ekonomi bagi kepentingan stakeholder perikanan budidaya.

2.3. Arahan Utama Presiden

Misi Presiden di atas diimplementasikan melalui 5 Arahan Utama Presiden yang disampaikan pada Pidato Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2019, antara lain:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, Membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai IPTEK, mengundang talenta global untuk bekerjasama, mengembangkan *endowment fund* untuk manajemen SDM, serta optimalisasi kerjasama dengan industry
2. Pembangunan Infrastruktur, Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3. Penyederhanaan Regulasi, Kendala regulasi disederhanakan, dipotong dan dipangkas dengan pendekatan *omnibus law*, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang dan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi, Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.4. Kebijakan dan Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Isu strategis dan tantangan pembangunan kelautan dan perikanan dalam lima tahun ke depan, diantaranya adalah (1) Pemberantasan perikanan ilegal, tanpa pelaporan, dan tak diatur (*IUU fishing*), (2) Keberlanjutan (*sustainability*) Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, (3) Peningkatan kesejahteraan (*prosperity*) masyarakat, (4) Meningkatkan daya saing industri perikanan, (5) Pengembangan SDM dan IPTEK Kelautan dan Perikanan, (6) Pembangunan Sumber Daya Kelautan (KKP 2019).

Ada 2 arahan Presiden untuk pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu: memperbaiki hubungan dengan *stakeholders* dan perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat lagi (KKP 2019).

Kebijakan pokok pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang dapat menyerap lapangan pekerjaan dan meningkatkan devisa negara, yaitu melalui delapan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan SDM yang unggul
2. Pemberdayaan dan perlindungan usaha
3. Pengelolaan SDKP yang berkelanjutan
4. Peningkatan pengawasan SDKP
5. Industrialisasi kelautan dan perikanan
6. Peningkatan usaha dan investasi
7. Penguatan kebijakan dan regulasi berbasis data, informasi, pengetahuan yang faktual dan komunikasi dengan *stakeholders*
8. Reformasi birokrasi (KKP 2019).

Untuk melaksanakan kebijakan diatas maka strategi yang berkaitan dengan perikanan budidaya adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan dan perlindungan usaha
2. Pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan
 - Pengelolaan kawasan perikanan budidaya berkelanjutan
 - Optimalisasi produksi perikanan budidaya
 - Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya
3. Peningkatan usaha dan investasi KP
4. Penguatan kebijakan regulasi berbasis data dan informasi
5. Reformasi Birokrasi

Rumusan rencana strategis ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPBL Ambon. Penetapan tujuan adalah hal yang penting sebagai dasar penentuan arah strategis dan perubahan serta perbaikan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang, yaitu mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan BPBL Ambon adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan, khususnya di wilayah kerja BPBL Ambon, mencakup kegiatan produksi calon induk, benih dan rumput laut kultur jaringan unggul.
2. Tersedianya paket teknologi budidaya laut yang mampu diterapkan oleh masyarakat pembudidaya;
3. Terselenggaranya kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan dalam menunjang pengembangan kawasan budidaya laut yang menerapkan system usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan.

2.5. Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon

Mengacu pada sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya 2020 – 2024 sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan ditetapkan melalui tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang terbagi menjadi empat perspektif dalam bentuk peta sasaran strategis BPBL Ambon.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai PNBP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Rp)
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase bantuan bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat (%) • Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen) • Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen) • Persentase Bantuan Benih Ikan Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen) • Calon Induk Ikan Laut yang Diproduksi (Ekor)

	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan (Persen) • Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Laut yang Dimanfaatkan (Persen) • Persentase Bantuan Benih Ikan Hias Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen) • Prasarana Perbenihan yang Direhabilitasi (Unit)
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kawasan dan Kesehatan Ikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (Persen) • Persentase Pengujian Sampel Antimikrobia Resistance (AMR) (Persen)
<ul style="list-style-type: none"> • Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks) • Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai) • Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (Lhp) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Ambon (Persen) • Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai) • Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Ambon (Persen) • Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%) • Nilai Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%) • Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%) • Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)

	<ul style="list-style-type: none"> • Ratio pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang sub sektor perikanan budidaya di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%) • Nilai Pengawasan Kearsipan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Indeks) • Indeks Pengelolaan Kepegawaian • Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budi Daya yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)
--	---

2.5.1. Dukungan Anggaran

Dalam mendukung terlaksananya perencanaan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 33.724.991.000 (Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah). Berikut adalah komposisi penganggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2024:

Tabel 2. Komposisi Anggaran BPBL Ambon 2024

NO.	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Perbenihan Ikan	6.529.664.000
2.	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	10.280.000.000
3.	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	1.825.853.000
4.	Dukungan Internal lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	15.089.474.000
Total Anggaran BPBL Ambon Tahun 2024		33.724.991.000

2.6. Penetapan Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk:

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pasca automatic adjustment tahun 2024, adalah sebagai berikut:



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK). FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL dijerpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA LAUT AMBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sarwono**
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut
Ambon



Tb. Haeru Rahayu



Sarwono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA LAUT AMBON**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkatkan di Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon	1. Nilai PNBPN Wilayah Kerja Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Rupiah)	968.400.000
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	2. Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		3. Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		4. Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		5. Persentase Bantuan Benih Ikan Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		6. Calon Induk Ikan Laut yang Diproduksi (Ekor)	4090
		7. Persentase Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan (Persen)	100
		8. Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Laut yang Dimanfaatkan (Persen)	75
		9. Persentase Bantuan Benih Ikan Hias Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		10. Prasarana Perbenihan yang Direhabilitasi (Unit)	1
		3.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kawasan dan Kesehatan Ikan
12. Persentase Pengujian Sampel Antimicrobial Resistance (AMR) (Persen)	100		

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon	13.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)	85
		14.	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
		15.	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (Lhp) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Ambon (Persen)	100
		16.	Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)	82
		17.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Ambon (Persen)	80
		18.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)	93,76
		19.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)	86
		20.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)	80
		21.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)	80
		22.	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)	86
		23.	Nilai Pengawasan Kearsipan Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)	75

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	24. Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	4
	25. Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budi Daya yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	80

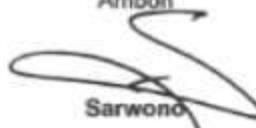
Jakarta, 20 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon

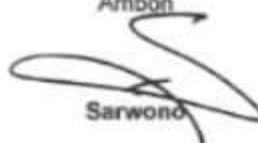


Sarwono

DATA ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Perbenihan Ikan	6.529.664.000
2.	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	11.000.000.000
3.	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan ikan	1.825.853.000
4.	Dukungan Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	15.089.474.000
Total Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon Tahun 2024		34.444.991.000

Jakarta, 20 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Tb. Haeru Rahayu
aPihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut
Ambon
Sarwono



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA LAUT AMBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sarwono**
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

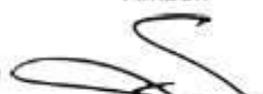
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya


Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut
Ambon


Sarwono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA LAUT AMBON**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkatkan di Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon	1.	Nilai PNBP Wilayah Kerja Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Rupiah)	968.400.000
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	2.	Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		3.	Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		4.	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		5.	Persentase Bantuan Benih Ikan Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		6.	Calon Induk Ikan Laut yang Diproduksi (Ekor)	4090
		7.	Persentase Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan (Persen)	100
		8.	Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Laut yang Dimanfaatkan (Persen)	75
		9.	Persentase Bantuan Benih Ikan Hias Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		10.	Prasarana Perbenihan yang Direhabilitasi (Unit)	1
		3.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kawasan dan Kesehatan Ikan	11.
12.	Persentase Pengujian Sampel Antimikrobia Resistance (AMR) (Persen)			100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon	13.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)	85
		14.	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
		15.	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (Lhp) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Ambon (Persen)	100
		16.	Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)	82
		17.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Ambon (Persen)	80
		18.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)	93,76
		19.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)	71
		20.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)	80
		21.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)	80
		22.	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)	86
		23.	Nilai Pengawasan Kearsipan Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)	75

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		24. Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	4
		25. Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budi Daya yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	80

Jakarta, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut
Ambon



Sarwono

DATA ANGGARAN :

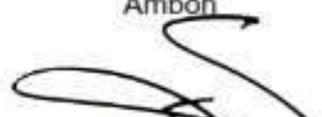
NO.	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Perbenihan Ikan	6.232.292.000
2.	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	10.271.430.000
3.	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	1.334.353.000
4.	Dukungan Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	15.089.474.000
Total Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon Tahun 2024		32.927.459.000

Jakarta, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya


Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut
Ambon


Sarwono

Perubahan Target Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan BPBL Ambon adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Sebelum dan sesudah Perubahan Target Kinerja BPBL Ambon

Sebelum			Sesudah		
Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Nilai Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	86	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	71

2.7. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2024, BPBL Ambon menerapkan pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh tim *Strategic Management Office* (Tim Pengelola Kinerja BPBL Ambon) sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat;
2. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU.
3. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian rata-rata indikator kinerja utama dan IKM pada tahun 2024 adalah sebesar 112,22 yang termasuk kategori Istimewa.

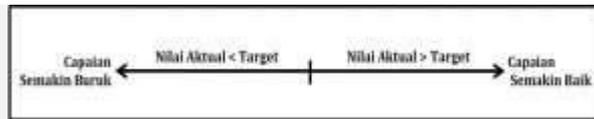
Berikut adalah hasil tangkap layar capaian kinerja BPBL Ambon tahun 2024.



Gambar 2. Capaian IKU + IKM BPBL Ambon 2024

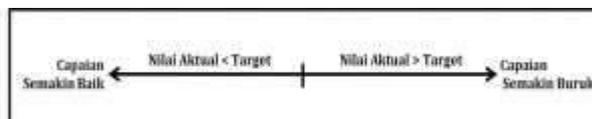
Polarisasi data menunjukkan ekspektasi (harapan) arah nilai aktual/realisasi dari IKU dibandingkan relatif terhadap nilai target.

- 1. Maximize:** Semakin tinggi nilai aktual/realisasi IKU terhadap target, semakin baik capaian kerjanya.



Contoh polarisasi data *maximize*.

- 2. Minimize:** Semakin rendah nilai aktual/realisasi IKU terhadap target, semakin baik capaian kerjanya.



Contoh polarisasi data *minimize*.

- 3. Stabilize:** Capaian kinerja dianggap semakin baik apabila nilai aktual/realisasi IKU mendekati target dalam suatu rentang tertentu.



Contoh polarisasi data *stabilize*.

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengukuran capaian IKU, bab ini menguraikan tentang indikator kinerja kegiatan, penjelasan tentang capaiannya, kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya termasuk langkah antisipasi yang dilakukan pada tahun berjalan.

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan 2024	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target 2024	Realisasi 2024	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Nilai PNBP BPBL Ambon (Rp)	968.400.000	968.400.000,00	1.047.956.775,00	Capaian IKU ini mencapai 108,22% pada tahun 2024
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	75,00%	75,00%	100,72%	Capaian IKU ini mencapai 120% pada tahun 2024
		Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	75,00%	75,00%	100,00%	Capaian IKU ini mencapai 120% pada semester kedua
		Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75,00%	75,00%	100,00%	Capaian IKU ini mencapai 120% pada tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan 2024	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target 2024	Realisasi 2024	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	75,00%	75,00%	150%	Capaian IKU ini mencapai 120% pada semester I
		Calon induk ikan laut yang diproduksi di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Ekor)	4.090 ekor	4.090 ekor	4.191 ekor (102,47%)	Capaian IKU ini mencapai 102,47% pada tahun 2024
		Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100% 4 Lokasi	100%	110%	Capaian IKU ini tercapai 110% pada akhir tahun 2024
		Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang disalurkan ke masyarakat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	75,00%	75,00%	100,00%	Capaian IKU ini tercapai 120% pada akhir tahun 2024
		Persentase bantuan benih ikan hias laut yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	75,00%	75,00%	260,00%	Capaian IKU ini tercapai 120% pada semester II

No.	Sasaran Kegiatan 2024	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target 2024	Realisasi 2024	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Prasarana produksi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang direhabilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Unit)	1 unit	1 unit	1 unit	Capaian IKU ini 100% pada akhir tahun
3.	Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya bidang kawasan dan kesehatan ikan di Wilayah Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Persentase sampel kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100,00%	100,00%	279,78%	Capaian IKU ini mencapai 120% pada tahun 2024
		Persentase sampel Surveillance Resistensi Antimikroba yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100,00%	100,00%	157,14%	Capaian IKU ini mencapai 120% pada tahun 2024
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Indeks Profesionalitas ASN di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	85,00	85,00	88,32	Capaian IKU ini mencapai 103,91% pada semester II
		Hasil Penilaian Konsensus ZI di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	76,00	76,00	79,78	Capaian IKU ini mencapai 104,97% di akhir tahun
		Persentase penyelesaian LHP BPK atas satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100,00%	100,00%	100,00%	Capaian IKU ini mencapai 100% di akhir tahun
		Nilai Rekon SAKIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	82,00	82,00	82,80	Capaian IKU ini 100,98% di akhir tahun

No.	Sasaran Kegiatan 2024	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target 2024	Realisasi 2024	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	80,00%	80,00%	100,00%	Capaian IKU ini mencapai 120% pada tahun 2024
		Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	93,76	93,76	97,21	Capaian IKU ini tercapai 103,68% di tahun 2024
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	71,00%	71,00%	85,93%	Capaian IKU ini mencapai 120% di akhir tahun
		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	80,00%	80,00%	82,89%	Capaian IKU ini mencapai 103,61% di akhir tahun
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	80,00%	80,00%	87,60%	Capaian IKU ini mencapai 109,50% di akhir tahun
		Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	86,00%	86,00%	100,00%	Capaian IKU ini mencapai 116,28% pada tahun 2024
		Nilai Pengawasan Kearsipan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	75,00	75,00	69,85	Capaian IKU ini mencapai 93,13 di akhir tahun
		Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	4,00	4,00	2,00	Capaian IKU ini mencapai 50% di akhir tahun
		Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan KUSUKA lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	80,00%	80,00%	96,36%	Capaian IKU ini mencapai 120% di akhir tahun

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Bagian berikut menguraikan tentang evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan dan analisis capaian kinerja dari sasaran kegiatan.

SASARAN KEGIATAN I : EKONOMI SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA MENINGKAT DI BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

IKU 1 : Nilai PNBP BPBL Ambon (Rp)

PNBP merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan. Kelompok penerimaan negara bukan pajak meliputi:

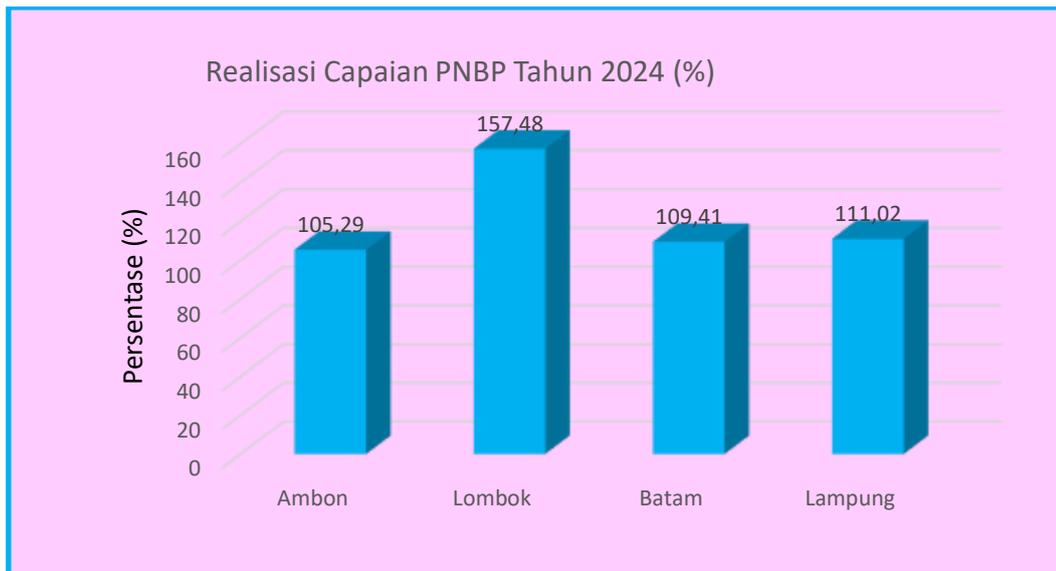
- Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah
- Penerimaan dari pemanfaatan sumberdaya alam
- Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
- Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
- Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Tabel 5. Capaian IKU “Nilai PNBP BPBL Ambon Tahun 2024”.

Sasaran Kegiatan : Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Nilai PNBP BPBL Ambon (Rp)							
Realisasi				Tahun 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Realisasi 2024 terhadap 2023
731.947.831	742.672.688	940.903.877	1.057.818.530	968.400.000	1.047.956.775	108,22	99,07

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPBL Ambon Tahun 2024 adalah sebesar Rp 968.400.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.047.956.775 atau sebesar 108,22 % terhadap target tahun 2024. Capaian PNBPN tersebut diperoleh dari penjualan hasil perikanan, pendapatan jasa lainnya dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Fungsional dan Umum sebesar Rp. 1.014.609.633; dan
2. Pendapatan Non Anggaran sebesar Rp. 33.347.142



Grafik 4. Perbandingan Capaian IKU PNBPN Satker Laut

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian PNBPN pada 4 (Empat) satker laut yakni Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Lombok dan Batam pada tahun 2024 bervariasi dimana terlihat bahwa PNBPN BPBL Ambon terendah dari 4 UPT yang ada, hal ini tentunya disebabkan perbedaan target yang diterima yang ditetapkan dalam PK Balai, selain itu perbedaan jenis komoditas yang dikembangkan setiap balai memiliki karakteristik yang berbeda, selera pasar dan konsumen yang berbeda juga akan berpengaruh pada aspek pemasaran atau tinggi rendahnya penjualan hasil komoditas setiap Balai Perikanan Budidaya Laut.

Penerimaan PNBPN BPBL Ambon pada tahun 2024 mencapai 108,22% dari target yang telah ditetapkan, hal ini didukung dengan nilai penjualan komoditas budidaya dan kegiatan pendukung lainnya. Tercapainya target di tahun ini dikarenakan proses penjualan komoditas dilakukan secara bertahap dikarenakan terbatasnya permintaan pasar. Dan rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan jalan meningkatkan koordinasi dan promosi kepada stekholder ketersediaan komoditas untuk meningkatkan nilai PNBPN balai di waktu kedepan.

Penerimaan PNBPN Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon relatif sama jika dibandingkan penerimaan PNBPN pada periode 2023. Penerimaan PNBPN pada 2023 sebesar Rp. 1.057.818.530 sedangkan capaian penerimaan PNBPN BPBL Ambon pada

tahun sebesar Rp. 1.047.956.775. Hal itu menunjukkan bahwa kegiatan budidaya yang dilaksanakan semakin baik dari segi perencanaan dan pencapaian targetnya.

Rencana tindak lanjut yang telah dilaksanakan berdasarkan rekomendasi pada LKJ periode sebelumnya adalah pelaksanaan pengawasan secara berkala telah dilakukan oleh pimpinan dan PPK terhadap divisi produksi terkait target dan strategi pencapaian PNBPN pada saat rapat koordinasi bulanan yang dilakukan penentuan target perolehan PNBPN setiap divisi produksi dan pelaporan perolehan PNBPN pada Bendahara Penerimaan. Salah satu langkah pengendalian resiko penurunan hasil penjualan komoditas budidaya adalah dengan melakukan promosi langsung pada penjual maupun konsumen dan media sosial seperti WhatsApp terkait komoditas budidaya yang siap jual, diharapkan dengan cara seperti ini konsumen dapat dijangkau secara lebih luas dan melakukan perencanaan produksi pada tahun 2024 secara cermat sehingga hasil produksi budidaya dapat terserap oleh pasar dan meningkatkan perolehan PNBPN pada tahun berjalan.

SASARAN KEGIATAN II : MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

IKU 2 : Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)

Pada tahun 2024 secara nasional produksi rumput laut nasional ditargetkan sebesar 10,58 juta ton. Dalam mendukung nilai produksi tersebut Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon berusaha mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki terutama dalam proses penyediaan bibit kultur jaringan. Saat ini Laboratorium kultur jaringan rumput laut ditargetkan mampu menghasilkan 7100 planlet dimana akhir dari proses ini menghasilkan 7100 Kg bibit rumput laut yang siap didistribusikan ke sentra sentra budidaya rumput laut di wilayah kerja.

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini terealisasi sebesar Rp. 269.779.500,- dari pagu anggaran senilai Rp. 269.800.000 atau sebesar 99,99%.

Rumput laut Kotoni adalah salah satu komoditas unggulan dibidang perikanan dan kelautan Indonesia karena jenis rumput laut ini menghasilkan

karagenan yang bernilai ekonomis tinggi. Karagenan merupakan senyawa hidrokoloid dari polisakarida rantai panjang yang diperoleh dari hasil ekstraksi rumput laut dengan menggunakan air panas atau larutan alkali pada temperature tinggi. Rumput laut penghasil karagenan disebut rumput laut karaginofit, yang terdiri dari jenis *Kappaphycus sp*, *Euchema sp*, *Chondrus sp*, *Hypnea sp* dan *Gigartina sp*. Dalam industry dan perdagangan, karagenan memberikan manfaat antara lain dalam industry farmasi, makanan, dan kosmetik sebagai stabilizer, bahan pengental (thickener), pembentuk gel (gelling agent) dan pengemulsi, (Parenrengi et.al. 2011).

Peningkatan produksi rumput laut memerlukan ketersediaan bibit secara berkesinambungan. Pada saat ini pengadaan bibit rumput laut masih mengalami banyak kendala diantaranya iklim laut yang tidak bisa dikendalikan. Pada musim tertentu kondisi perairan tidak cocok untuk pertumbuhan rumput laut sehingga semuanya mati atau tidak tumbuh secara optimal, sehingga pada musim tanam berikutnya menyebabkan ketersediaan bibit sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Hal ini menyebabkan penyediaan bibit secara berkesinambungan untuk peningkatan luas area budidaya belum dapat terpenuhi.

Penyediaan bibit unggul rumput laut telah dilakukan dengan cara seleksi rumpun yang memiliki laju pertumbuhan harian tinggi pada beberapa generasi penanaman, (Masak et al.2011). Bibit seleksi kemudian diperbanyak dengan metode stek kemudian disebar ke pembudidaya rumput laut. Produktifitas penyediaan bibit unggul dengan metode stek ini belum dapat memenuhi kebutuhan pembudidaya rumput laut yang diperkirakan mencapai 1-2 juta ton per tahun.

Kultur jaringan merupakan Teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata tunas serta menumbuhkan bagian bagian tersebut dalam media buatan secara aseptik dalam wadah tertutup sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap.

Bibit yang dihasilkan dari kultur jaringan mempunyai beberapa keunggulan antara lain :

- Memiliki sifat identic dengan induknya
- Tidak terlalu membutuhkan tempat yang luas

- Mampu menghasilkan bibit dengan jumlah besar
- Kesehatan dan mutu bibit lebih terjamin
- Pada rumput laut, produksi bibit dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa dipengaruhi musim.

Teknik embryogenesis somatic pada rumput laut adalah Teknik mengubah sel somatic dari talus menjadi sel embrio bipolar atau dalam rumput laut disebut sel carospore. Teknik ini dilakukan dengan menginduksi tumbuhnya kalus dari potongan talus, kalus adalah sekelompok sel yang tumbuh tidak berdiferensiasi, sel sel kalus yang terbentuk diregenerasikan menjadi kalus embriogenik yang selanjutnya sel embrio somatic ini diregenerasikan menjadi mikropropagul kemudian menjadi planlet siap diaklimatisasi.

Banyaknya mikropropagul yang dihasilkan menunjukkan tingginya tingkat kelangsungan hidup mikropropagul pada tahap ini, dan kendala yang dihadapi selama tahun 2024 ini adalah kontaminasi diatom dan keterlambatan kultur yang menyebabkan warna pucat dan mudah mengalami pemutihan, sehingga terjadi kematian walaupun dalam jumlah yang sedikit. Dan hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan sub kultur tanpa pupuk untuk mikropropagul yang terkontaminasi serta kultur kembali dengan media untuk yang berwarna pucat hingga talus mikropropagul kembali normal. adapun media yang digunakan dan stabil adalah P5-NW2PW2T.

Tabel 6. Capaian IKU “ Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)”

Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)							
Realisasi				Tahun 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Realisasi 2024 terhadap 2023
-	-	-	-	75	100	120	100

IKU Bantuan bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian di tahun sebelumnya. Proses produksi bibit rumput laut kultur jaringan berawal dari dari tahapan di laboratorium dengan produksi planlet dan mikropropagul dapat dipertahankan.

Untuk meningkatkan produksi bibit rumput laut kultur jaringan di laboratorium membutuhkan penambahan SDM untuk dapat meningkatkan produksi dan koleksi induk rumput laut dari berbagai lokasi untuk menghasilkan keragaman bibit rumput laut kultur jaringan. Pada tahun 2024 Rumput laut yang diproduksi oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sebesar 10.584 kg dan diantaranya telah disalurkan sebanyak 7.100 kg sebagai bantuan bibit rumput laut ke kelompok pembudidaya rumput laut di Kabupaten Wakatobi sebanyak 2 kelompok, Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 5 kelompok dan Kabupaten Buru sebanyak 1 kelompok.



Gambar 3 . Produksi Planlet Rumput Laut



Grafik 5. Capaian IKU Produksi Bibit Rumput Laut Satker Laut

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian IKU Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat pada satker Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dan Lombok pada tahun 2024 bervariasi, sedangkan BPBL Batam tidak ada bantuan bibit rumput laut. Data tersebut menunjukkan setiap satker dalam tahapan produksi planlet rumput laut berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya disebabkan perbedaan tata kelola yang diterapkan oleh setiap balai, misal dalam hal teknis penanganan komoditas, selain itu lokasi perairan memiliki karakteristik tersendiri dalam menunjang pertumbuhan rumput laut seperti tingkat pertumbuhan, respon kemampuan beradaptasi dengan lingkungan perairan.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan produksi planlet rumput laut antara lain melalui peningkatan jumlah sarana kultur sehingga kultur eksplan/kalus baru dapat ditingkatkan sehingga produksi planlet skala laboratorium akan meningkat. Selain itu adalah monitoring kondisi parameter perairan seperti kandungan fosfat dan unsur mikro lainnya harus dalam kondisi optimal.

Rencana aksi untuk periode mendatang adalah meningkatkan sarana prasarana penunjang kegiatan produksi sehingga produksi dapat ditingkatkan dengan cukup baik guna memenuhi planlet rumput laut berkualitas, dan siap diaklimatisasi dan dibesarkan di kebun bibit.

IKU 3 : Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)

Program bantuan sarana dan prasarana kebun bibit rumput laut kultur jaringan menjadi salah satu program prioritas Ditjen Perikanan Budidaya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Program ini adalah IKU Ditjen Perikanan Budidaya yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perikanan budidaya khususnya produksi rumput laut. Target atas IKU ini adalah 38 paket bantuan kebun bibit rumput laut.

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai bulan Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 1.736.658.595,- dari pagu anggaran senilai Rp. 1.805.006.000 atau sebesar 96,21%.

Perkembangan usaha budidaya rumput laut harus diimbangi dengan adanya ketersediaan bibit yang cukup dan berkualitas baik dan hal ini menjadi permasalahan dalam pengembangan budidaya rumput laut. Peningkatan produksi rumput laut memerlukan ketersediaan bibit secara berkesinambungan, baik secara kualitas maupun kuantitas serta sarana budidaya rumput laut yang memadai.

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya merupakan suatu komitmen yang menjadi faktor penting dalam menentukan arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Jenis dan jumlah bantuan yang diberikan berupa unit kebun bibit rumput laut kultur jaringan lengkap dengan bibit, tali dan pelampung. Adapun rincian bahan untuk 1 unit konstruksi kebun bibit rumput laut minimal seperti tertera pada Tabel berikut.

Tabel 7. Rincian Bahan Konstruksi 1 (satu) Unit Kebun Bibit Rumput Laut

		SPESIFIKASI
A.	Sarana Utama	
	1.	Bibit Rumput laut harus memenuhi kualifikasi sebagai bibit kultur jaringan dengan spesifikasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Strain: Kappaphycus alvarezii/Euchema cottoni - Bibit hasil perbanyakan kultur jaringan yang dihasilkan oleh UPT DJPB atau kelompok pembibit rumput laut binaan UPT DJPB (Pada saat penyerahan barang dilengkapi dengan surat keterangan asal "ASLI" yang diterbitkan oleh UPT DJPB. - Bibit starter Euchema cottoni (sakul/maumere/tambalang) dari kelompok pembibit RL - Kesegaran: Thalus tidak berlendir dan patah - Thalus bercabang banyak - Warna: Hijau/coklat/jingga - Bersih: tidak ditempeli lumut dan organisme lainnya
B.	Peralatan	
	1.	Tali Utama (minimal PE 12 mm)
	2.	Tali Jangkar (minimal PE 12 mm)
	3.	Tali Ris (PE 4-5 mm)
	4.	Tali Pengikat Pelampung (tali rafia atau minimal tali PE 3 mm)
	5.	Tali Pengikat Bibit (Tali Rafia/Tali Nylon/Tali PE 1 mm)
	6.	Pemberat / Jangkar (Berat min 50 kg atau kayu atau bambu yang ditancap)

		Untuk metode lepas dasar patok kayu (patok kayu atau bambu berdiameter minimal 5 cm)
	7.	Pelampung Utama (Styrofoam volume min 125 cm ³ atau bola berbahan PE dengan diameter min 30 cm)
	8.	Pelampung jalur (Botol HDPE 1 L atau bola dimeter minimal 10 cm)
	9.	Pelampung penunjang berupa Styrofoam atau drum plastic volume min 60 cm ³ atau bola berbahan PE dengan diameter min 20 cm.

Penerima Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut pada tahun 2024, yang telah melalui tahap identifikasi dan verifikasi dan telah menerima bantuan tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara

No.	Nama Kelompok	Alamat		Keterangan BAST
		Kabupaten/Kota	Provinsi	
1.	Citra Mandiri	Kepulauan Sula	Maluku Utara	B.789/BPBLA/PL.140/II/2024 Tanggal 28 Desember 2024
2.	Mina mandiri	Kepulauan Sula	Maluku Utara	B.789.1/BPBLA/PL.140/II/2024 Tanggal 28 Desember 2024
3.	Pasgatel	Kepulauan Sula	Maluku Utara	B.794/BPBLA/PL.140/II/2024 Tanggal 28 Desember 2024
4.	Santosa	Kepulauan Sula	Maluku Utara	B.794.1/BPBLA/PL.140/II/2024 Tanggal 28 Desember 2024
5.	Pulau Kucing	Kepulauan Sula	Maluku Utara	B.795/BPBLA/PL.140/II/2024 Tanggal 28 Desember 2024

Tabel 9. Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Pulau Morotai Propinsi Maluku Utara

No.	Nama Kelompok	Alamat		Keterangan BAST
		Kabupaten/Kota	Provinsi	
1.	Bawal	Pulau Morotai	Maluku Utara	B.972/BPBLA/PB.140/V/2024 Tanggal 4 Mei 2024
2.	Tike Laha	Pulau Morotai	Maluku Utara	B.973/BPBLA/PB.140/V/2024 Tanggal 4 Mei 2024
3.	Kakap	Pulau Morotai	Maluku Utara	B.973.1/BPBLA/PB.140/V/2024 Tanggal 4 Mei 2024
4.	Pomakirio	Pulau Morotai	Maluku Utara	B.973.2/BPBLA/PB.140/V/2024 Tanggal 4 Mei 2024
5.	Tonidora	Pulau Morotai	Maluku Utara	B.973.3/BPBLA/PB.140/V/2024 Tanggal 4 Mei 2024

Tabel 10. Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat

No.	Nama Kelompok	Alamat		Keterangan BAST
		Kabupaten/Kota	Provinsi	
1.	Arfak Bay II	Kaimana	Papua Barat	B.1346/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Desember 2024
2.	Somu I	Kaimana	Papua Barat	B.1347/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Desember 2024
3.	Arfak Culture	Kaimana	Papua Barat	B.1348/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Desember 2024
4.	Somu III	Kaimana	Papua Barat	B.1349/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Desember 2024
5.	Somu IV	Kaimana	Papua Barat	B.1350/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Desember 2024

Tabel 11. Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kota Tual Provinsi Maluku

No.	Nama Kelompok	Alamat		Keterangan BAST
		Kabupaten/Kota	Provinsi	
1.	Said Makmur	Tual	Maluku	B.1120/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 1 Desember 2024
2.	Talenta	Tual	Maluku	B.1121/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 1 Desember 2024
3.	Harmoko Jaya	Tual	Maluku	B.1122/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 1 Desember 2024
4.	Tunas Harapan	Tual	Maluku	B.1123/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 1 Desember 2024
5.	Jaya Bahari	Tual	Maluku	B.1124/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 1 Desember 2024

Tabel 12. Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara

No.	Nama Kelompok	Alamat		Keterangan BAST
		Kabupaten/Kota	Provinsi	
1.	Bina Bahari	Halmahera Selatan	Maluku Utara	B.1356/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Desember 2024
2.	Jaya Bakti	Halmahera Selatan	Maluku Utara	B.1357/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Desember 2024
3.	Sinar Mas	Halmahera Selatan	Maluku Utara	B.1358/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Desember 2024
4.	Pasir Panjang Tanjung	Halmahera Selatan	Maluku Utara	B.1359/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Desember 2024
5.	Mano Jaya III	Halmahera Selatan	Maluku Utara	B.1360/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Desember 2024

Tabel 13. Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara

No.	Nama Kelompok	Alamat		Keterangan BAST
		Kabupaten/Kota	Provinsi	
1.	Sejahtera	Halmahera Timur	Maluku Utara	B.1366/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Desember 2024
2.	Sarimalaha	Halmahera Timur	Maluku Utara	B.1367/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Desember 2024
3.	Sehati	Halmahera Timur	Maluku Utara	B.1368/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Desember 2024
4.	Makro Alga Fayaul	Halmahera Timur	Maluku Utara	B.1389/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Desember 2024

Tabel 14. Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Nama Kelompok	Alamat		Keterangan BAST
		Kabupaten/Kota	Provinsi	
1.	Bawak Waru	Lombok Timur	NTB	B.1984/BPBLA/PB.140/IX/2024 Tanggal 12 Desember 2024
2.	Laut Biru	Lombok Timur	NTB	B.1985/BPBLA/PB.140/IX/2024 Tanggal 12 Desember 2024

Tabel 15. Tabel 14. Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kota Tual Propinsi Maluku

No.	Nama Kelompok	Alamat		Keterangan
		Kabupaten /Kota	Provinsi	
1.	El Masaro	Tual	Maluku	B.2360/BPBLA/PL.140/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024
2.	Cahaya Laut	Tual	Maluku	B.2362/BPBLA/PL.140/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024
3.	Fair Maju	Tual	Maluku	B.2364/BPBLA/PL.140/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024
4.	Suka Maju	Tual	Maluku	B.2366/BPBLA/PL.140/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024
5.	Batas Kota Kiom Bawah	Tual	Maluku	B.2368/BPBLA/PL.140/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024

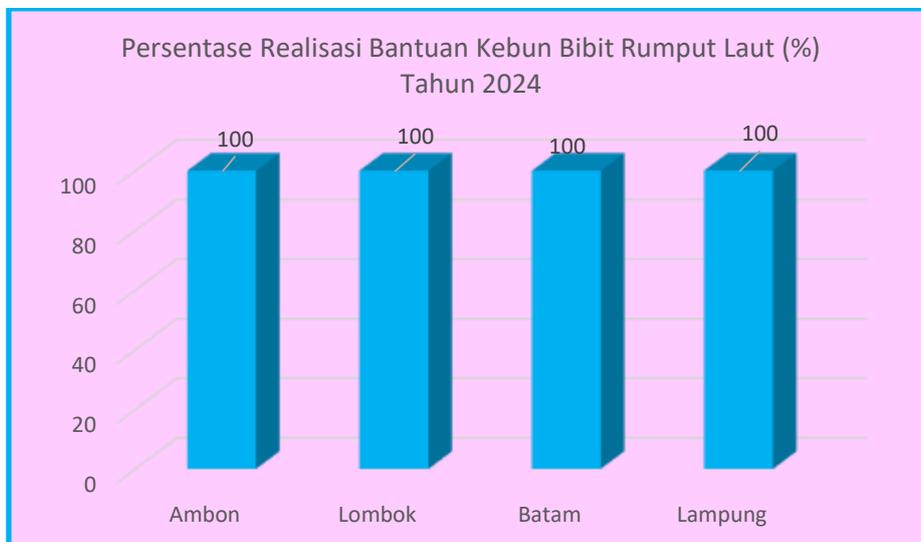
Tabel 16. Capaian IKU “Bantuan Sarana dan Prasarana Kebun Bibit Rumput Laut BPBL Ambon”.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)							
Realisasi				Tahun 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Realisasi 2024 terhadap 2023
100	100	100	120	75	100	120	100

Perbandingan capaian realisasi Tahun 2023 dan 2024 tidak mengalami perubahan. Kelancaran proses CPCL, identifikasi dan verifikasi kelompok serta pengadaan peralatan KBRL membuat capaian yang ditargetkan dapat terealisasi.



Gambar 4. Kegiatan penyerahan bantuan sarana KBRL



Grafik 6. Capaian IKU Bantuan KBRL Satker Laut

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian IKU bantuan kebun bibit rumput laut pada satker Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung 100%, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (100%), Lombok (100%) dan Batam (100%) pada tahun 2024, perhitungan pencapaian IKU ini dihitung secara semester, sesuai target yang tercantum dalam perjanjian kinerja. Adanya perbedaan tata kelola dan perencanaan (kegiatan lelang) yang didukung dengan lengkap atau tidaknya data administrasi usulan kelompok calon penerima bantuan KBRL dari setiap kabupaten kota yang menjadi sentra pengembangan rumput laut, menyebabkan proses ketercapaian IKU ini setiap satker laut akan berbeda.

Pada tahun 2024 secara nasional produksi rumput laut nasional ditargetkan sebesar 10,58 juta ton. Dalam mendukung nilai produksi tersebut Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon berusaha mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki terutama dalam proses penyediaan bibit kultur jaringan. BPBL Ambon dapat memproduksi bibit rumput laut berupa kalus 3.100 kalus, 9.903 individu mikropropagul, dan planlet sebanyak 5.701 individu atau 113,12%, secara berkelanjutan dan didistribusikan ke sentra sentra budidaya rumput laut di wilayah kerja.



Gambar 5. Bibit rumput laut kultur jaringan

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan produksi rumput laut antara lain melalui produksi bibit rumput laut kultur jaringan yang dikembangkan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon yang memiliki beberapa keunggulan seperti memiliki sifat yang sama seperti indukan, cepatnya

pertumbuhan thalus serta relative tahan terhadap penyakit, meningkatkan sarana budidaya rumput laut serta melakukan koordinasi dengan Dinas KP, Penyuluh Perikanan bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait potensi pengembangan budidaya rumput di wilayah kerja.

Rencana aksi untuk periode mendatang adalah meningkatkan sarana prasarana penunjang kegiatan laboratorium kultur jaringan rumput laut sehingga produksi planlet dapat ditingkatkan dengan cukup baik guna memenuhi kebutuhan bibit rumput laut kultur jaringan.

IKU 4 : Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)

Program bantuan calon induk ikan adalah salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bantuan tersebut merupakan program strategis sebagai langkah terobosan untuk memenuhi kebutuhan calon induk unggul yang dapat menghasilkan benih bermutu pada masyarakat pembudidaya ikan.

Tujuan bantuan calon induk ikan kepada unit pembenihan milik masyarakat (UPR/HSRT) untuk meremajakan induk yang ada di masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas induk sehingga dapat menghasilkan benih bermutu serta mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 20,06 juta ton. Menurut petunjuk teknis bantuan, Nomor 307/PER-DJPB/2023 spesifikasi teknis calon induk ikan laut adalah sebagai berikut : Kakap Putih dengan berat 300 gram.

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai bulan Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 6.018.400,- dari pagu anggaran senilai Rp.6.638.000 atau sebesar 90,67%..

Tabel 17. Capaian IKU “Persentase Bantuan Calon Induk Yang Tersalurkan Ke Masyarakat”

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator: Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)							
Realisasi				Tahun 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Realisasi 2024 terhadap 2023
-	100	-	120	100	150	120	100

IKU Bantuan Calon Induk Ikan Laut yang didistribusikan kepada masyarakat lingkup BPBL Ambon, merupakan IKU baru pada tahun 2024, dimana pada tahun 2023 BPBL Ambon belum memiliki IKU tersebut sehingga perhitungan perbandingan nilai dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan. Namun di Tahun 2022 IKU ini pernah ada sehingga dilakukan perbandingannya dan hasilnya tidak berubah dalam capaian yang ditargetkan.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan produksi dan penjaminan kualitas calon induk yang dihasilkan antara lain melalui penerapan *biosecurity* di lingkungan budidaya secara optimal, melakukan manajemen pemberian pakan yang tepat, pakan yang diberikan harus memiliki standar kualitas yang baik, terutama dalam kandungan nutrisi pakan yang terkandung didalamnya. Pakan diberikan secara tepat ukuran, jumlah, frekuensi pemberian sehingga berdampak pada peningkatan survival rate calon induk ikan, dan secara umum optimalkan implementasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di instalasi produksi budidaya.



Gambar 6. Calon induk Ikan kakap putih (*Lates calcarifer*)



Grafik 7. Capaian IKU Bantuan Calon Induk Laut Satker Laut

Capaian IKU Bantuan Calon Induk Ikan Laut yang didistribusikan kepada masyarakat di BPBL Ambon mencapai 150%, termasuk lebih besar bila dibandingkan dengan satker lain seperti BBPBL Lampung (120%), BPBL Batam (120.4%) dan BPBL Lombok (125%). Hal ini menunjukkan dalam pencapaian IKU ini, BPBL Ambon telah menjalankannya dengan perencanaan yang tepat dan dapat mengantisipasi kendala/ resiko yang mungkin terjadi di lapangan.

IKU 5 : Persentase Bantuan Benih Ikan Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)

Target jumlah bantuan benih yang harus disalurkan oleh BPBL Ambon tahun 2024 sebesar 538.000 ekor atau 100%. Dimana Perhitungan pencapaian target IKU bantuan benih dilakukan per semester dalam aplikasi kinerjaku, IKU ini dibagi menjadi 2 (dua) IKU Bantuan Benih Ikan Konsumsi dan Ikan Hias Laut. Pagu anggaran IKU Bantuan Benih Ikan Laut Rp. 3.060.345.000,- Target IKU bantuan benih ikan konsumsi pada tahun ini menjadi 538.000 Ekor. Secara rill progress capaian Bantuan Benih sampai dengan bulan Desember 2024 ini adalah sebesar 541.900 ekor atau 100,72% dari perencanaan target yang telah ditetapkan. Bantuan Benih yang disalurkan pada tahun 2024 terdiri atas benih ikan konsumsi yang didominasi benih ikan kakap putih.

Penggunaan anggaran dalam akhir proses pencapaian target IKU ini pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 3.060.126.793., atau sebesar 99,99% dari total pagu anggaran yang ditetapkan.

Tabel 18. Capaian IKU “Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon”.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)							
Realisasi				Tahun 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Realisasi 2024 terhadap 2023
101,24	104,08	106,91	118,30	75	100,72	100,72	85,14

Data Penerima Bantuan benih telah diproses penginputan dalam aplikasi Bantuan Pemerintah KKP, Realisasi Bantuan Benih pada tahun 2024 telah mencapai target yang telah direncanakan, hal ini disebabkan jumlah produksi benih cukup baik, untuk beberapa komoditas unggulan seperti kakap putih, kerapu dan bubara. Bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sedikit lebih rendah, namun realisasi kegiatan di 2024 tercapai 100,72%. Perbedaan realiasi di tahun 2023 dan 2024 disesuaikan dengan target tahunan yang telah ditetapkan.

Berikut adalah rincian Bantuan benih ikan laut pada tahun 2024, tersaji pada tabel 19 berikut:

Tabel 19. Rincian Bantuan Benih Ikan Laut

No.	Bantuan Benih Ikan	Jumlah Bantuan (Ekor)	Jenis Bantuan	Sebaran Lokasi Bantuan
1.	Bantuan Benih Ikan Konsumsi Laut	538.000 Ekor atau (100%)	Kakap Putih	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Ambon • Kabupaten Seram Bagian Barat • Kabupaten Maluku Tengah • Kabupaten Buru • Kabupaten Merauke • Kabupaten Pinrang • Kabupaten Bone • Kabupaten Kepulauan Sula



Grafik 8. Capaian IKU Bantuan Benih Ikan Laut Satker Laut

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian IKU bantuan benih ikan laut pada satker Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung dan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Lombok dan Batam pada tahun 2024, secara umum 4 satker laut telah melakukan proses pencapaian IKU. Perbedaan nilai realisasi bantuan benih ikan laut hal ini tentunya disebabkan perbedaan komoditas yang dikembangkan dan didistribusikan kepada masyarakat. Setiap Balai memiliki komoditas unggulan tertentu misalnya Lampung dengan cobia, Batam dengan bawal bintang, Lombok dengan kakap putih nya. Pencapaian tertinggi ada di BPBL Ambon yang diikuti oleh Batam, Lombok dan Lampung.

Secara khusus Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah menguasai teknologi budidaya kakap putih dan bubar (Kuwe). Perbedaan tata Kelola komoditas akan berpengaruh pada tinggi rendahnya nilai produksi benih ikan. Selain itu dalam realisasi bantuan benih juga dipengaruhi faktor non teknis seperti kelengkapan administrasi usulan permohonan bantuan dari pokdakan yang kurang lengkap atau jarak lokasi balai dan lokasi calon penerima bantuan yang terlalu jauh/akses transportasi sulit atau biaya operasional pengangkutan yang terlalu tinggi.

Pada proses produksi benih ikan konsumsi, Selain faktor lingkungan, adanya serangan pathogen juga menyebabkan masalah pada produksi benih. Pada benih

kakap putih dan bubara juga ditemukan infeksi *Trichodina*. *Trichodina* sp. merupakan ektoparasit pada ikan air tawar maupun ikan laut. Hampir semua spesies ikan dapat terserang *Trichodina* sp. (Durborow 2003). Inang yang paling sering terserang *Trichodina* sp. biasanya berasal dari famili Cyprinidae (Afifah et al. 2014). *Trichodina* sp. akan mudah menginfeksi ikan jika kepadatan penebaran tinggi dan tingkat pemberian pakan yang tinggi serta kualitas air yang rendah (Durborow 2003). Predileksi *Trichodina* sp. adalah permukaan tubuh, sirip dan insang (Afifah et al. 2014). Karakter morfologi, identifikasi *Trichodina* sp. meliputi ukuran diameter tubuh, diameter cincin dentikel, diameter adhesive disc, lebar membran dan karakter meristik yaitu jumlah dentikel (Dana et al. 2002; Anisah et al. 2016).

Zheila (2013), permukaan tubuh berhubungan langsung dengan lingkungan yang memudahkan serangan *Trichodina* sp., selain itu permukaan tubuh juga menjadi tempat hidup yang baik bagi ektoparasit (Zheila 2013). Menurut Pramono dan Syakuri (2008), *Trichodina* sp. menempel pada permukaan tubuh dan akan berputar 360o dengan menggunakan silia sehingga akan merusak sel-sel disekitar dan memakan sel RIWIDIHARSO et al. – *Trichodina* pada benih ikan nilem di Balai Benih Ikan Kutasari Purbalingga 323 epitel yang hancur hingga mengakibatkan iritasi pada permukaan tubuh. Tingginya kandungan bahan organik dalam kolam dapat menyebabkan tingginya jumlah patogen sehingga kulit akan mensekresi mucus yang berlebih sebagai antibodi untuk mendegradasi patogen. Hal ini menyebabkan kerusakan pada kulit sehingga lebih mudah terinfeksi ektoparasit. Serangan *Trichodina* sp. dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan hyperplasia pada permukaan tubuh dan insang (Afifah et al. 2014). Serangan parasit ini menyebabkan hyperplasia yang dapat menyebabkan gangguan osmotik, pernapasan bahkan menyebabkan kematian. Kondisi ini mengakibatkan terhalangnya aliran air menuju filamen insang sehingga dapat menyebabkan ikan stres dan sulit untuk bernapas (Afifah et al. 2014).

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan produksi dan penjaminan kualitas benih yang dihasilkan antara lain melalui penerapan *biosecurity* di lingkungan hatchery secara optimal, melakukan manajemen pemberian pakan benih yang tepat, pakan yang diberikan harus memiliki standar kualitas yang baik, terutama dalam kandungan nutrisi pakan yang

terkandung didalamnya. Pakan induk dan benih tepat secara ukuran, jumlah, frekuensi pemberian sehingga berdampak pada peningkatan survival rate induk dan benih, dan secara umum optimalkan implementasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) di instalasi produksi budidaya. Selain itu pengoptimalan pengelolaan kualitas air dengan menjaga perputaran media pemeliharaan menjadi bagian penting dalam penanganan penyakit ikan.

Rencana aksi dalam manajemen kesehatan ikan, khususnya penanganan infeksi *Trichodina* dapat dilakukan dengan perendaman ikan dengan menggunakan fumisid 5-10 ppm selama 30 menit dan diulang jika masih terjadi infeksi. Selain itu dilakukan penambahan vitamin C dalam pakan yang diberikan sampai ikan terlihat sehat, vitamin C secara umum dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh terhadap serangan penyakit.

Jumlah bantuan benih ikan laut pada 2023 sebanyak 188.300 ekor dan mengalami kenaikan signifikan di tahun 2024. Hal itu menunjukkan bahwa penguasaan teknologi budidaya terutama ikan ikan komoditas unggulan seperti kakap putih, bubara dan kerapu semakin baik sehingga produksi dapat ditingkatkan dan realisasi bantuan kepada masyarakat juga semakin merata di wilayah kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.



Gambar 7. Kegiatan penyaluran bantuan benih ikan

IKU 6 : Calon Induk Ikan Laut yang Diproduksi (Ekor)

Produksi calon induk ikan adalah salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bantuan tersebut merupakan program strategis sebagai langkah terobosan untuk memenuhi kebutuhan calon induk unggul yang dapat menghasilkan benih bermutu pada masyarakat pembudidaya ikan.

Tabel 20. Capaian IKU “ Produksi Calon Induk Ikan Laut yang diproduksi BPBL Ambon”

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Jumlah Calon Induk Ikan Laut yang diproduksi di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Ekor)							
Realisasi				Tahun 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Realisasi 2024 terhadap 2023
120	-	120	120	75	102.47	120	100

Pada tahun 2024, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon juga ditargetkan memproduksi induk/calon induk unggul sebanyak 4090 ekor. Sampai akhir tahun 2024 capaian produksi calon induk teralisasi 4.191 Ekor atau sebesar 102.47%. Produksi calon Komoditas induk yang diproduksi oleh BPBL Ambon meliputi jenis ikan konsumsi dan ikan hias. Produksi induk unggul ikan konsumsi yaitu kakap putih dan bubara. Sedangkan produksi induk unggul ikan hias yaitu ikan hias *clownfish* dengan berbagai varian.

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 1.088.876.760 dari pagu anggaran senilai Rp. 1.090.503.000 atau sebesar 99,85 %.

Berikut adalah rincian produksi calon induk yang dihasilkan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 21 berikut:

Tabel 21. Rincian Produksi Calon Induk Unggul

No.	Komoditas	Jumlah Komoditas
1.	Kakap Putih	3.560 ekor dengan bobot tubuh minimal 500 gr/ekor
2.	Clownfish	611 Ekor dengan ukuran minimal 4 cm.
3.	Kuwe,	20 ekor dengan bobot tubuh minimal 500 gr/ekor
4.	Kerapu	-



Grafik 9. Produksi Calon Induk Ikan Laut Satker Laut

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian IKU Produksi calon induk ikan pada satker Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Lombok dan Batam pada tahun 2024 berbeda beda, produksi calon induk ikan pada tahun 2024 tertinggi dihasilkan oleh BPBL Ambon dengan prosentase capaian sebesar 102.47% BPBL Batam sebesar 100%., BBPBL Lampung sebesar 103.28% dan BPBL Lombok 116.28%. Data tersebut menunjukkan setiap satker telah melaksanakan produksi calon induk berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya disebabkan perbedaan tata kelola budidaya yang diterapkan oleh setiap balai, misal dalam hal teknis penanganan komoditas, selain itu perbedaan jenis komoditas budidaya yang dikembangkan berpengaruh pada jumlah calin yang diproduksi karena setiap komoditas memiliki karakteristik

tersendiri seperti tingkat pertumbuhan, respon terhadap pakan hingga kemampuan beradaptasi dengan lingkungan perairan.



Gambar 8. Calon induk Ikan Kuwe (*Caranx sp*)

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan produksi calon induk antara lain melalui peningkatan jumlah produksi benih yang diseleksi secara ketat sehingga menghasilkan benih ikan unggul yang siap dibesarkan menjadi calon induk. Telah dilakukan Grading secara teratur guna menekan tingkat kanibalisme ikan selama proses pemeliharaan. Mengatur pola pakan yang tepat (mencukupi) dengan melakukan pemberian pakan dengan jenis pakan buatan (pabrikan) dan pakan segar (ikan rucah) yang relative lebih murah.

Rencana aksi untuk periode mendatang adalah meningkatkan sarana prasarana penunjang kegiatan produksi calon induk sehingga produksi dapat ditingkatkan dengan cukup baik guna memenuhi calon induk yang berkualitas, dan mampu menghasilkan benih ikan yang baik dalam segi kualitas maupun kuantitas.

Realisasi capaian produksi calon induk pada tahun 2023 sebanyak 2035 ekor dan tahun 2024 sebanyak 4.090 ekor. Hal ini disebabkan perubahan target pada setiap periode, sehingga capaian nya bervariasi namun secara keseluruhan, target produksi calon induk BPBL Ambon telah sesuai target yang telah ditetapkan.

IKU 7 : Persentase Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan (Persen)

Diseminasi teknologi merupakan suatu proses penyebaran teknologi kepada pengguna, sehingga teknologi yang dihasilkan memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian, diseminasi

teknologi tidak dapat dipisahkan dari penelitian dan pengkajian pertanian. Secara sederhana di lingkup kerja masing-masing, dapat dipertanyakan manfaat teknologi pertanian yang proses perakitannya telah menelan banyak biaya. Besar kecilnya manfaat tersebut tidak dapat dilepaskan dengan diseminasi paket teknologi.

Dalam suatu keadaan, suatu perubahan yang kecil dan sederhana dalam budidaya perikanan mungkin merupakan tindakan paling strategis dalam menghilangkan berbagai hambatan serta dalam meletakkan landasan bagi pembangunan. Suatu diseminasi teknologi perikanan budidaya dilakukan secara bertahap, maka jumlah teknologi yang didiseminasikan harus terbatas. Kalau jumlah teknologi terbatas, pembudidaya dapat memilih teknologi yang mampu menggabungkan antara kesederhanaan dan risiko yang rendah dengan tambahan produksi yang cukup berarti. Dengan cara demikian akan dicapai tingkat keberhasilan kegiatan diseminasi yang tinggi dan secara otomatis akan memperoleh kepercayaan masyarakat.

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini terealisasi sebesar Rp. 399.998.560 dari pagu anggaran senilai Rp. 400.000.000, atau sebesar 100%. Target IKU layanan diseminasi pada tahun 2024 adalah 110% yang terbagi menjadi 4 kali kegiatan.

Berikut adalah rekapan kegiatan layanan diseminasi teknologi perikanan budidaya pada tahun 2024 :

Tabel 22. Kegiatan Diseminasi Teknologi Budidaya tahun 2024

NO	JUDUL KEGIATAN DISEMINASI	ANGGOTA KOMISI IV DPR RI	PELAKSANAAN KEGIATAN
1	Bimbingan Teknis Budidaya Ikan Laut di Kabupaten Buru Provinsi Maluku	Saadiah Uluputty, S.T	Telah dilaksanakan dengan 120 Orang peserta
2	Bimbingan Teknis Budidaya Ikan di Kota Ambon Provinsi Maluku	Abdullah Tuasikal, M.Si	Telah dilaksanakan dengan 120 Orang peserta
3	Bimbingan Teknis Budidaya Ikan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua	H. Solaeman L. Hamzah	Telah dilaksanakan dengan 100 Orang peserta
4	Bimbingan Teknis Budidaya Ikan Laut di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara	Allien Mus, S.H	Telah dilaksanakan dengan 100 Orang peserta

Tabel 23. Capaian IKU “Layanan Diseminasi Teknologi Perikanan Budidaya Bidang Pembesaran Ikan (Unit)”.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan (Persen)							
Realisasi				Tahun 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Realisasi 2024 terhadap 2023
-	-	100	100	100	110	110	110

Capaian kegiatan Tahun 2023 dan 2024 memberikan hasil yang sedikit berbeda, dimanan Tahun 2024 terjadi peningkatan peserta Bimtek akibat yang berdampak pada kenaikan realiasi yang ditargetkan. Rencana tindak lanjut yang telah dilakukan dalam upaya layanan Diseminasi Teknologi Perikanan Budidaya antara lain melalui koordinasi intensif dengan TA Anggota Komisi IV DPR RI di wilayah kerja terkait pelaksanaan kegiatan bimtek bagi pembudidaya di wilayah konstituen, sehingga proses diseminasi infomasi teknologi budidaya dapat tersampaikan secara efektif.



Grafik 10. Capaian IKU Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan



Gambar 9. Kegiatan Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan

IKU 8 : Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Laut yang Dimanfaatkan (Persen)

Perikanan Budidaya saat ini menjadi tumpuan penting dalam menopang pembangunan perikanan nasional seiring dengan meningkatnya fenomena kenaikan kebutuhan pangan masyarakat yang aman dikonsumsi serta upaya dalam peningkatan gizi masyarakat. Usaha budidaya nila memiliki prospek yang menjanjikan, komoditas ini mudah untuk dibudidayakan dan termasuk komoditas yang diminati oleh pasar.

Melalui penerapan teknologi adaptif, aplikatif efektif dan efisien maka penerapan system budidaya dengan bioflok dinilai mampu untuk meningkatkan produksi ikan. Pada tahun 2024 Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon kembali mendapat tugas untuk mendistribusikan bantuan sarana produksi ikan sistem bioflok sebanyak 48 paket yang tersebar di beberapa provinsi di wilayah kerja.

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini terealisasi sebesar Rp. 9.484.190.000 dari pagu anggaran senilai Rp. 9.591.430.000 atau sebesar 98,88%. Target IKU bantuan sarana bioflok pada tahun 2024 terealisasi 100% dan sampai akhir tahun 2024 kegiatan yang dilakukan antara lain kegiatan identifikasi, verifikasi calon penerima, pemasangan sarana budidaya air tawar dan

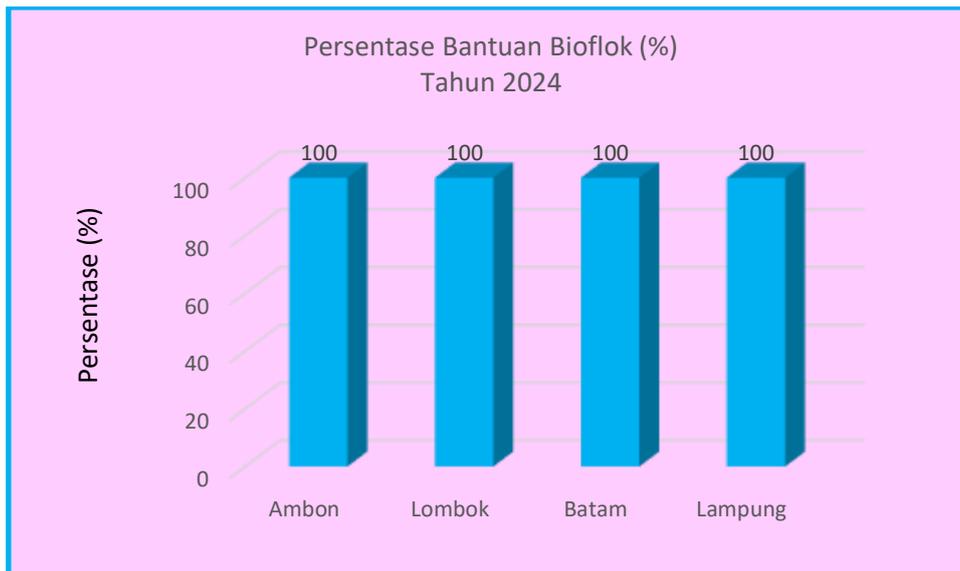
monitoring kegiatan budidaya pada penerima bantuan telah dilakukan di beberapa provinsi.

Tabel 24. Capaian IKU “Bantuan Sarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok BPBL Ambon”.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang disalurkan ke masyarakat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)							
Realisasi				Tahun 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Realisasi 2024 terhadap 2023
100	100	100	100	75	100	120	120

Perbandingan capaian realisasi Tahun 2023 dan 2024 tidak mengalami perubahan. Kelancaran proses CPCL, identifikasi dan verifikasi kelompok serta pengadaan peralatan sarana bioflok membuat capaian yang ditargetkan dapat terealisasi.

Pengukuran IKU ini dilakukan pada akhir tahun. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini antara lain lamanya rekomendasi Usulan Calon Penerima Calon Lokasi dari anggota dewan DPR RI Komisi IV yang dapilnya berada di wilayah kerja BPBL Ambon. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya percepatan realisasi bantuan sarana budidaya ikan system bioflok antara lain melalui koordinasi intensif dengan pihak anggota dewan, pihak dinas dan pihak ketiga (kontraktor) dalam hal percepatan pelaksanaan pekerjaan di lokasi penerima bantuan. pekerjaan fisik, penyediaan sarana pendukung budidaya dikoordinasikan dengan baik sehingga barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi barang yang telah ditentukan.



Grafik 11. Capaian IKU Bantuan Bioflok

IKU 9 : Persentase Bantuan Benih Ikan Hias Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)

Target jumlah bantuan benih yang harus disalurkan oleh BPBL Ambon tahun 2024 sebesar 538.000 ekor. Yang terbagi menjadi 2 IKU Bantuan Benih Ikan Konsumsi dan Ikan Hias Laut. Target IKU bantuan benih ikan hias laut pada tahun ini sebanyak 3.000 Ekor. Capaian Bantuan benih ikan hias laut ini pada tahun 2024 adalah sebanyak 7.800 ekor atau 260 % dari target yang telah ditetapkan, namun perhitungan pencapaian IKU dilakukan setiap semester sesuai dengan aplikasi kinerja. Bantuan Benih yang disalurkan pada tahun 2024 terdiri atas benih ikan hias yang didominasi benih ikan clownfish.

Tabel 25. Capaian IKU “Bantuan Benih Ikan Hias Laut BPBL Ambon”.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase bantuan benih ikan hias laut yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)							
Realisasi				Tahun 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Realisasi 2024 terhadap 2023
-	-	115,5	106	75	260	120	112,50

Perbandingan bantuan benih ikan hias Tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan, ini disebabkan di tahun 2024 varian produksi ikan hias sudah

mencapai 50 varian dengan produksi yang stabil sehingga bisa dibantukan kemasyarakat ataupun di restocking dengan jumlah yang banyak.

Dalam proses pencapaian target IKU bantuan benih ikan hias laut, dukungan anggaran tidak dialokasikan secara khusus namun pada pelaksanaannya digabungkan dengan kegiatan bantuan benih ikan laut yang didistribusikan ke masyarakat di wilayah kerja. Penggunaan anggaran dalam akhir proses pencapaian target IKU bantuan benih ikan laut ini pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 3.060.126.793, atau sebesar 99,99% dari total pagu anggaran yang ditetapkan

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya pencapaian target IKU bantuan ikan hias laut adalah menambah koleksi indukan berbagai varian yang diseleksi secara ketat sehingga menghasilkan benih ikan hias unggul yang siap dibantukan kepada masyarakat, maupun sebagai salah satu sumber perolehan PNBPN bidang produksi.

Rencana aksi dalam upaya mempercepat capaian kinerja adalah dengan meningkatkan sarana produksi benih ikan hias, sehingga volume kegiatan pembenihan dapat ditingkatkan dan produksi benih ikan hias akan mencukupi dalam memenuhi kegiatan bantuan maupun restocking di perairan.



Grafik 12. Capaian IKU Bantuan Benih Ikan Hias Laut

Untuk bantuan benih ikan hias laut, hanya BPBL Ambon dan BLBL Lombok yang ada IKU ini. Realisasi BPBL Ambon mencapai 260% dari capaian target, lebih tinggi dari

BPBL Lombok. Tingginya capaian ini karena kesuksesan BPBL Ambon dalam memproduksi benih ikan hias laut clownfish yang mencapai 50 varian.



Gambar 10. Bantuan Benih Ikan Hias Laut 2024

IKU 10 : Prasarana Perbenihan yang Direhabilitasi (Unit)

Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok pembudidaya ikan serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah melalui bantuan prioritas yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Pembangunan sarana dan prasarana, yang menjadi kesatuan dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan mendukung daya saing nasional secara global.

Pada tahun 2024, terdapat IKU yang mewadahi kegiatan rehabilitasi fasilitas produksi yang dilaksanakan di BPBL Ambon. Upaya peningkatan sarana dan prasarana produksi di BPBL Ambon memiliki tujuan mendukung naiknya nilai produksi komoditas budidaya, diharapkan dengan peningkatan produksi, distribusi penyaluran bantuan prioritas dari BPBL Ambon kepada kelompok pembudidaya ikan di wilayah kerja dapat terealisasi dengan baik.

Tabel 26. Capaian IKU “Prasarana Produksi yang direhabilitasi BPBL Ambon”.

Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Prasarana produksi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang direhabilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)							
Realisasi (%)				Tahun 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Realisasi 2024 terhadap 2023
-	100	100	100	1 unit	1 unit	100	100

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU sarana UPT yang direhabilitasi ini sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 1.088.876.760 dari pagu anggaran senilai Rp. 1.008.500.000, atau sebesar 99,85 %. Secara umum kegiatan rehabilitasi UPT di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun ini adalah renovasi Gedung ikan hias dengan nilai Rp. 199.844.000 yang telah selesai pekerjaannya pada bulan Mei, dan untuk pemenuhan kebutuhan sarana produksi pada bulan Desember dikarenakan sebagian anggaran bersumber dana PNPB.

Belum ditemukan adanya permasalahan dalam proses pencapaian IKU ini karena semua tahapan pekerjaan dilakukan sesuai dengan perencanaan dan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak paket pekerjaannya.

Rencana aksi untuk kegiatan IKU sejenis adalah melakukan identifikasi kebutuhan rehabilitasi sarana produksi lainnya yang dibutuhkan sehingga target yang diinginkan dapat tepat sasaran dan mampu mendukung kegiatan produksi dengan baik.

SASARAN KEGIATAN III : MENINGKATNYA KUALITAS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA BIDANG KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN DI WILAYAH KERJA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

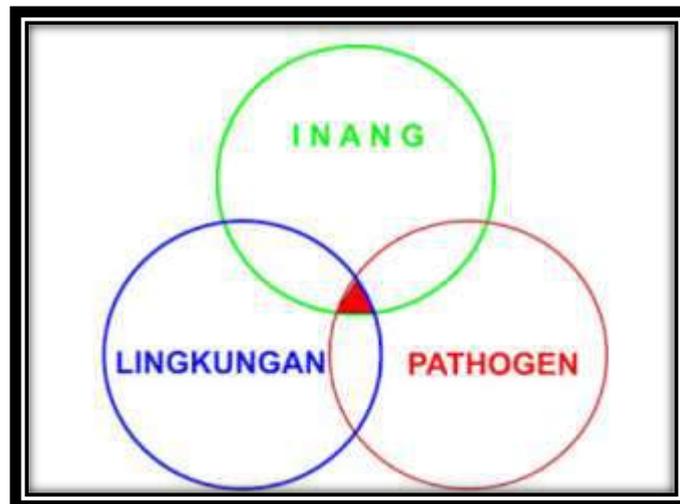
IKU 11 : Persentase sampel kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)

Salah satu faktor penyebab gagalnya usaha budidaya ikan adalah terjadinya kejadian penyakit pada ikan budidaya, penyakit ikan dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar dengan mortalitas tinggi. Penyakit ikan adalah segala bentuk

penyimpangan yang dapat menyebabkan ikan merasa terganggu kehidupannya. Atau dapat diartikan sebagai suatu keadaan fisik, kimia, biologis, morfologi dan atau fungsi yang mengalami perubahan dari kondisi normal yang disebabkan factor internal atau eksternal.

Penyebab penyakit dapat berasal dari dalam tubuh ikan maupun luar. Faktor internal antara lain akibat keturunan (genetic), seksresi internal, imunodefisiensi, kelainan saraf atau gangguan metabolik. Sedangkan faktor eksternal antara lain: serangan pathogen, hama, lingkungan atau malnutrisi.

Upaya pengendalian hama dan penyakit ikan yang biasa dilakukan oleh pembudidaya adalah upaya preventif dan kuratif. Upaya preventif adalah tindakan yang sebaiknya dilakukan pembudidaya untuk mengatasi serangan penyakit. Upaya kuratif atau pengobatan adalah upaya yang dilakukan pembudidaya untuk mengatasi penyakit ikan dengan menggunakan obat baik yang bersifat alami maupun sintetis. Pengobatan diberikan berdasarkan jenis penyakit, pathogen dan dosis tertentu.



Gambar 11. Diagram Kejadian Penyakit Ikan

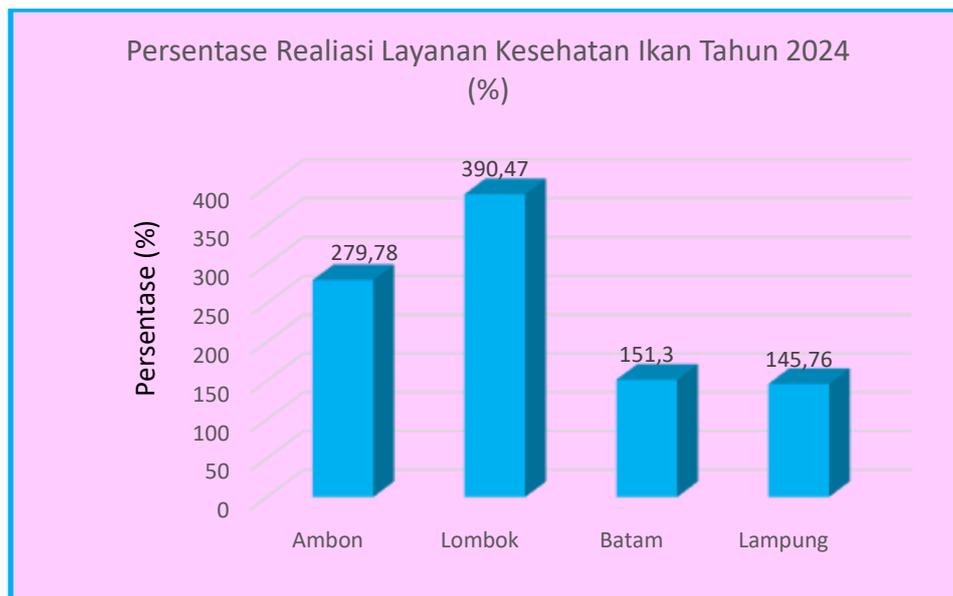
Hingga akhir tahun 2024, capaian kinerja pada IKU pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan mampu melebihi target yang ditetapkan. Capaian realisasi terhadap jumlah sampel yang di uji pada laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan BPBL Ambon mencapai 2.241 sampel atau 279,78% dari total target sampel uji di tahun 2024.

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai dengan akhir tahun 2024 Anggaran pengujian sampel dengan pagu Anggaran pengujian sampel dengan pagu Rp. 244.778.000.000 dan terealisasi Rp. 244.749.000 (99,99%).

Tabel 27. Capaian IKU “Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (Persen)”.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (Persen)							
Realisasi (%)				Tahun 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Realisasi 2024 terhadap 2023
120	120	120	120	100	279,78	120	100

Perbandingan capaian realisasi antara 2023 dengan 2024 mengalami peningkatan. Ini karena permintaan layanan pengujian sampel ikan dan kualitas air meningkat bukan hanya dari internal tapi juga dari eksternal Balai dalam hal ini Pembudidaya dan Mahasiswa .



Grafik 13. Capaian IKU Pengujian Sampel Laboratorium Satker Laut

Perbandingan 4 UPT laut dalam hal pelayanan pengujian sampel bervariasi, dimana BPBL Lombok mempunyai capaian yang tertinggi kemudian BPBL Ambon, Batam dan BPBL Lampung. Tingginya hasil BPBL Ambon diduga karena adanya serangan penyakit dan ini ditunjukkan dari Hasil identifikasi menunjukkan terjadi

kejadian serangan penyakit yang disebabkan oleh parasit, bakteri dan virus pada beberapa komoditas yang dibudidayakan seperti ikan Bubar, Kakap putih dan Kerapu Cantang. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan ikan terinfeksi parasite *Trichodina*.

Trichodina berperan besar dalam penurunan kekebalan tubuh ikan. Trichodiniasis akan menunjukkan gejala klinis seperti berenang abnormal, frekuensi pernapasan meningkat, melanosis, pertumbuhan menurun. Kematian terjadi karena ikan memproduksi lendir secara berlebihan dan akhirnya kelelahan. Kematian biasanya terjadi akibat terganggunya sistem pertukaran oksigen karena dinding lamella insang tertutup oleh lendir.

Pengendalian serangan *Trichodina* dilakukan dengan mempertahankan kualitas air dan suhu berada pada kisaran 29°C. Meningkatkan Frekuensi pergantian air untuk mengurangi kandungan bahan organik sehingga kualitas media budidaya dapat dipertahankan tetap dalam kondisi baik.

Vibriosis merupakan penyakit yang potensial menyerang ikan laut baik ikan budidaya maupun ikan liar. Dalam keadaan normal bakteri vibriosis spp merupakan microflora yang hidup pada usus ikan air laut. Kematian yang diakibatkan mencapai 50% terutama jika menginfeksi ikan stadia muda. Gejala klinis menunjukkan ikan anorexia, warna tubuh menjadi lebih gelap, warna insang menjadi pucat. Pada infeksi akut bagian pectoral membengkak luka pada kulit dan bernanah. Penanggulangan infeksi ini dapat dilakukan dengan vaksinasi ikan untuk menambah ketahanan tubuh terhadap serangan infeksi ini.



Gambar 12. Pemeriksaan Sampel Laboratorium Keskanling BPBL Ambon

Rencana aksi dalam upaya pencapaian target pengujian sampel adalah meningkatkan sarana pelayanan pengujian serta melakukan kunjungan langsung ke kawasan budidaya yang teridentifikasi terjadi adanya kejadian penyakit ikan, sehingga sampel yang diperoleh dapat diujikan dan dijadikan informasi yang memadai bagi penanggulangan HPI di suatu kawasan budidaya perikanan. Pengujian sampel ini bersifat eksternal dan internal sehingga dalam proses pencapaian IKU dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan.

IKU 12 : Persentase sampel Surveillance Resistensi Antimikroba yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)

AMR adalah kondisi ketika mikroorganisme seperti bakteri, virus, fungi dan parasit menjadi resisten atau kebal terhadap antimikroba (antibiotik, antivirus, antifungal, antiparasit) yang sebelumnya efektif untuk mencegah atau membunuh mikroorganisme tersebut.

Intermediet adalah suatu keadaan dimana terjadi pergeseran dari keadaan sensitif ke keadaan yang resisten tetapi tidak resisten sepenuhnya. Sedangkan resisten adalah suatu keadaan dimana mikroba sudah peka atau sudah kebal terhadap antibiotik.

Antibiotik bekerja secara sitostatik atau sitotoksik untuk menghilangkan mikroorganisme. Antibiotik mempunyai mekanisme kerja menghambat proses sintesis protein sel bakteri, asam deoksiribonukleat/DNA dan ribonukleat asam/RNA (Zaman et al., 2023). Antibiotik bersifat toksik secara selektif pada bakteri, namun tidak toksik pada sel inang (host). Antibiotik pada peternakan digunakan dengan tujuan: sebagai pengobatan, metaphylactic, prophylactic dan pemacu pertumbuhan (Noor dan Poeloengan, 2004). Pelarangan penggunaan antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan dikompensasi dengan meningkatnya penggunaan sebagai metaphylactic dan prophylactic (Woolhouse et al., 2015). Dosis yang diserap atau dimetabolisme oleh individu hewan atau orang, berkisar 10- 80%, dengan sisanya diekskresikan sebagai senyawa aktif melalui urin dan kotoran ke lingkungan yang dapat mengandung mikroorganisme resisten dan gen resistensi antimikrob (FAO 2018). Resistensi adalah kemampuan bakteri untuk beradaptasi

terhadap paparan antibiotik (Spellberg et al., 2013). Sifat ini merupakan suatu mekanisme alamiah untuk bertahan hidup. Penyebab utama kejadian resistensi adalah karena penggunaan antibiotik yang tidak bijak pada manusia dan hewan. Dampak dari resistensi antibiotik adalah upaya pengobatan menjadi lebih sulit dan membutuhkan biaya kesehatan yang lebih tinggi (Noor dan Poeloengan, 2004). Penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tidak terkendali merupakan sebab utama penyebaran resistensi antibiotik secara global, sehingga terjadi bakteri yang multiresisten terhadap sekelompok antibiotic.

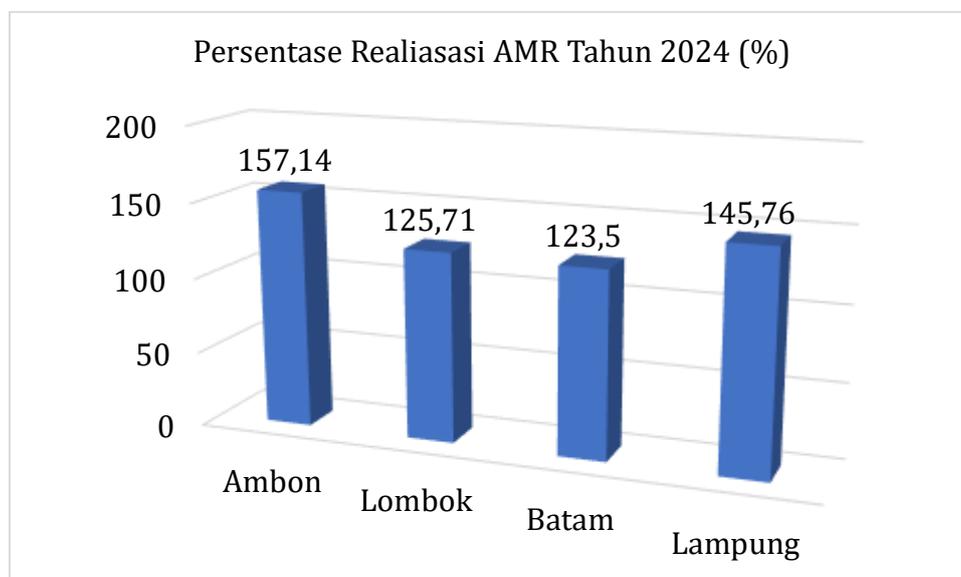
Infeksi oleh bakteri yang telah resisten mengakibatkan pengobatan menjadi tidak efektif sehingga infeksi terus berlanjut dan meningkatkan risiko penyebaran infeksi ke orang lain (WHO 2016). Gen resisten dapat diwariskan atau dapat diperoleh dari unsur genetik seluler seperti plasmid yang dapat terjadi antar bakteri (Read dan Woods, 2014). Konsentrasi antibiotik dosis rendah (subterapeutik) dapat meningkatkan perkembangan resistensi antibiotik dengan memicu perubahan genetik (Ventola 2015). Isolat dari sampel ikan kemudian dilanjutkan dengan pengujian antimicrobial susceptibility testing (AST) yang bertujuan untuk menguji kepekaan antibiotik.

Tabel 28. Capaian IKU “Persentase sampel Surveillance Resistensi Antimikroba yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon”.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase sampel Surveillance Resistensi Antimikroba yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)							
Realisasi				Tahun 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Realisasi 2024 terhadap 2023
-	-	-	120	100	157.14	120	100

Hingga akhir tahun 2024, capaian kinerja pada IKU pengujian sampel AMR melebihi target yang ditetapkan. Capaian realisasi terhadap jumlah sampel yang di uji pada laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan BPBL Ambon sudah mencapai 55 sampel atau 157,14% dari total target sampel uji di tahun 2024.

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai dengan akhir tahun 2024 Anggaran pengujian sampel dengan pagu Rp. 31.075.000 dan terealisasi pada tahun 2024 sebesar 31.075.000 atau 100%.



Grafik 14. Capaian IKU Pengujian Sampel AMR Satker Laut

Realisasi AMR tiap UPT hampir sama dengan Uji AMR tertinggi ada pada BBPBL Lampung. Secara umum ini berbanding dengan banyaknya kegiatan budidaya yang menggunakan bahan-bahan antibiotik pada komoditas budidaya.

Rencana aksi dalam upaya pencapaian target pengujian sampel AMR adalah meningkatkan sarana pelayanan pengujian serta melakukan kunjungan langsung ke kawasan kawasan budidaya yang teridentifikasi terjadi adanya kejadian penyakit ikan, sehingga sampel yang diperoleh dapat diujikan dan dijadikan informasi yang memadai bagi penanggulangan HPI di suatu kawasan budidaya perikanan.

SASARAN KEGIATAN IV : TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

IKU 13 : Indeks Profesionalitas ASN di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan perikanan budidaya, salah satu pendorong utamanya adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan professional. Di samping itu, SDM juga merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Reformasi

Birokrasi, yaitu bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas, kompeten, serta memiliki daya saing tinggi dalam era globalisasi. Oleh sebab itu, salah satu sasaran strategis yang ditetapkan oleh Ditjen Perikanan Budidaya adalah tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budidaya yang kompeten dan profesional.

SDM yang berintegritas dan berkompotensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap (*attitude*) dan kapasitas (*skill*) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan SDM yang memiliki komitmen yang tercermin pada integritasnya. Pengangkatan seorang pegawai di dalam jabatan struktural diharapkan sesuai dengan kompetensinya sehingga prinsip *the right man and the right place* dapat terpenuhi.

Hal ini dapat dicapai apabila pengangkatan dalam jabatan struktural berpedoman pada Standar Kompetensi Manajerial (SKM), dimana SKM menggambarkan jenis dan level kompetensi yang diperlukan bagi suatu jabatan, sehingga pelaksanaan tugas suatu jabatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sementara itu indeks kompetensi dan integritas merupakan angka yang menunjukkan agregasi dari indeks kompetensi (membandingkan kompetensi hasil rekomendasi penilaian kompetensi/*assessment* dari asesor dengan jenis standar kompetensi yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/KEPMEN-SJ/2014), persentase capaian output SKP, persentase tingkat kehadiran dan kepatuhan pejabat terhadap LHKPN/LHKASN, serta data tambahan berupa persentase pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan nilai *Human Capital Development Plan* (HCDP).

Tabel 29. Capaian IKM “Indeks Profesionalitas ASN BPBL Ambon”.

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Indeks Profesionalitas ASN di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)							
Realisasi				Tahun 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Realisasi 2024 terhadap 2023
79,89	83,26	84,30	91,34	85,00	88,32	103,91	100

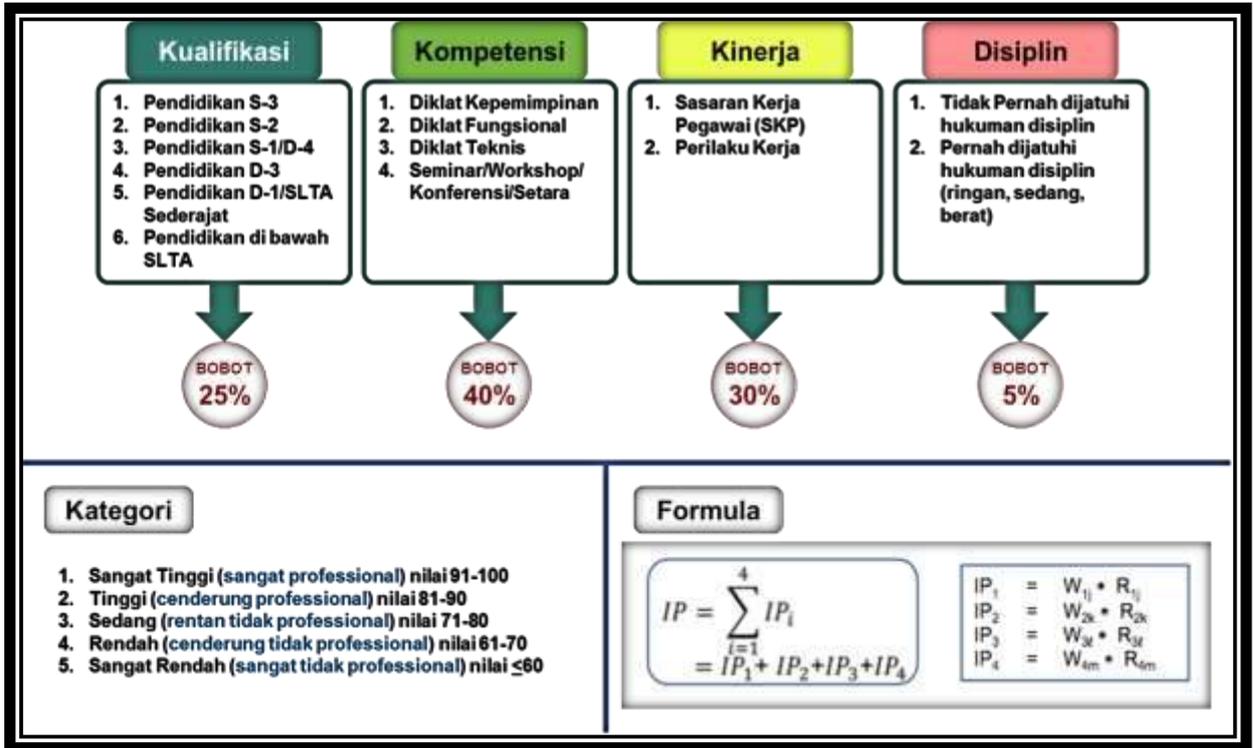
Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN.

Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
2. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis);
3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau melanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

Bimbingan Teknis memiliki pengertian sebagai sebuah layanan bimbingan dan penyuluhan yang diberikan oleh tenaga ahli atau profesional dibidangnya dengan tujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Seiring dengan jaman yang terus berkembang, Bimbingan Teknis atau Bimtek memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Beberapa tujuan dari Bimbingan Teknis Secara Umum, meliputi Peningkatan kualitas Sumber Daya manusia, Koordinasi yang lebih baik, Peningkatan kinerja institusi dan organisasi untuk menunjang keberhasilan suatu institusi, Memiliki kompetensi untuk secara optimal melaksanakan tugas jabatan yang diduduki dan Memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.



Gambar 13. Kriteria Penilaian Indeks Profesionalitas ASN



Gambar 14. Sertifikat Kegiatan dalam penilaian Indeks Profesionalitas ASN

Dalam proses pencapaian target IKU IP ASN, dukungan anggaran tidak dialokasikan secara khusus, karena pada saat ini peningkatan IP ASN dapat dilakukan secara daring seperti Bimtek, Seminar maupun Workshop melalui zoom meeting. Perhitungan IKU IP ASN ini dilakukan setiap semester.

Indeks Profesionalitas ASN Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon 2024 pada akhir tahun 2024 mencapai 88,32 (Kategori tinggi) hal ini didukung dengan terpenuhinya data dukung dari 4 kategori yakni kualifikasi Pendidikan, kompetensi mencakup kegiatan diklat, seminar, bimbingan teknis maupun workshop yang diikuti oleh pegawai, kinerja mencakup terpenuhinya target dalam sasaran kinerja pegawai dan penilaian perilaku serta tingkat kedisiplinan pegawai. Berdasarkan data Surat Dinas Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor B.262/DJPB.1/KP.720/I/2025 tanggal 13 Januari terkait Capaian IKU IP ASN tahun 2024 lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya, komposisi nilai IP ASN BPBL Ambon adalah sebagai berikut, Kualifikasi senilai 20,96; Kompetensi senilai 36,68; Kinerja senilai 25,69; dan Disiplin senilai 5. Dibandingkan pencapaian IP ASN di beberapa satker yang relative sama antara lain Balai Perikanan Budidaya Laut Batam sebesar 7,62 (Kategori tinggi) Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok 85,92 (Kategori tinggi) Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung 8,48 (Kategori tinggi) pada periode yang sama.

Salah satu faktor tingginya perolehan IP ASN BPBL Ambon antara lain, kualifikasi atau jenjang pendidikan pegawai yang relatif sudah berada pada jenjang master, sarjana dan beberapa di jenjang Diploma dan SMA, tentunya hal tersebut mempengaruhi nilai persentase yang diperoleh. Di tahun ini ada beberapa pegawai yang melaksanakan tugas belajar maupun tugas belajar untuk meningkatkan jenjang pendidikannya. Keaktifan pegawai mengikuti seminar, workshop atau bimbingan teknis baik yang berkaitan dengan fungsional maupun umum serta secara rutin menginput bukti keikutsertaan kegiatan dalam aplikasi E-Pegawai. Pelaksanaan Diklat yang terbatas tidak menjadi hambatan dalam pengembangan kompetensi pegawai, namun hal tersebut dijadikan sebuah inputan dalam proses perencanaan kedepan dalam menyusun daftar pengembangan kompetensi SDM BPBL Ambon (Kebutuhan Diklat), sehingga setiap pegawai dapat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pengembangan kompetensi tentunya

dengan persyaratan yang berlaku dalam pelaksanaannya. Selain itu inisiatif dalam melaksanakan inhouse training dengan mendatangkan narasumber dari luar juga menjadi solusi peningkatan nilai kompetensi pegawai BPBL Ambon.

Perolehan nilai SKP dan perilaku BPBL Ambon juga menunjukkan hasil yang baik, bahkan beberapa pegawai menunjukkan hasil sangat baik, hal ini tentunya dipengaruhi pencapaian realisasi kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan. Tingkat kedisiplinan pegawai juga menunjukkan hasil yang baik dimana hasil presensi (kehadiran pegawai) serta tidak adanya pegawai yang mendapat hukuman disiplin pada periode ini.

Belum ditemukan permasalahan dalam proses pencapaian IKU ini, karena kegiatan peningkatan kompetensi pegawai saat ini bisa dipenuhi dari kegiatan kegiatan bimtek dan sejenisnya secara daring.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai disesuaikan dengan tugas dan jabatannya sehingga indeks profesionalitas dapat ditingkatkan.

IKU 14 : Hasil Penilaian Konsensus ZI di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business prosess*) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan langkah pertama dalam mewujudkan suatu system pemerintahan atau organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan reformasi birokrasi ini tidak lain adalah peningkatan kualitas pelayanan masyarakat secara tepat, cepat dan efisien, namun pada saat pelaksanaannya sering ditemukan beberapa kendala seperti penyalahgunaan wewenang, adanya indikasi KKN dan masih lemahnya fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Grand design reformasi birokrasi tertuang pada Peraturan Presiden No 81 tahun 2010 yang menjelaskan tiga sasaran utama yakni peningkatan kapasitas, akuntabilitas organisasi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN.

Untuk membantu mewujudkan tiga sasaran tersebut maka diperlukan suatu project kongkret melalui pembangunan zona integritas di setiap instansi.

Zona Integritas menurut Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan public. Sedangkan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) adalah predikat yang diberikan pada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system managemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) adalah predikat yang diberikan pada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system managemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas layanan publik.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang berintegritas, khususnya di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, dapat terwujud apabila seluruh pimpinan dan pegawai mempunyai komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien.

Tabel 30. Capaian IKM “Hasil Penilaian Konsensus ZI di BPBL Ambon”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Indeks Profesionalitas ASN di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)							
Realisasi				Tahun 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Realisasi 2024 terhadap 2023
83,20	81,34	81,34	79,78	76	79,78	104,97	100

Pencapaian target ini telah dicapai pada tahun 2021, dimana BPBL Ambon telah mendapat predikat unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai perolehan 83,14. Pada tahun 2024 akan dilakukan assessment penilaian ulang dari kegiatan zona integritas di BPBL Ambon. Progress kegiatan dalam mempertahankan predikat tersebut adalah:

- Pendokumentasian kegiatan perencanaan
- Pendokumentasian kegiatan akuntabilitas kinerja
- Pendokumentasian manajemen SDM
- Pendokumentasian sistem pengawasan
- Pendokumentasian kegiatan pelayanan publik

Belum ditemukan permasalahan dalam proses pencapaian IKU ini, karena kegiatan penilaian WBK saat ini bisa dipenuhi dari kegiatan pemenuhan dokumen pengungkit dan unsur persepsi masyarakat yang menjadi stakeholder Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan kegiatan zona integritas dimana pemenuhan dokumen di 6 unsur penguatan serta persepsi anti korupsi dapat diperoleh dengan baik.

IKU ini merupakan IKU baru sehingga capaian keberhasilan IKU nya belum dapat dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2017.

IKU 15 : Persentase penyelesaian LHP BPK atas satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)

Menurut pasal 16 UU No. 15/2004, muatan yang termasuk dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sendiri adalah sebagai berikut:

- (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.
- (4) Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan

Tabel 31. Capaian IKM “Persentase penyelesaian LHP BPK atas satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase penyelesaian LHP BPK atas satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)							
Realisasi				Tahun 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Realisasi 2024 terhadap 2023
100	100	100	100	100	100	100	100

Dalam proses pencapaian IKU ini belum ada anggaran khusus yang digunakan. Pencapaian IKU ini biasanya dilakukan pada akhir tahun berjalan. Tindak lanjut pelaksanaan IKU ini adalah dengan berupaya melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta menindaklanjuti segala temuan pemeriksaan dengan data dukung yang memadai.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan kegiatan dimana pemenuhan dokumen kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat disusun dengan baik.

IKU 16 : Nilai Rekon SAKIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)

AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Yang melatar belakangi penyusunan AKIP adalah dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Tabel 32. Capaian IKM “Nilai Rekon SAKIP lingkup BPBL Ambon”.

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Nilai Rekon SAKIP lingkup BPBL Ambon (Nilai)							
Realisasi				Tahun 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Realisasi 2024 terhadap 2023
84,59	96,74	97,07	72,95	82	82,8	100,98	113,5

Progress pencapaian IKU ini pada tahun 2024 mencakup:

1. Laporan Kinerja Triwulanan
2. Rencana Aksi Triwulanan

3. Laporan Evaluasi Rencana Aksi Triwulanan
4. Rincian Target IKU tahun 2024
5. Perjanjian Kinerja tahun 2024
6. Renja
7. Manual IKU

Dalam proses pencapaian IKU ini belum ada penggunaan anggaran secara khusus, proses difokuskan dalam pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam evaluasi SAKIP dan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan : (i) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP); (ii) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan (iii) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan review dan evaluasi kinerja.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan kegiatan dimana pemenuhan dokumen kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat disusun dengan baik.

Realisasi capaian IKU ini pada tahun 2024 senilai 82,8 yang telah melebihi target di nilai 82 serta lebih tinggi bila dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya yang menunjukkan kualitas SAKIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon semakin baik. Namun adanya pemenuhan dokumen-dokumen terkait untuk dapat meningkatkan capaian nilai IKU di tahun kedepannya.

IKU 17 : Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)

Pelaksanaan audit pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah kerja PKA meliputi pengumpulan data audit, pengolahan dan analisa data/bukti audit sesuai teknik audit, pengembangan temuan audit. Adapun proses pelaksanaan audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar audit adalah sebagai berikut:

- Pengumpulan bukti audit
- Pengujian bukti audit
- Kertas kerja audit
- Penyusunan dan temuan audit

Temuan audit adalah masalah masalah penting serta memiliki dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja. Temuan audit harus mengandung unsur temuan yang lengkap yaitu menggambarkan kondisi sebenarnya, kriteria yang harus dipatuhi oleh auditor, penyebab hakiki, akibat yang ditimbulkan dan rekomendasi yang menghilangkan penyebab dan akibat.

Temuan audit harus mendapatkan tanggapan dari pihak auditi.

Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun temuan dan simpulan hasil audit yaitu:

- Judul, mencerminkan uraian substansi temuan
- Informasi, masukan informasi yang penting dan relevan dengan temuan
- Obyektif, yakinkan bahwa setiap kata didukung oleh bukti dan tidak dilebih-lebihkan apalagi bersifat menekan
- Kenali pendapat penting
- Yakin
- Kalimat konstruktif, bersifat membangun dan tidak kualitatif serta untuk perbaikan dimasa datang
- Pengakuan, apresiasi terhadap kegiatan yang sudah dicapai oleh manajemen
- Jujur
- Pengendalian manajemen, utamakan pembahasan pengendalian manajemen disetiap tingkatan pada bidang yang dipermasalahkan
- Pengaruh negative, jelaskan pengaruh negative yang sudah terjadi

- Penyebab hakiki, tunjukkan penyebab atau alasan yang menjadi dasar terjadinya masalah
- Ringkas, uraian permasalahan singkat dan jelas
- Bahasa sederhana.

Tabel 33. Capaian IKM “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)							
Realisasi				Tahun 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Realisasi 2024 terhadap 2023
100	100	100	100	80	100	120	100

Walaupun belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun hasil capaian IKU Persentase Jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBL Ambon pada semester kedua tahun 2024 sebesar 100% rekomendasi itjen telah terselesaikan seluruhnya dan sama dari satker lainnya seperti BBPBL Lampung (100%) , BPBL Batam (100%) dan BPBL Lombok (100%) artinya hampir semua rekomendasi telah ditindak lanjuti oleh satker tersebut. Dalam lima tahun terakhir BPBL Ambon telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dengan maksimal.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan kegiatan dimana pemenuhan dokumen kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat disusun dengan baik.

IKU 18 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL. Salah satu

dasar hukum yang digunakan adalah PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L. Pagu Anggaran Belanja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 33.724.991.000,- dan terjadi revisi anggaran menjadi Rp. 32,927,549.000, dimana revisi dilaksanakan di tahun 2024 terhadap anggaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi unit Produksi Hatchery gedung 4 telah diputus kontrak dan anggaran tersebut telah dikembalikan ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk mendukung kegiatan Nila Salin.

Tabel 34. Capaian IKM “Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPBL Ambon (persen) tahun 2024”.

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPBL Ambon (persen)							
Realisasi				Tahun 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Realisasi 2024 terhadap 2023
86,44	92,73	98,34	93,30	93,76	97,21	103,68	104,19

Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian *output* anggaran melalui : (i) Kelancaran pelaksanaan anggaran (*pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM*); (ii) Mendukung manajemen kas (*pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D*); dan (iii) Meningkatkan kualitas laporan keuangan (*LKKL/LKPP*) (*penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja*).

NO	KODE EFIN	KODE BA	KODE SATKER	URAHAN SATKER	REKAMISAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOPOT	DEVIANSI SPM (PENGURANG)	NILAI JML TOTAL/NO BOPOT
						REVISI HALAMAN DIPA	DEVIANSI HALAMAN RPKA	PENERAPAN ANGGARAN	BIAYA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP					
1	001	002	507330	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	Nilai	100,00	64,75	35,37	97,00	100,00	99,25	100,00	97,21	100%	0,00	
					Buku	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akr	10,00	12,75	19,87	11,70	10,00	9,93	25,00				
					Nilai Apok							100,00				

Gambar 15. Capaian IKU IKPA Tahun 2024

Perhitungan IKU IKPA tahun 2024 dilakukan per semester, data diatas merupakan data sementara per Desember 2024. Data capaian IKPA sementara berdasarkan data OM SPAN sampai dengan Desember 2024 sebesar 97,21.

Belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun hasil capaian IKU Nilai Pelaksanaan Kinerja Anggaran lingkup BPBL Ambon dan satker lainnya seperti BBPBL Lampung, BPBL Batam dan BPBL Lombok akan bervariasi, perbedaan yang terlihat dari nilai deviasi halaman III DIPA yang menunjukkan nilai perolehan yang berkaitan dengan perencanaan pencairan anggaran dalam menunjang ketercapaian output kinerja. Semester kedua Balai Laut lingkup DJPB menunjukkan perolehan nilai IKPA diatas Target yang ditetapkan yang artinya semua inputan pada komponen penilaian telah memenuhi nilai minimal yang ditetapkan.

Tindak lanjut dari pelaksanaan IKU ini adalah penggunaan dan pengajuan pembayaran sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun. Upaya tersebut dapat mengubah pola pencairan anggaran sehingga lebih merata di tiap triwulannya dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun dapat berkurang. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas, tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif, dan efisien dengan capaian *output* yang benar-benar optimal.

IKU 19 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)

Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.

Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek implementasi

- a. Capaian Keluaran. Pengukuran capaian keluaran output program dilakukan menghitung rata rata ukur secara geometric (Π) perbandingan antara realisasi indikator dengan target indikator.
- b. Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
- c. Efisiensi, dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi

anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Tabel 35. Capaian IKM “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)							
Realisasi				Tahun 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Realisasi 2024 terhadap 2023
26,20	85,02	87,34	88,38	71	85,93	120	97,23

Proses pencapaian kinerja perencanaan anggaran dilakukan pada akhir tahun berjalan. Walaupun belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini. Data kinerja anggaran BPBL Ambon mengacu pada perhitungan di tingkat eselon I. Data yang dimuat merupakan data adopsi langsung pada aplikasi Smartkeu.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan anggaran dimana pemenuhan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran guna pencapaian target kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Realisasi capaian IKU ini pada tahun 2024 senilai 85,93 dan relatif sama apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023. Capaian diatas menunjukkan kualitas penggunaan anggaran di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon semakin akuntabel dan efisien.

IKU 20 : Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)

Secara umum pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah. Pada sektor pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berlangsung cukup sulit. Proses yang berlangsung harus

sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan tidak boleh melanggar peraturan sedikitpun.

Pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintahan terbilang sulit karena pembiayaannya berkaitan erat dengan APBN/APBD sehingga segala proses yang terjadi harus dapat dipertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya. Sementara itu, pengadaan barang dan jasa pada sektor non pemerintah atau perusahaan, proses pengadaan yang dilaksanakan cenderung cukup mudah dan tidak serumit pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- Efektif, Kegiatan pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.
- Efisien, Kegiatan pengadaan diusahakan dengan dana yang terbatas untuk mencapai sasaran yang dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan
- Transparan, Adanya suatu keadaan dimana pihak ketiga kegiatan pengadaan bisa melihat dengan jelas barang atau jasa yang akan dibeli.
- Terbuka, Siapapun dapat mengikuti proses lelang yang berlangsung sebagai calon penyedia dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan.
- Bersaing, Penentuan penyedia yang akan dipilih ditentukan dengan persaingan lelang yang sehat antar penyedia.
- Adil/Tidak Diskriminatif, Memberikan perlakuan yang sama terhadap semua calon penyedia tanpa mengarah untuk memberi keuntungan pada pihak tertentu
- Akuntabel, Kegiatan pengadaan dapat ditelusur dari segi keuangan dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan pada berbagai pihak.

Tabel 36. Capaian IKM “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa BPBL Ambon”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa BPBL Ambon							
Realisasi				Tahun 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Realisasi 2024 terhadap 2023
-	74,50	76,65	82,23	80	82,89	103,61	100,8

Proses pencapaian tingkat kepatuhan barang dan jasa dilakukan pada akhir tahun berjalan. Walaupun belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun dalam proses pencapaian IKU ini, BPBL Ambon tetap mengacu pada peraturan yang diberlakukan LPSE sehingga data pengadaan barang jasa dapat dipantau dengan baik. Capaian IKU ini menunjukkan tren kenaikan dan diharapkan dapat ditingkatkan lagi tahun mendatang.

IKU 21 : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)

Pengelolaan Barang Milik Negara semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya belum dapat dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perlu dilakukan penggantian untuk menjawab permasalahan dan praktik yang belum tertampung dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang disesuaikan dengan siklus perbendaharaan. Dalam bahan ajar ini hanya akan membahas sebagian dari siklus pengelolaan BMN, yaitu tahap penatausahaan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan

lainnya yang sah. Barang yang diperoleh atas beban APBN meliputi baik melalui pembelian maupun pembangunan. Barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi:

1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tabel 37. Capaian IKM “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPBL Ambon”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPBL Ambon							
Realisasi				Tahun 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Realisasi 2024 terhadap 2023
-	81,50	76	77,9	80	87,60	109,50	112,45

Proses pencapaian tingkat kepatuhan pengelolaan BMN dilakukan pada akhir tahun mencapai 87,60. Walaupun belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun dalam proses pencapaian IKU ini, BPBL Ambon tetap mengacu pada peraturan yang diberlakukan. Penginputan data di Aplikasi pengelolaan BMN sehingga data pengelolaan BMN dapat dipantau dengan baik. Capaian tahun 2024 menunjukkan peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam kegiatan pengelolaan BMN di BPBL Ambon.

IKU 22 : Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Nilai Pengawasan Kearsipan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Indeks)

Media Relations menurut Dian Wardhani (2008:1) adalah aktivitas komunikasi public relations/humas untuk menjalin hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian pengertian serta dukungan dalam bentuk publikasi organisasi yang maksimal dan balance (berimbang). Adapun pendapat Lesly dalam Yosol (2011:29) mengatakan media relations sangat berhubungan dengan media

komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap organisasi. Dengan itu sebuah instansi harus memiliki hubungan media relations yang baik agar mendapat pemberitaan yang baik untuk instansinya.

Perkembangan media massa yang sangat pesat ini mempengaruhi kegiatan media relations yang dijalankan oleh instansi pemerintahan maupun swasta. Adapun kegiatan yang dilakukan Public Relations Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain mengamati perkembangan media, target sasaran, dan isu – isu yang berkembang di masyarakat agar dapat menentukan strategi media relations yang tepat untuk organisasinya.

Menurut standar analisis humas pada media tradisional yang dikeluarkan Institute for Public Relations (2012) Tone berita adalah penilaian yang dilakukan setelah membaca keseluruhan artikel (Eisenmann, 2012). Menurut Stacks (2006), tone mengukur apa yang dirasakan oleh target audiens tentang individu, perusahaan, produk atau topik, setelah membaca/melihat/mendengar berita di media massa. Tone biasanya terbagi atas positif, netral/balanced, dan negatif. Berikut indikator penentuan sebuah tone (Eisenmann, 2012):

Tabel 38. Deskripsi Tone Berita

No.	Tone Pemberitaan	Deskripsi
1.	Positif	Peliputan media membuat pembaca mendukung, merekomendasikan, dan/atau bersedia bekerjasama dengan perusahaan/brand
2.	Netral	Peliputan media tidak mengandung sentimen tertentu, hanya melaporkan fakta yang ada. Dalam pemberitaan yang negatif, sebuah artikel bisa saja netral jika hanya menyuguhkan fakta tanpa ada komentar editorial. Jika perusahaan/brand berada dalam kondisi yang tidak baik, paling tidak perusahaan/brand berupaya mendapatkan peliputan yang netral.
3.	Negatif	Peliputan media membuat pembaca tidak mau mendukung dan bekerjasama dengan perusahaan/brand.
4.	Balanced (Berimbang)	Hasil dari tone secara keseluruhan adalah berimbang.

Tabel 39. Capaian IKM “Persentase Pemberitaan Netral Positif terhadap Total Pemberitaan Sektor Perikanan Budidaya”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase Pemberitaan Netral Positif terhadap Total Pemberitaan Sektor Perikanan Budidaya (Persen)							
Realisasi				Tahun 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Realisasi 2024 terhadap 2023
-	-	-	100	86	100	116,28	100

Proses pencapaian rasio pemberitaan dilakukan setiap triwulan berjalan dengan target 86% dan pencapaian IKU ini pada tahun 2024 adalah 100% dimana pemberitaan sub sector perikanan budidaya memiliki tendensi positif. Walaupun belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun dalam proses pencapaian IKU ini, BPBL Ambon tetap melakukan monitoring media dan mengklasifikasikan berdasarkan tendensi isu yang terjadi.

Capaian di tahun 2024 dibandingkan dengan capaian di tahun 2023 adalah sama yaitu sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya konsistensi dalam menjalankan IKU tersebut.

IKU 23 : Nilai Pengawasan Kearsipan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Indeks)

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Arsip sangat penting dalam pengamanan aset Institusi dan sebagai bahan pembuktian baik secara *de facto* maupun/ *de jure*.

Output tindak lanjut pengawasan arsip adalah melahirkan pengelolaan arsip baik secara fisik, isi informasi utuh dan terkoneksi secara online. Pengelolaan secara fisik dan elektronik perlu dilakukan secara komprehensif. Pengelolaan arsip butuh komitmen dari pimpinan & konsistensi pelaksana. Tindak lanjut adalah perlu sinergi & sinkronisasi dalam pengelolaan arsip dalam tingkat teknis diantara perlunya bintek-bintek pemberkasan.

Dalam pengelolaan Arsip Dinamis membutuhkan SDM, Sarana & Prasarana, dan sumber daya lain. Empat pilar pengelolaan arsip dinamis yang harus dilakukan

organisasi kerja yaitu Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, JRA, Sistem Klasifikasi Keamanan.

Tabel 40. Capaian IKM “Nilai Pengawasan Kearsipan Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Nilai Pengawasan Kearsipan Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)							
Realisasi				Tahun 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Realisasi 2024 terhadap 2023
-	84,47	93,27	85,03	75	69,85	93,13	82,15

Belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun dalam proses pencapaian IKU ini, BPBL Ambon tetap melakukan pengelolaan kearsipan dan mengklasifikasikan arsip berdasarkan jenis dan kebutuhan arsip.

Capaian IKU ini pada tahun 2024 sebesar 69,85 menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan capaian di tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan terhadap kegiatan kearsipan di tahun kedepan.

IKU 24 : Indeks Pengelolaan Kepegawaian

Administrasi kepegawaian negara adalah pengelolaan kepegawaian negara atau pegawai negeri yang dikaji sebagai ilmu dan seni untuk mempelajari proses penggunaan tenaga manusia, mulai penerimaan hingga pemberhentiannya. Dapat juga dikatakan, administrasi kepegawaian negara merupakan proses penyelenggaraan politik kepegawaian atau program kerja, dan tujuan yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang digunakan dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Administrasi kepegawaian dalam instansi pemerintah tidak dapat dilepaskan dari kegiatan administrasi secara keseluruhan. Lingkup kegiatan administrasi kepegawaian, antara lain meliputi penerimaan, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun tupoksi dari pengelola kepegawaian:

1. Menyusun rencana kerja urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.
2. Membuat Daftar Absen dan Rekap

3. Menyusun Acara pelantikan Sumpah Jabatan.
4. Mengusulkan kenaikan Pangkat dan Jabatan.
5. Mengusulkan pensiun Pegawai / Janda.
6. Menyusun DUK PNS dan Bezeting.
7. Membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan.
8. Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
9. Membuat Surat Kenaikan Gaji Berkala.
10. Membuat BA. Sumpah Pejabat Fungsional/Pejabat Struktural/PNS.
11. Membuat KP4 Pegawai.
12. Membuat daftar Nominatif Pegawai.
13. Mengetik Surat Keluar/SKP Pegawai/Surat Tugas.
14. Memberikan laporan kegiatan kepada atasan.

Tabel 41. Capaian IKM “Indeks Pengelolaan Kepegawaian”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)							
Realisasi				Tahun 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Realisasi 2024 terhadap 2023
-	-	-	4	4	2	50	50

Pencapaian dan perhitungan IKU ini dilakukan pada tahun 2024 dengan penilain Komponen Indeks Pengelolaan SDM sebesar 76,25 dengan predikat di bawah rata-rata dan kategori 2 dari target tahun 2024 yaitu 4. Belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun dalam proses pencapaian IKU ini, BPBL Ambon tetap melakukan pengelolaan kepegawaian berdasarkan aturan yang berlaku. Rencana aksi dalam proses pencapaian IKU ini adalah dengan melakukan validasi data kepegawaian secara berkala dan dilaporkan secara berjenjang kepada SDMAO Eselon 1.

Tidak tercapainya target tahunan dikarenakan kurangnya capaian pada kriteria 1). Persentase perbandingan usulan kebutuhan ASN dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 2) Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses mutasi (Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan Non JF Bidang Perikanan Budidaya, Pindah PNS, Pencantuman Gelar, Peninjauan Masa Kerja dan Pemberhentian PNS) yang ditetapkan dibanding dengan jumlah usulan proses

mutasi dari unit kerja. Upaya langkah-langkah perbaikan seperti meningkatkan koordinasi dg Tim Kerja SDMA Ditjen PB dan meningkatkan frekuensi usulan kebutuhan ASN sesuai periode yang ditetapkan untuk meningkatkan capaian IKU ini di masa mendatang

IKU 25 : Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan KUSUKA lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Tujuan utama budidaya perikanan adalah memproduksi biota akuatik untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pangan, terutama protein, dan bukan pangan.

Kendala Budidaya Ikan antara lain :

- Mahalnya harga pakan.
- Susahnya Ketersedian benih yang berkualitas.
- Besarnya biaya pembuatan kolam.
- Waktu pengontrolan setiap saat.
- Pemberian pakan harus tepat waktu.
- Susah untuk beradaptasi dengan lingkungan.
- Tidak semua species ikan bisa dibudidayakan.

Kartu KUSUKA merupakan kartu identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI). Yang berhak memiliki kartu ini mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar ikan hingga petambak garam.

Adapun fungsi dari dari kartu KUSUKA ini antara lain sebagai integrasi dari semua kartu identitas Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di KKP menjadi satu Kartu, integrasi satu data stakeholder KKP yang dapat digunakan lintas eselon, pemanfaatan data dengan Kementerian atau Lembaga lain, prasyarat calon penerima bantuan

Selain menjadi identitas pelaku usaha kelautan dan perikanan, Kartu KUSUKA juga berfungsi sebagai basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Tak hanya itu, tapi juga pelayanan, pembinaan, serta sarana pemantauan evaluasi pelaksanaan program KKP.

Tabel 42. Capaian IKM “Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budi Daya yang Terintegrasi KUSUKA”

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budi Daya yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)							
Realisasi				Tahun 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Realisasi 2024 terhadap 2023
-	-	-	84,21	80	96,36	120	114,42

Capaian dan perhitungan IKU ini dilakukan pada akhir tahun sebesar 96,36. Belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun dalam proses pencapaian IKU ini, BPBL Ambon tetap melakukan proses pendataan pelaku usaha budidaya yang merupakan calon penerima bantuan prioritas tahun 2024, berdasarkan petunjuk teknis bantuan setiap anggota atau kelompok telah terdaftar atau teregistrasi dengan kartu KUSUKA.

Rencana aksi dalam proses pencapaian IKU ini adalah dengan melakukan koordinasi dengan penyuluh perikanan dan Dinas KP setempat terkait usulan pelaku usaha budidaya ikan harus memiliki akses KUSUKA, sehingga diharapkan setiap kelompok penerima bantuan dari Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah terintegrasi dengan KUSUKA KKP.

Capaian di tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian di tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan pembinaan ke pembudidaya terhadap keberadaan KUSUKA dan manfaatnya bagi pembudidaya telah berjalan dengan baik.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran APBN 2024 pada Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon adalah sebesar Rp 32,927,549,000, Berdasarkan data dari *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) tahun 2024, realisasi anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sampai bulan Desember 2024 telah tercapai sebesar Rp. 32.737.688.664,- atau sebesar (99,42%) hal ini disebabkan adanya

blokir anggaran sebesar Rp. 174. 718.000,- apabila dikesampingkan blokir realisasi sebesar 99,97 %.

Pembagian alokasi pagu anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tersebut menurut jenis belanja yaitu: (i) Belanja Pegawai sebesar Rp. 9,002,540,000, (ii) Belanja Barang sebesar Rp 22,816,509,000; dan (iii) Belanja Modal sebesar Rp 1,108,500,000.

Tabel 43. Pagu dan Realisasi Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon per Jenis Belanja Tahun 2024 dan 2023

JENIS BELANJA	TAHUN 2024			TAHUN 2023		
	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pegawai	8,920,110,000	8,910,812,158	99,90	8,130,021,000	8,117,056,004	99,84
Barang	22,898,939,000	22,720,722,249	99,22	21,175,153,000	21,164,801,947	99,95
Modal	1,108,500,000	1,106,154,2575	99,79	2,136,000,000	2,129,930,698	99,72
Total	32,927,549,000	32,737,688,664	99,42	31,441,174,000	31,411,788,649	99,91

Persentase anggaran belanja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2024 berdasarkan tabel di atas cukup proporsional karena didominasi oleh Belanja Barang.

Penggunaan anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon ditujukan untuk memenuhi target beberapa program prioritas yang menjadi tugas pokok dan fungsi utama. Pada tahun 2024, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon memiliki beberapa sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin diwujudkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dituangkan dalam beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didukung oleh anggaran yang memadai. Berikut adalah sasaran strategis dan indikator kinerja utama beserta dukungan anggaran:

Tabel 44. Data realisasi anggaran pada indikator kinerja utama (IKU) program prioritas

No.	Sasaran Kegiatan 2024	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran Tahun 2024	Keterangan
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Nilai PNBP BPBL Ambon (Rp)	940.200.000	940.200.000	1.047.956.775	Capaian 108,22%
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100%	3.060.345.000	3.060.126.793	Capaian 99,99%
		Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	75%	1.805.006.000	1.736.658.595	Capaian 96,21%
		Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75%	269.800.000	269.776.000	Capaian 99,99 %

No.	Sasaran Kegiatan 2024	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran Tahun 2024	Keterangan
		Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	75%	6.638.000	6.018.400	Capaian 90,67%
		Calon induk ikan laut yang diproduksi di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Ekor)	4.090 ekor	1.090.503.000	1.088.876.760	Capaian 99,857%
		Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100% 4 Lokasi	400.000.000	399.998.560	Capaian 100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang disalurkan ke masyarakat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	75%	9.591.430.000	9.484.190.000	Capaian 98,88%

No.	Sasaran Kegiatan 2024	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran Tahun 2024	Keterangan
		Persentase bantuan benih ikan hias laut yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	75%			Anggaran tergabung dengan kegiatan bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat
		Prasarana produksi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang direhabilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Unit)	1 unit	1.008.500.000	1.006.229.775	Capaian 99,77%
3.	Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya bidang kawasan dan kesehatan Ikan di Wilayah Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Persentase sampel kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100%	244.778.000	244.749.000	Capaian 99,99%

No.	Sasaran Kegiatan 2024	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran Tahun 2024	Keterangan
		Persentase sampel Surveillance Resistensi Antimikroba yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100%	31.075.000	31.075.000	Capaian 100%
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Indeks Profesionalitas ASN di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	85	-	-	Belum ada penganggaran khusus
		Hasil Penilaian Konsensus ZI di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	76	-	-	Belum ada penganggaran khusus
		Persentase penyelesaian LHP BPK atas satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100	-	-	Belum ada penganggaran khusus
		Nilai Rekon SAKIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	93	-	-	Belum ada penganggaran khusus

No.	Sasaran Kegiatan 2024	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran Tahun 2024	Keterangan
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	80%	-	-	Belum ada penganggaran khusus
		Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	93,76	-	-	Belum ada penganggaran khusus
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	86%	-	-	Belum ada penganggaran khusus
		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	80%	-	-	Belum ada penganggaran khusus
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	77,5	-	-	Belum ada penganggaran khusus

No.	Sasaran Kegiatan 2024	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran Tahun 2024	Keterangan
		Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	86	-	-	Belum ada penganggaran khusus
		Nilai Pengawasan Kearsipan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	75	-	-	Belum ada penganggaran khusus
		Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	4	-	-	Belum ada penganggaran khusus
		Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan KUSUKA lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	80	-	-	Belum ada penganggaran khusus

Tabel 45. Efisiensi Anggaran pada indikator kinerja utama (IKU) program prioritas

No.	Sasaran Kegiatan 2024	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Anggaran Tahun 2024	RO Tahun 2024	Keterangan
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Nilai PNBP BPBL Ambon (Rp)	940.200.000	1.047.956.775	108,22%	
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100%	3.060.126.793	99,99%	
		Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	75%	1.736.658.595	96,21%	
		Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75%	269.776.000	100%	

No.	Sasaran Kegiatan 2024	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Anggaran Tahun 2024	RO Tahun 2024	Keterangan
		Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	75%	6.018.400	90,67%	
		Calon induk ikan laut yang diproduksi di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Ekor)	4.090 ekor	1.088.876.760	99,857%	
		Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100% 4 Lokasi	399.998.560	100%	
		Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang disalurkan ke masyarakat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	75%	9.484.190.000	98,88%	

No.	Sasaran Kegiatan 2024	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Anggaran Tahun 2024	RO Tahun 2024	Keterangan
		Persentase bantuan benih ikan hias laut yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	75%	-	-	Tergabung dalam kegiatan bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat
		Prasarana produksi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang direhabilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Unit)	1 unit	1.006.229.775	99,77%	
3.	Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya bidang kawasan dan kesehatan Ikan di Wilayah Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Persentase sampel kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100%	244.749.000	99,99%	
		Persentase sampel Surveillance Resistensi Antimikroba yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100%	31.075.000	100%	

3.4. Evaluasi dan Analisis Penggunaan Anggaran

Berikut adalah uraian tentang evaluasi terhadap penggunaan anggaran yang telah direalisasikan serta analisis capaian kinerja dari sasaran strategis. Pencapaian program prioritas Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon merupakan bagian sasaran kegiatan yakni pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dan Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Efisiensi merupakan ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (tenaga, waktu, dan biaya), yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan tersebut dapat menghasilkan keluaran atau output yang telah ditetapkan. Akan dikatakan efisien jika mendapatkan keuntungan atau hasil yang maksimal, tetapi usaha yang dilakukan atau sumber daya yang digunakan minimal.

3.5. Upaya Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam upaya melaksanakan efisiensi penggunaan anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah melakukan beberapa upaya dalam pencapaian target kinerja utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Walaupun secara umum penggunaan anggaran 2024 menunjukkan selisih cukup kecil antara nilai pagu dan realisasi anggaran.

Upaya – upaya yang telah dilakukan adalah:

- Penggunaan aplikasi media seperti ZoomUs, Google Meet merupakan aplikasi gratis dalam video conference yang dapat diaplikasikan dengan mudah, hal ini biasanya digunakan dalam koordinasi kegiatan prioritas, maupun pelaksanaan seminar, bimtek maupun workshop bagi peningkatan kapasitas SDM BPBL Ambon.
- Melakukan perhitungan secara cermat terhadap kebutuhan bahan pendukung produksi sehingga ketersediaanya mencukupi.

4.1. Simpulan

Laporan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Pencapaian target kinerja pada tahun 2024 telah mencapai target.

4.2. Permasalahan/Kendala dihadapi

Pada tahun 2024, belum ada kendala yang berarti dalam proses pencapaian indikator kinerja utama Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, walaupun masih terdapat sedikit kendala teknis seperti masih ditemukannya system filterisasi media yang kurang maksimal yang berdampak pada kurang optimalnya kualitas media pemeliharaan yang siap digunakan dalam proses pemeliharaan ikan, banyaknya serangan ektoparasit, bakteri maupun virus, menurunnya kualitas media pemeliharaan dan terjadi blooming protozoa tertentu di perairan akibat perubahan parameter lingkungan secara signifikan namun realisasi bantuan masih dapat memenuhi target.

Capaian untuk IKU Nilai PBNP yang di triwulan III masih dibawah target triwulan yang dikarenakan proses penjualan komoditas dilakukan secara bertahap dikarenakan terbatasnya permintaan pasar. Setelah dilakukan upaya perbaikan, pada akhir tahun 2024 kendala ini telah teratasi dengan melakukan memperbanyak promosi melalui media sosial dan penyampaian secara langsung ke stakeholder yang datang saat kunjungan ke balai.

4.3. Langkah Perbaikan

Beberapa upaya telah dilakukan dalam memenuhi pencapaian target IKU yang menjadi tugas utama Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Langkah perbaikan yang dilakukan antara lain:

- Telah dilakukan perawatan sand filter dan pembersihan sarana filter guna meningkatkan sistem filtrasi media pemeliharaan pada fasilitas produksi.
- Telah dilakukan perbanyak sarana heater sebagai bentuk antisipasi ketika terjadi penurunan suhu secara signifikan dan perbaikan sarana filtrasi media guna menekan tingginya mortalitas benih ikan.
- Telah dilakukan grading secara rutin terhadap benih ikan konsumsi seperti kakap putih, bubar dan kerapu, meningkatkan frekuensi pemberian pakan, mengurangi padat tebar sehingga kanibalisme benih dapat ditekan.
- Melakukan pengujian sampel HPI secara berkala pada semua fasilitas budidaya yang dimiliki.
- Melakukan perbaikan sarana dan teknik kultur pakan alami skala massal untuk meminimalisir kegagalan dalam kegiatan produksi pakan alami untuk menunjang kegiatan pemeliharaan larva ikan.
- Pemeliharaan ikan yang sesuai SOP dan penanganan ikan yang sakit dilakukan sesuai gejala klinis dan dengan penanganan yang cepat dan tepat.
- Meningkatkan koordinasi dan promosi kepada stakeholder ketersediaan komoditas untuk meningkatkan nilai PNBPN Balai di waktu kedepan.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi BPBL Ambon, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Secara internal laporan kinerja ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan *stakeholders* /mitra kerja, sehingga kontribusi BPBL Ambon dalam pembangunan perikanan budidaya dapat lebih ditingkatkan.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA LAUT AMBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sarwono**
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut
Ambon

Sarwono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA LAUT AMBON**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkatkan di Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon	1.	Nilai PNBWP Wilayah Kerja Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Rupiah)	968.400.000
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	2.	Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		3.	Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		4.	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		5.	Persentase Bantuan Benih Ikan Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		6.	Calon Induk Ikan Laut yang Diproduksi (Ekor)	4090
		7.	Persentase Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan (Persen)	100
		8.	Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Laut yang Dimanfaatkan (Persen)	75
		9.	Persentase Bantuan Benih Ikan Hias Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		10.	Prasarana Perbenihan yang Direhabilitasi (Unit)	1
		3.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kawasan dan Kesehatan Ikan	11.
12.	Persentase Pengujian Sampel Antimikrobal Resistance (AMR) (Persen)			100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon	13.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)	85
		14.	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
		15.	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (Lhp) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Ambon (Persen)	100
		16.	Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)	82
		17.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Ambon (Persen)	80
		18.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)	93,76
		19.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)	86
		20.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)	80
		21.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)	80
		22.	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)	86
23.	Nilai Pengawasan Kearsipan Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)	75		

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		24.	Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	4
		25.	Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budi Daya yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	80

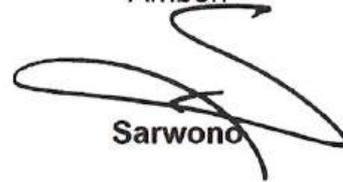
Jakarta, 20 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut
Ambon



Sarwono

DATA ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Perbenihan Ikan	6.529.664.000
2.	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	11.000.000.000
3.	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	1.825.853.000
4.	Dukungan Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	15.089.474.000
Total Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon Tahun 2024		34.444.991.000

Jakarta, 20 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut
Ambon



Sarwono



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA LAUT AMBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sarwono**
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya


Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut
Ambon


Sarwono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA LAUT AMBON**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkatkan di Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon	1.	Nilai PNBP Wilayah Kerja Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Rupiah)	968.400.000
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	2.	Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		3.	Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		4.	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		5.	Persentase Bantuan Benih Ikan Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		6.	Calon Induk Ikan Laut yang Diproduksi (Ekor)	4090
		7.	Persentase Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan (Persen)	100
		8.	Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Laut yang Dimanfaatkan (Persen)	75
		9.	Persentase Bantuan Benih Ikan Hias Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		10.	Prasarana Perbenihan yang Direhabilitasi (Unit)	1
		3.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kawasan dan Kesehatan Ikan	11.
12.	Persentase Pengujian Sampel Antimikrobia Resistance (AMR) (Persen)			100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon	13.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)	85
		14.	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
		15.	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (Lhp) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Ambon (Persen)	100
		16.	Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)	82
		17.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Ambon (Persen)	80
		18.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)	93,76
		19.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)	71
		20.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)	80
		21.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)	80
		22.	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)	86
		23.	Nilai Pengawasan Kearsipan Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)	75

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		24. Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	4
		25. Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budi Daya yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	80

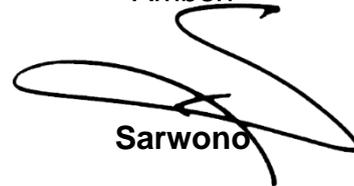
Jakarta, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut
Ambon



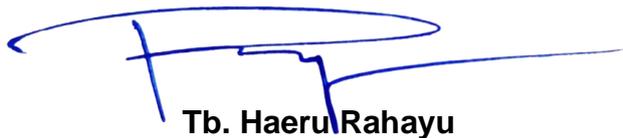
Sarwono

DATA ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Perbenihan Ikan	6.232.292.000
2.	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	10.271.430.000
3.	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	1.334.353.000
4.	Dukungan Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	15.089.474.000
Total Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon Tahun 2024		32.927.459.000

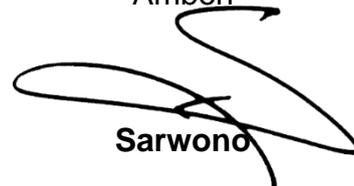
Jakarta, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut
Ambon



Sarwono



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.233/DJPB.1/KU.340/I/2025 10 Januari 2025
Sifat : -
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Capaian Realisasi PNBP Lingkup DJPB
Triwulan IV Tahun 2024

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan IV Tahun 2024, bersama ini disampaikan Capaian Realisasi PNBP Lingkup DJPB Triwulan IV Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Diperoleh dari jumlah Pendapatan Fungsional dan Umum Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak UPT dan BLU DJPB periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024 (Triwulan IV 2024).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak UPT dan BLU DJPB pada periode pengukuran hingga periode Triwulan IV Tahun 2024 lingkup DJPB sebesar **234,10%** (sebesar **Rp117.014.598.359** dari target PNBP DJPB sebesar **Rp. 49.985.496.000**).
3. Rincian capaian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari masing-masing UPT dan BLU DJPB disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

Tembusan :
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Lampiran Surat Dinas

Nomor : B.233/DJPB.1/KU.340/I/2025

Tanggal : 10 Januari 2025

DAFTAR NAMA PEJABAT PENERIMA SURAT

1. Kepala BLU Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
2. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
3. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
4. Kepala BLU Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
5. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
6. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
7. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
8. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
9. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
10. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
11. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
12. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam
13. Kepala BLU Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang
14. Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekekangan Karangasem
15. Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Direktorat Jenderal,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Gemi Triastutik

No.	KODE SATKER	NAMA SATUAN KERJA	TARGET SESUAI PK	REALISASI S/D CAPAIAN IKU	% SESUAI PK	S / D BULAN
1	2	3	4	5	6	7
		REALISASI PENDAPATAN PNBP				
1	632462	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Pusat)	Rp 50.000.000	Rp 3.456.631.354	6913,26	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 50.000.000	Rp 400.299.999	800,60	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 3.056.331.355		
2	445393	BLU Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang	Rp 27.358.090.000	Rp 16.327.953.666	59,68	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 27.358.090.000	Rp 384.566.186	59,02	
	II	Pendapatan Badan Layanan Umum		Rp 15.762.885.450		
	III	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 180.502.030		
3	239192	BLU Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	Rp 4.500.400.000	Rp 5.907.372.829	131,26	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 4.500.400.000	Rp 108.604.780	131,10	
	II	Pendapatan Badan Layanan Umum		Rp 5.791.334.415		
	III	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 7.433.634		
4	238734	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	Rp 1.590.081.000	Rp 2.720.199.314	171,07	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.590.081.000	Rp 2.710.587.984	170,47	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 9.611.330		
5	427706	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	Rp 1.189.308.000	Rp 1.320.350.650	111,02	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.189.308.000	Rp 1.283.321.534	107,90	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 37.029.116		
6	567350	BLU Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	Rp 3.552.374.000	Rp 71.502.985.814	2012,82	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 3.552.374.000	Rp 608.874.250	2010,71	
	II	Pendapatan Badan Layanan Umum		Rp 70.819.053.828		
	III	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 75.057.736		
7	237657	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi	Rp 1.555.000.000	Rp 2.231.617.695	143,51	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.555.000.000	Rp 2.138.463.000	137,52	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 93.154.695		
8	567680	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	Rp 1.683.158.000	Rp 2.662.185.275	158,17	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.683.158.000	Rp 2.602.304.668	154,61	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 59.880.607		

9	567385	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee	Rp	1.232.517.000	Rp	1.529.566.725	124,10	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	1.232.517.000	Rp	1.463.997.287	118,78	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	-	Rp	65.569.438		
10	567474	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	Rp	1.274.795.000	Rp	1.394.750.966	109,41	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	1.274.795.000	Rp	1.289.929.963	101,19	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	-	Rp	104.821.003		
11	567584	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin	Rp	1.214.288.000	Rp	2.014.602.924	165,91	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	1.214.288.000	Rp	1.965.607.561	161,87	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	-	Rp	48.995.363		
12	538911	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu	Rp	1.212.600.000	Rp	1.511.886.345	124,68	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	1.212.600.000	Rp	1.509.171.518	124,46	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	-	Rp	2.714.827		
13	567720	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Rp	968.400.000	Rp	1.047.956.775	108,22	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	968.400.000	Rp	1.014.609.633	104,77	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	-	Rp	33.347.142		
14	567762	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Rp	781.085.000	Rp	1.230.058.316	157,48	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	781.085.000	Rp	1.062.663.066	136,05	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	-	Rp	167.395.250		
15	567800	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang	Rp	1.100.000.000	Rp	1.224.279.457	111,30	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	1.100.000.000	Rp	1.219.819.070	110,89	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	-	Rp	4.460.387		
16	445394	Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem	Rp	723.400.000	Rp	932.200.254	128,86	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	723.400.000	Rp	919.383.648	127,09	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	-	Rp	12.816.606		
		JUMLAH PENDAPATAN FUNGSIONAL + UMUM (I)	Rp	49.985.496.000	Rp	20.682.204.147	226,18	
		JUMLAH PENDAPATAN BLU (II)			Rp 92.373.273.693			
		JUMLAH NON ANGGARAN (III)	Rp	-	Rp 3.959.120.519			
		JUMLAH PENDAPATAN I + II + III	Rp	49.985.496.000	Rp117.014.598.359	234,10		CAPAIAN IKU



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAMAN www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

IKU 2. DATA DUKUNG PERSENTASE BANTUAN BIBIT RUMPUT LAUT
YANG DISALURKAN s.d TRIWULAN IV TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

NO	JENIS IKAN	TARGET BANTUAN	CAPAIAN BANTUAN BIBIT RUMPUT LAUT (%)			
			BULAN SEBELUMNYA	BULAN DESEMBER	TOTAL	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Bibit Rumput Laut	7100 Kg atau 100%	7100	0	7100	100
	TOTAL		7100	0	7100	100

Ambon, 14 Januari 2025
Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAN www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

**IKU 3. DATA DUKUNG PERSENTASE BANTUAN SARANA KEBUN BIBIT
RUMPUT LAUT YANG DISALURKAN KE MASYARAKAT (KBRL)
s.d TRIWULAN IV TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

NO	JENIS BANTUAN	TARGET BANTUAN	CAPAIAN BANTUAN KEBUN BIBIT RUMPUT LAUT (%)			
			BULAN SEBELUMNYA	BULAN DESEMBER	TOTAL	PERSENTASE CAPAIAN
1.	KBRL	38 Paket atau 75%	38	0	38	100
	TOTAL		38	0	38	100

Ambon, 14 Januari 2025
Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Sarworo





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAN www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

**IKU 4. DATA DUKUNG PERSENTASE BANTUAN CALON INDUK YANG
DISALURKAN KE MASYARAKAT s.d TRIWULAN IV TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

NO	JENIS BANTUAN	TARGET BANTUAN	CAPAIAN BANTUAN CALON INDUK IKAN LAUT (%)			
			BULAN SEBELUMNYA	BULAN DESEMBER	TOTAL	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Calon Induk Ikan Laut	20 Ekor atau 75%	30	0	30	150
	TOTAL		30	0	30	150



Ambon, 14 Januari 2025
Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

Sarwono



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAN www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

IKU 5. DATA DUKUNG PERSENTASE BANTUAN BENIH IKAN LAUT
YANG DISALURKAN KE MASYARAKAT s.d TRIWULAN IV TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

NO	JENIS IKAN	TARGET BANTUAN	CAPAIAN BANTUAN BENIH IKAN KONSUMSI LAUT (EKOR)			
			BULAN SEBELUMNYA	BULAN DESEMBER	TOTAL	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Kakap Putih	538.000	541.900	0	541.900	100,72
2.	Bubara		-	-	-	
3.	Kerapu Macan		-	-	-	
4.	Kerapu Bebek		-	-	-	
	TOTAL		541.900	0	541.900	100,72



Ambon, 14 Januari 2025
Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

Sarwono



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAN www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

**IKU 6. DATA DUKUNG PERSENTASE CALON INDUK IKAN LAUT YANG
DIPRODUKSI s.d TRIWULAN IV TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

NO	JENIS IKAN	TARGET	CAPAIAN PRODUKSI CALON INDUK (EKOR)			PERSENTASE CAPAIAN
			BULAN SEBELUMNYA	BULAN DESEMBER	TOTAL	
1.	Kakap Putih	4090	3560	0	3560	102,47
2.	Bubara		20	-	20	
3.	Clownfish		611	-	611	
	TOTAL		4191	0	4191	102,47

Ambon, 14 Januari 2025
Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Sarwono



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAN www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

IKU 7. DATA DUKUNG PERSENTASE DISEMINASI TEKNOLOGI BUDIDAYA

IKAN TAHUN 2024

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

No.	Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi	Keterangan	Jumlah Peserta	Persentase Capaian Kegiatan
1.	Diseminasi Kegiatan Budidaya Laut Kabupaten kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara	1 Lokasi (Anggota DPR RI Komisi IV Ibu Alien Mus)	100 Orang	110%
2.	Diseminasi Kegiatan Budidaya Laut Kabupaten Buru, Provinsi Maluku	1 Lokasi (Anggota DPR RI Komisi IV Ibu Saadiyah Uluputy, ST)	120 Orang	
3.	Diseminasi Kegiatan Budidaya Ikan Kota Ambon, Provinsi Maluku	1 Lokasi (Anggota DPR RI Komisi IV Bapak Ir. Abdulah Tuasikal, M.Si)	120 Orang	
4.	Diseminasi Kegiatan Budidaya Ikan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan	1 Lokasi (Anggota DPR RI Komisi IV Bapak H. Sulaeman L Hamzah)	100 Orang	
	Capaian Kegiatan		440 Orang	110%

Ambon, 14 Januari 2025

Mengetahui,

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAN www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

**IKU 8. DATA DUKUNG PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA
IKAN AIR TAWAR DAN LAUT YANG DIMANFAATKAN 2024
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

NO	JENIS BANTUAN	TARGET BANTUAN	CAPAIAN BANTUAN SARANA DAN PRASARANA (PERSEN)			
			BULAN SEBELUMNYA	BULAN DESEMBER	TOTAL	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Bloflok	75% atau 48 Paket	0	48	48	100
			-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
TOTAL			0	48	48	100



Ambon, 14 Januari 2025

Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon


Sarwono



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAN www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

**IKU 9. DATA DUKUNG PERSENTASE BANTUAN BENIH IKAN HIAS LAUT
YANG DISALURKAN KE MASYARAKAT s.d TRIWULAN IV TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

NO	JENIS IKAN	TARGET BANTUAN	CAPAIAN BANTUAN BENIH IKAN HIAS LAUT (EKOR)			PERSENTASE CAPAIAN
			BULAN SEBELUMNYA	BULAN DESEMBER	TOTAL	
1.	Clownfish	3.000	7800	0	7800	260
			-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
TOTAL			7800	0	7800	260

Ambon, 14 Januari 2025
Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

Sarwono



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA, KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAN www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

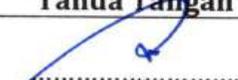
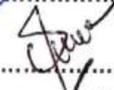
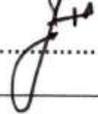
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN
PHO RENOVASI GEDUNG IKAN HIAS
TAHUN 2024

Nomor : 01/TTPPK/JK.PL-10/BAHPP/V/2024
Tanggal : 27 Mei 2024

Pada hari ini, Senin. Tanggal Dua Puluh tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga sesuai dengan Kontrak Nomor : 10/BPBLA/PL.420/SP/PPK-PL10/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 bersama-sama dengan unsur proyek, CV.Miracle Senntosa Abadi mengadakan rapat yang dihadiri oleh seperti dalam daftar hadir terlampir.

Mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah mempelajari secara seksama hasil pemeriksaan lapangan dan hasil pemeriksaan kelengkapan Administrasi Panitia menyatakan bahwa Penyedia telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam Kontrak.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
3. Pemeliharaan tersebut di atas Penyedia akan menyediakan peralatan, material dan personil yang diperlukan selama Masa Pemeliharaan.
4. Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) akan dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan.
5. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani di 27 Mei 2024 pada tanggal tersebut diatas.

No	Nama	Kedudukan	Tanda Tangan
1	Robianta Nurhadi, S.St.Pi	PPK	
2	Marlon W.B Berhita	Konsultan Pengawas	
3	Jelis Voldi Maitimu	Penyedia Jasa / Kontaktor	



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA, KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAM www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

Nomor : 02/Rekom/JK.PL-10/BAHPP/V/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas

Ambon, 27 Mei 2024

Kepada Yth.
Pejabat Penandatanganan Kontrak
di -

Tempat

Perihal : **Rekomendasi/Penyampaian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan
Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan (PHO)**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan pekerjaan Renovasi Gedung Ikan Hias Tahun 2024 Nomor : 01/TTPPK/JK.PL-10/BAHPP/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 paket Renovasi Gedung Ikan Hias maka bersama ini dilaporkan kepada Bapak bahwa PPK telah meninjau kelengkapan dan disimpulkan secara kolektif bahwa pekerjaan telah selesai 100 % sesuai dengan Kontrak.

Demikian Hasil Pemeriksaan Pekerjaan ini disampaikan dalam rangka rencana Serah Terima Pertama Pekerjaan tersebut diatas.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Robianta Nurhadi, S.St.Pi

Tembusan :

1. CV Miracle Sentosa Abadi
2. Pertiinggal

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN KONSTRUKSI
(PHO)

KONTRAK NOMOR : 10/BPBLA/PL.420/SP/PPK-PL10/II/2024
TANGGAL : 22 Februari 2024

Program	: Pengelolaan perikanan budidaya
Kegiatan	: Pengelolaan kawasan dan Kesehatan Ikan
Output	: Rehab sarana prasarana UPT
Lokasi	: Kota Ambon
Sumber Dana	: DIPA BPBL Ambon Tahun 2024
Nama Paket	: Renovasi Gedung ikan Hias
Penyedia	: CV MIRACLE SENTOSA ABADI
Nilai Kontrak	: Rp. 199.844.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA, KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAM www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN KONSTRUKSI (PHO)

Nomor : B.001/BPBLA/PPK/BA-PHO-RENOV.GED.IH/JKons/V/2024

Program	: Pengelolaan perikanan budidaya
Kegiatan	: Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan
Output	: Rehab sarana prasarana UPT
Paket Pekerjaan	: Renovasi Gedung ikan Hias
Nomor Kontrak	: 10/BPBLA/PL.420/SP/PPK-PL10/II/2024
Tanggal Kontrak	: 22 Februari 2024
Nomor Adendum Kontrak	: -
Tanggal Adendum Kontrak	: -
Tahun Anggaran	: 2024

Pada hari ini, selasa tanggal dua puluh delapan bulan mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Robianta Nurhadi, S.St.Pi

Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak

Alamat : Jl. Leo wattimena, waiheru, Ambon

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 595/Kpts/BPBLA/KU.110/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Rodeoshen Tanaya

Jabatan : Direktur CV Miracle Sentosa Abadi

Alamat : Jl Anthony Reebok, RT002/RW 01

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama CV Miracle Sentosa Abadi berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan dari Abigael Agnes Serworwora, SH. No. 47 Tanggal 21 Maret 2018, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Kontrak Nomor : 10/BPBLA/PL.420/SP/PPK-PL10/II/2024 tanggal 22 Februari 2024, antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tentang Surat Perintah Kerja SPK (Kontrak) Renovasi gedung ikan hias;
2. Surat PPK pada Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Nomor : 02/Rekom/JK.PL-10/BAHPP/V/2024, tanggal 27 Mei 2024 perihal Rekomendasi / Penyampaian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Pertama untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan konstruksi paket Renovasi Gedung ikan hias kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima penyerahan pekerjaan konstruksi tersebut terhitung dari tanggal 28 Mei 2024.
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan telah ditentukan dalam Kontrak dan Adendumnya. Masa pemeliharaan ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulai tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan 24 Desember 2024
3. Selama masa pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ambon, 28 Mei 2024

Yang Menerima Pekerjaan
Pihak Kedua
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Robianta Nurhadi, S.St.Pi
NIP. 198207242006041002

Yang Menyerahkan Pekerjaan
Pihak Pertama
CV Miracle Sentosa Abadi



Rodenshen Tanaya
Direktur



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAN www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

**IKU 11. DATA DUKUNG PERSENTASE LAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN
IKAN DAN LINGKUNGAN s.d TRIWULAN IV TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

NO	JENIS SAMPEL	TARGET SAMPEL	CAPAIAN UJI SAMPEL LABORATORIUM (SAMPEL)			PERSENTASE CAPAIAN
			BULAN SEBELUMNYA	BULAN DESEMBER	TOTAL	
1.	Kualitas Air	615	1321	55	1376	279,78
2.	Mikrobiologi	135	748	38	786	
3.	Biologi Molekuler	51	75	4	79	
	TOTAL	801	2144	97	2241	279,78

Ambon, 14 Januari 2025
Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Sarworo





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAN www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

IKU 12. DATA DUKUNG PERSENTASE PENGUJIAN SAMPEL AMR

s.d TRIWULAN IV TAHUN 2024

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

NO	JENIS SAMPEL	TARGET SAMPEL	CAPAIAN UJI SAMPEL AMR (SAMPEL)			PERSENTASE CAPAIAN
			BULAN SEBELUMNYA	BULAN DESEMBER	TOTAL	
1.	AMR	35	55	0	55	157,14
	TOTAL		55	0	55	157,14

Ambon, 14 Januari 2025
Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Sarwono





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAN www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

IKU 12. DATA DUKUNG PERSENTASE PENGUJIAN SAMPEL AMR

s.d TRIWULAN IV TAHUN 2024

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

NO	JENIS SAMPEL	TARGET SAMPEL	CAPAIAN UJI SAMPEL AMR (SAMPEL)			PERSENTASE CAPAIAN
			BULAN SEBELUMNYA	BULAN DESEMBER	TOTAL	
1.	AMR	35	55	0	55	157,14
	TOTAL		55	0	55	157,14

Ambon, 14 Januari 2025
Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Sarwono





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.262/DJPB.1/KP.720/I/2025
Lampiran : 1 berkas
Hal : Capaian IKU IP-ASN Tahun 2024
Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya

13 Januari 2025

Yth. Daftar Terlampir

Sehubungan dengan nota dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi nomor B.62/SJ.3/TU.140/I/2025, tanggal 9 Januari 2025 hal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV Semester II Tahun 2024 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian IP ASN lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya per tanggal 8 Januari 2024 dari hasil pengukuran Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada *dashboard* IP ASN yang berbasis Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP yaitu **86,80 (kategori tinggi)**, yang terdiri dari **Kualifikasi 21,03; Kompetensi 35,17; Kinerja 25,60; dan Disiplin 5,00**. Adapun data capaian dapat dilihat pada *dashboard* di link <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024/history?date=2024-07-11&q=>, atau telah kami rangkum sebagaimana pada lampiran 2.
2. Target Pengukuran IP ASN lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada Tahun 2024 adalah 85. Capaian Pengukuran IP ASN lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada Tahun 2024 adalah **86,80**. Dengan Demikian Capaian IP ASN pada tahun 2024 adalah **102,12%** dari target yang telah ditetapkan.
3. Target IP ASN Tahun 2025 adalah 87, dengan target semester I adalah 81 dan target semester II/akhir tahun adalah 87.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya.
2. Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi.

Lampiran 1 Surat Dinas
 Nomor : B.262/DJPB.1/KP.720/I/2025
 Tanggal : 13 Januari 2025

Daftar Penerima Surat

A.	Pusat
1.	Direktur Ikan Air Laut
2.	Direktur Rumput Laut
3.	Direktur Ikan Air Tawar
4.	Plt. Direktur Ikan Air Payau
5.	Ketua Tim Kerja Program dan Kerja Sama
B.	UPT
1.	Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
2.	Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
3.	Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
4.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
5.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
6.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
7.	Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
8.	Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam, Jambi
9.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
10.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
11.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
12.	Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
13.	Kepala Balai Layanan Usaha dan Produksi Perikanan Budidaya Karawang
14.	Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keekerangan Karangasem
15.	Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
 Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



**Ditandatangani
 Secara Elektronik**

Gemi Triastutik

Lampiran 2 Surat Dinas
 Nomor : B.262/DJPB.1/KP.720//2025
 Tanggal : 13 Januari 2025

**REKAPITULASI NILAI INDEKS PROFESIONALITAS ASN
 LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
 PER TANGGAL 8 JANUARI 2025**

No.	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total	Kategori
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin		
1.	Sekretariat DJPB	21,01	32,41	25,92	5,00	84,33	Tinggi
2.	Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan / Dit Ikan Air Laut	21,81	30,13	27,30	4,95	84,18	Tinggi
3.	Dit Perbenihan / Dit Rumput Laut	21,57	37,76	25,14	5,00	89,46	Tinggi
4.	Dit Pakan dan Obat Ikan / Dit Ikan Air Tawar	21,61	33,79	25,79	5,00	86,18	Tinggi
5.	Dit Produksi dan Usaha Budidaya / Dit Ikan Air Payau	21,94	25,92	25,14	5,00	78,00	Sedang
6.	BBPBAP Jepara	21,00	34,19	24,93	5,00	85,12	Tinggi
7.	BBPBAT Sukabumi	21,09	39,47	24,67	5,00	90,23	Tinggi
8.	BBPBL Lampung	20,66	36,97	25,86	5,00	88,48	Tinggi
9.	BPBAP Situbondo	20,92	34,22	25,42	5,00	85,55	Tinggi
10.	BPBAP Takalar	20,70	35,39	26,73	5,00	87,82	Tinggi
11.	BPBAP Ujung Batee	21,22	34,97	25,12	5,00	86,32	Tinggi
12.	BPBAT Mandiangin	20,44	39,45	25,87	5,00	90,76	Tinggi
13.	BPBAT Sei Gelam, Jambi	20,85	40,00	25,16	5,00	91,02	Sangat Tinggi
14.	BPBAT Tatelu	21,00	37,08	24,81	5,00	87,89	Tinggi
15.	BPBL Ambon	20,96	36,68	25,69	5,00	88,32	Tinggi
16.	BPBL Batam	20,88	35,27	26,47	5,00	87,62	Tinggi
17.	BPBL Lombok	20,71	35,20	25,00	5,00	85,92	Tinggi
18.	BLUPPB Karawang	20,41	36,65	25,00	5,00	87,06	Tinggi
19.	BPIUUK Karangasem	20,81	34,62	26,92	5,00	87,36	Tinggi
20.	BPKIL Serang	21,09	33,21	25,00	5,00	84,30	Tinggi
Rata-Rata		21,03	35,17	25,60	5,00	86,60	Tinggi

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
 Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



**Ditandatangani
 Secara Elektronik**

Gemi Triastutik



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16, GEDUNG MINA BAHARI III LANTAI 1, 2, 3
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3522310, FAKSIMILE (021) 3522310
LAMAM www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK itjen@kkp.go.id

Nomor : 4861/ITJ/HP.450/III/2021 26 Maret 2021
Sifat : Rahasia/Terbatas
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju
WBK pada Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon Provinsi
Maluku

Yth. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

di

Ambon

Bersama ini terlampir disampaikan Laporan Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Provinsi Maluku, Nomor: 4861/ITJ/HP.450/III/2021, tanggal 26 Maret 2021, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut diharapkan dapat kami terima selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah surat ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n. Inspektur Jenderal
Sekretaris Inspektorat Jenderal



Riza Trianzah, A.Pi., M.M
NIP. 19650310 198903 1 016

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya;
3. Inspektur V

Lampiran Surat
Nomor : 4861/ITJ/HP.450/III/2021
Tanggal : 26 Maret 2021

**HASIL PEMANTAUAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
PADA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON, PROVINSI MALUKU**

Menindaklanjuti Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 12.03.19/ITJ/TU.420/III/2021, tanggal 12 Maret 2021 untuk melaksanakan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon, Provinsi Maluku pada tanggal 16 s.d. 20 Maret 2021, Tim Inspektorat III telah melaksanakan pemantauan dimaksud sebagai berikut:

1. Pemantauan dilakukan terhadap hasil penilaian mandiri oleh Satker BPBL Ambon berdasarkan bukti *evidence* Tahun 2020 dan 2021. Satker BPBL Ambon telah mendapat Predikat WBK pada Tahun 2017 dan saat ini akan dilakukan penilaian kembali (2 tahunan) untuk mempertahankan predikat WBK dan mengusulkan satker BPBL Ambon supaya dapat diajukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN);
2. Penilaian pembangunan ZI menuju WBK terdiri atas komponen pengungkit dan komponen hasil. Berikut disampaikan tabulasi perbandingan hasil penilaian berdasarkan evaluasi nilai *Riil* per 19 Maret 2021 dan prediksi nilai *optimis* jika satker melakukan perbaikan atau *update* dokumen sebagaimana pada table 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK satker BPBL Ambon

No.	Uraian Komponen	Target		Riil		Optimis	
		Nilai	Capaian (%)	Nilai	Capaian (%)	Nilai	Capaian (%)
A.	Pengungkit						
1.	Manajemen Perubahan	8	100	4,22	52,78	6,09	76,16
2.	Penataan Tata Laksana	7	100	3,03	43,29	4,61	65,90
3.	Penataan Manajemen SDM	10	100	6,39	63,93	8,76	87,55
4.	Penguatan Akuntabilitas	10	100	5,08	50,77	8,75	87,50
5.	Penguatan Pengawasan	15	100	5,74	38,27	10,56	70,39

No.	Uraian Komponen	Target		Riil		Optimis	
		Nilai	Capaian (%)	Nilai	Capaian (%)	Nilai	Capaian (%)
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10	100	5,67	56,70	6,85	68,45
	Total Pengungkit	60		30,13		45,61	
B.	Hasil						
1.	Pemerintahan yang Bersih Bebas KKN						
a.	Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (Survei Eksternal)	15	100	12,41	82,75	12,41	82,75
b.	Presentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Internal dan eksternal) yang ditindak	5	100	5	100	5	100
2.	Kualitas Pelayanan Publik						
	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	20	100	16,75	83,75	16,75	83,75
	Total Hasil	40		34,16		34,16	
	NILAI EVALUASI	100		64,30		79,78	

3. Hasil pemantauan lebih lanjut masih ditemukan permasalahan yang perlu segera ditindaklanjuti, sebagai berikut:

a. Manajemen Perubahan

- 1) Surat Keputusan (SK) Kepala BPBL Ambon Tahun 2021 tentang tim untuk pembangunan ZI dan mekanisme penetapan tim belum disusun;
- 2) Dokumen rencana kerja pembangunan ZI Tahun 2021 belum disusun dan belum dilengkapi dengan rincian output dan hasil serta target prioritas sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 10 Tahun 2019;
- 3) Laporan realisasi WBK Tahun 2020 dan Triwulan I Tahun 2021 belum disusun dan laporan monitoring evaluasi WBK Triwulan III s.d. IV Tahun 2020 dan triwulan I Tahun 2021 belum diperbaiki dan dilengkapi dengan keterlibatan pimpinan;
- 4) Tanda terima pelaporan LHKPN dan absensi Tahun 2021 belum dilampirkan buktinya;
- 5) SK Agen perubahan Tahun 2021 belum disusun dan agen perubahan tahun sebelumnya belum memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerjanya;
- 6) Dokumen *evidence* budaya kerja belum dilampirkan.

b. Penataan Tatalaksana

- 1) Bukti dukung penerapan SOP untuk pengujian laboratorium belum dilampirkan;
- 2) Rekomendasi atas Laporan Monev Semester II Tahun 2020 belum ditindaklanjuti dengan menambahkan SOP Pengujian Laboratorium di internal BPBL Ambon;
- 3) Satker BPBL Ambon belum memiliki fasilitas pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi berupa *Google Form* untuk pendaftaran kunjungan dan perbaikan *Google Form* untuk pendaftaran pengujian laboratorium;
- 4) SK Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Tahun 2021 belum ditetapkan dan belum dilakukan monev atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

c. Penataan Sistem Manajemen SDM

- 1) Laporan monev rekrutmen dan mutasi pegawai Tahun 2019 dan 2020 belum disusun;
- 2) Dokumen *evidence* berupa SK penetapan mutasi pegawai, pola karir, pola mutasi, dan peta jabatan atas hal tersebut belum dilakukan konfirmasi dengan Sekretariat DJPB serta surat pertimbangan pola mutasi, pola karir dan peta jabatan dari satker belum dilampirkan;
- 3) Satker belum menyusun *Training Need Analysis* (TNA), sehingga belum diketahui kesenjangan kompetensi pegawai;
- 4) Belum dilakukan monev hasil pengembangan kompetensi;
- 5) Belum melengkapi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dari jenjang Kepala BPBL Ambon sampai dengan staf;
- 6) Belum melengkapi SKP Kepala BPBL Ambon s.d. staff Tahun 2020;
- 7) Belum melengkapi bukti monitoring capaian SKP bulan Januari s.d. Februari Tahun 2021;
- 8) Laporan monev penerapan kode etik Tahun 2020 belum diperbaiki dan masih perlu perbaikan mengenai:
 - a) Pelaksanaan kewajiban dan larangan sesuai butir-butir kewajiban dan larangan pada pasal 3 dan 4 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

- b) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang terjadi;
 - c) Sanksi hukuman disiplin/sanksi moral yang telah dijatuhkan.
- 9) Aktivitas operator *e-pegawai* Tahun 2021 belum dilengkapi.

d. Penguatan Akuntabilitas

- 1) Belum melampirkan bukti Rapat internal penyusunan pembahasan anggaran (undangan, notulen, daftar hadir) Tahun 2021, serta bukti evidence pelibatan pimpinan Kepala BPBL Ambon dan 3 (tiga) Sub Koordinator Kelompok;
- 2) Laporan pemantauan pencapaian kinerja Tahun 2020 belum dilampirkan;
- 3) Renja dan manual IKU Tahun 2021 belum dilampirkan;
- 4) Bukti peningkatan kapasitas SDM akuntabilitas kinerja seperti diklat/workshop/bimtek/sosialisasi/webinar belum dilampirkan.

e. Penguatan Pengawasan

- 1) Pelaksanaan *Public campaign* dilakukan secara tahunan, belum direncanakan secara triwulan atau semester;
- 2) Belum terdapat bukti bahwa Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) telah menjadi bagian dari prosedur pelayanan;
- 3) SK Tim UPG TA 2021 belum ditetapkan;
- 4) Laporan SPIP belum sesuai dengan substansi pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah antara lain seperti belum mengandung unsur 8 (delapan) lingkungan pengendalian;
- 5) Pada Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2020 dan 2021 belum dilengkapi dengan pagu anggaran, realisasi, tanda tangan penyusun/peserta FGD/penanggung jawab dan pencantuman tanggal;
- 6) SK Tim Penanganan Pengaduan dan *Whistle Blowing System* (WBS) TA 2021 belum ditetapkan;
- 7) Belum terdapat laporan bulanan dan laporan Monev Penanganan Pengaduan serta WBS Tahun 2020 s.d. bulan Februari 2021;
- 8) Substansi Laporan benturan kepentingan belum memadai dan laporan terbaru belum disusun;
- 9) Bukti internalisasi dan penanganan benturan kepentingan (termasuk pelaporan LHKPN dan LHKASN) belum dilampirkan.

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- 1) Maklumat Pelayanan belum ditandatangani oleh Kepala Satker;
- 2) Belum dilakukan reviu Standar Operasional Prosedur sesuai Permen KP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan KKP;
- 3) Sosialisasi budaya pelayanan prima belum dilakukan kepada pegawai yang memberikan pelayanan publik;
- 4) Informasi pelayanan publik sudah dilakukan pada media *online*, namun belum dilakukan pada media cetak seperti brosur, banner dan website;
- 5) Bukti implementasi kompensasi kepada pengguna layanan belum ada;
- 6) Satker BPBL Ambon belum memiliki inovasi atas pelayanan publik;
- 7) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) belum diupload ke *website* dan ditempel di papan mading/pengumuman maupun ruangan pelayanan.

4. Pada bagian Area Hasil, dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN terdapat 2 (dua) sub komponen yaitu:

- 1) Nilai Survei Persepsi Korupsi sebesar 12,41;
- 2) Presentase temuan hasil pemeriksaan (internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti sebesar 100%.

b. Kualitas Pelayanan publik

Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal) yaitu 16,75.

c. Pelaporan LHKPN dan LHKASN

Presentase kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN yaitu 4.

Nilai Survei Persepsi Korupsi dan Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan adalah nilai sementara, merupakan hasil nilai yang dilaksanakan pada Bulan Februari Tahun 2020, dan belum dilakukan *update* s.d. tanggal 20 Maret 2021 (belum ada *google form* yang masuk atau diisi oleh *Stakeholder* satker BPBL Ambon).

Terhadap hasil pemantauan yang diuraikan pada butir 2 s.d 4 di atas, kepada Kepala BPBL Ambon direkomendasikan agar :

1. Segera melengkapi kekurangan bukti dukung sebagai berikut:

a. Manajemen Perubahan

- 1) Menetapkan SK Tim Pembangunan ZI, SK Mekanisme Penetapan Tim dan SK Agen Perubahan Tahun 2021;

- 2) Menyusun rencana kerja pembangunan ZI Tahun 2021 dan melengkapi dengan rincian output, hasil dan target prioritas sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 10 Tahun 2019;
 - 3) Menyusun laporan Realisasi WBK Tahun 2020 dan TW I Tahun 2021;
 - 4) Menyusun laporan monitoring dan evaluasi WBK TW III s.d. TW IV Tahun 2020 dan TW I Tahun 2021;
 - 5) Melengkapi tanda terima pelaporan LHKPN dan absensi Tahun 2021;
 - 6) Melaporkan kontribusi agen perubahan pada tahun 2020;
 - 7) Melengkapi dokumen *evidence* budaya kerja.
- b. Penataan Tatalaksana
- 1) Melampirkan bukti penerapan SOP pengujian laboratorium;
 - 2) Menindaklanjuti rekomendasi laporan Monev Semester II Tahun 2020;
 - 3) Menambah fasilitas pelayanan publik menggunakan teknologi informasi;
 - 4) Menetapkan SK PPID Tahun 2021.
- c. Penataan Sistem Manajemen SDM
- 1) Menyusun laporan monev rekrutmen dan mutasi pegawai Tahun 2019 dan 2020;
 - 2) Melakukan konfirmasi dengan Sekretariat DJPB terkait dokumen *evidence* berupa SK penetapan mutasi pegawai, pola karir, pola mutasi, peta jabatan;
 - 3) Melampirkan surat pertimbangan pola mutasi, pola karir dan peta jabatan dari satker;
 - 4) Menyusun *Training Need Analysis* (TNA);
 - 5) Melakukan monev hasil pengembangan kompetensi;
 - 6) Melengkapi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 seluruh pegawai dari jenjang Kepala BPBL Ambon sampai dengan staf;
 - 7) Melengkapi SKP Kepala BPBL Ambon s.d. staf Tahun 2020;
 - 8) Melengkapi bukti monitoring capaian SKP bulan Januari s.d. Februari 2021;
 - 9) Memperbaiki dan menetapkan laporan monev penerapan kode etik Tahun 2020;
 - 10) Melengkapi dokumen bukti aktivitas operator *e-pegawai* Tahun 2021.
- d. Penguatan Akuntabilitas
- 1) Melampirkan bukti Rapat internal penyusunan pembahasan anggaran Tahun 2021 seperti undangan, notulen, dan daftar hadir, serta bukti

evidence pelibatan pimpinan Kepala BPBL Ambon dan 3 (tiga) Sub Koordinator Kelompok;

- 2) Melampirkan laporan pemantauan pencapaian kinerja Tahun 2020;
- 3) Melampirkan Renja dan Manual IKU Tahun 2021;
- 4) Menyusun LKj TW I Tahun 2021 Mengacu pada Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 ;
- 5) Melampirkan bukti peningkatan kapasitas SDM akuntabilitas kinerja.

e. Penguatan Pengawasan

- 1) Melaksanakan *Public campaign* secara triwulan atau semester;
- 2) Menambahkan Tim UPG dalam prosedur pelayanan;
- 3) Menetapkan SK Tim UPG, Tim Penanganan Pengaduan dan *Whistle Blowing System* (WBS) Tahun 2021;
- 4) Memperbaiki laporan SPIP mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2008;
- 5) Memperbaiki dokumen Penilaian Risiko Tahun 2020 dan 2021 dilengkapi dengan pagu anggaran, realisasi, tanda tangan penyusun/peserta FGD/penanggung jawab dan pencantuman tanggal;
- 6) Menyusun laporan bulanan dan laporan Monev Penanganan Pengaduan serta WBS Tahun 2020 s.d. bulan Februari 2021;
- 7) Memperbaiki substansi dan melakukan *update* laporan benturan kepentingan;
- 8) Melampirkan bukti internalisasi dan penanganan benturan kepentingan.

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- 1) Menandatangani Maklumat Pelayanan;
- 2) Melakukan reuiu Standar Operasional Prosedur sesuai Permen KP Nomor 43 Tahun 2015;
- 3) Melaksanakan sosialisasi budaya pelayanan prima kepada pegawai yang memberikan pelayanan publik;
- 4) Menyebarkan informasi pelayanan melalui media cetak seperti brosur, *banner* dan *website*;
- 5) Melengkapi bukti implementasi kompensasi kepada pengguna layanan;
- 6) Melengkapi bukti *upload* hasil SKM ke *website* dan menempel di papan pengumuman maupun ruangan pelayanan.

2. Melakukan Survei Persepsi Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan pada *google form* kepada *stakeholder*.

a.n. Inspektur Jenderal
Pengendali Mutu



Nur Arif Azizi
NIP. 19600821 198603 1 004



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.270/DJPB.1/KU.510/II/2025 13 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 lembar
Hal : Capaian IKU Prosentase Penyelesaian LHP
BPK-RI

Yth. Terlampir

Sehubungan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal tanggal 9 Oktober 2024 perihal Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP”, bersama ini disampaikan capaian IKU “Prosentase Penyelesaian LHP BPK-RI” lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagai berikut :

1. Realisasi capaian IKU diperoleh dari Jumlah nilai temuan BPK pada laporan Keuangan KKP Tahun 2024 yang dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran KKP Tahun 2024.
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan hingga periode Triwulan IV Tahun 2024 lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 0,060%.
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dari masing-masing Satker disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n Dirjen Perikanan Budi Daya
Sesditjen Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

Tembusan :
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Lampiran Surat Dinas
Nomor : B.270/DJPB.1/KU.510/I/2025
Tanggal : 13 Januari 2025

- No DAFTAR PEJABAT PENERIMA SURAT DINAS
- 1 Direktur Ikan Air Laut
 - 2 Direktur Ikan Air Tawar
 - 3 Direktur Rumput Laut
 - 4 Plt Direktur Ikan Air Payau
 - 5 Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
 - 6 Plh Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
 - 7 Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
 - 8 Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
 - 9 Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
 - 10 Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
 - 11 Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
 - 12 Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
 - 13 Plt Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
 - 14 Plt Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
 - 15 Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
 - 16 Plt Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam
 - 17 Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang
 - 18 Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekekangan Karangasem
 - 19 Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

a.n Dirjen Perikanan Budi Daya
Sesditjen Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

Lampiran Surat Dinas
 Nomor : B.270/DJPB.1/KU.510/I/2025
 Tanggal : 13 Januari 2025

Rincian Capaian Tindak Lanjut LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2024

No	Unit Kerja	Temuan LHP BPK TA 2024	Temuan yang diselesaikan	Tuntas (%)	Sisa
1	BBPBL Lampung	-	-	100%	-
2	BBPBAT Sukabumi	-	-	100%	-
3	BBPBAP Jepara	-	-	100%	-
4	BPBL Ambon	-	-	100%	-
5	BPBAP Ujung Batee	-	-	100%	-
6	BPBAP Takalar	-	-	100%	-
7	BPBAT Sungai Gelam	-	-	100%	-
8	BPBAT Tatelu	-	-	100%	-
9	BPBAP Situbondo	-	-	100%	-
10	BPBAT Mandiangin	-	-	100%	-
11	BPBL Lombok	-	-	100%	-
12	BPBL Batam	-	-	100%	-
13	BLUPPB Karawang	86.200.200	86.200.200	100%	-
14	BPIUUK Karangasem	-	-	100%	-
15	BPKIL Serang	-	-	100%	-
16	Direktorat Ikan Air Laut	458.489.856	458.489.856	100%	-
17	Direktorat Ikan Air Tawar	-	-	100%	-
18	Direktorat Ikat Air Payau	-	-	100%	-
19	Direktorat Rumput Laut	94.636.339	94.636.339	100%	-
20	Setditjen Perikanan Budidaya	-	-	100%	-
TOTAL		639.326.395	639.326.395	100%	-

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot(%)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	11.50	22.80
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	10.00	24.00
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	5.50	13.50
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	11.00	22.50
	TOTAL	100.00	38.00	82.80
	PREDIKAT		C	A

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot(%)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	22.80	76.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	6.00	100.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	6.30	70.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	10.50	70.00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.00	80.00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90.00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	8.10	90.00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	10.50	70.00%
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	13.50	90.00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.70	90.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	4.05	90.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.75	90.00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	22.50	90.00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.50	90.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.75	90.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50	11.25	90.00%

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Jawaban	Nilai	Catatan	Daftar Evidence	Link Evidence
1	PERENCANAAN KINERJA					
1.a	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia					
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.	Ya - ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan	100	telah ada dokumen pedoman teknis perencanaan kinerja di BPBL Ambon yakni PermenKP 35/PERMEN-KP/2023	Dokumen PermenKP 35/PERMEN-KP/2023	https://drive.google.com/drive/folders/1gXlByHj59oFamDBW28yhz8wB9D1T_p3x?usp=sharing
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah	Ya - ada Renstra	100	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah yakni renstra BPBL Ambon 2020-2024	Dokumen Renstra 2020-2024 BPBL Ambon	https://drive.google.com/drive/folders/19fmJb50h000PR8Wjyz7slPskNoqkxbRu?usp=sharing
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.	Ya - ada Perjanjian Kinerja Pimpinan Satker	100	Terdapat dokumen perencanaan jangka pendek yang tertuang dalam perjanjian kinerja BPBL Ambon	Dokumen PK Organisasi	https://drive.google.com/drive/folders/1utaW-beEnQRsxFxdMJUe3MOMWG21?usp=sharing
4	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.	Ya - ada Rencana Aksi	100	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas berupa rencana aksi BPBL Ambon	Dokumen Rencana Aksi atas PK	https://drive.google.com/drive/folders/1mPp2CS0wU7g104r240ZafZDcHhLH1c?usp=sharing
5	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.	Ya - ada RKA	100	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang tertuang dalam RKAKL BPBL Ambon	Dokumen RKA	https://drive.google.com/drive/folders/1-TqwNBKOWYAqEobE--jLhhCNIVIHChCb?usp=sharing
6	Setiap unit kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	Ya - ada seluruh PK level di bawahnya yang ditetapkan	100	telah dilakukan perumusan dan perencanaan kinerja yang tertuang dalam dokumen Matrik Peran Hasil BPBL Ambon	Dokumen MPH dan SKP Pegawai karena PK Level bawah sudah tidak ada hanya ada PK Organisasi (Kepala Balai)	https://drive.google.com/drive/folders/1w_CkwGE_vD981rDlmk2U-dD60H1gYku?usp=sharing
7	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja	Ya - seluruh pegawai menyusun SKP	100	Setiap pegawai BPBL Ambon telah memiliki SKP (dilengkapi dengan MPH)	Dokumen MPH dan SKP Pegawai	https://drive.google.com/drive/folders/1IKUR5RXJGU0RlWNH_9UKQkYeuU34ixE?usp=sharing
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)					
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.	a - Jika seluruh Dokumen Perencanaan pada butir 1.a telah ditandatangani sesuai ketentuan	100	dokumen kinerja telah ditandatangani oleh Kepala BPBL Ambon	Pedoman Pengelolaan Kinerja, Renstra, PK, RKA, RA, PK individu, SKP dan MPH	https://drive.google.com/drive/folders/12H991Y3WGtCRy6fNIGi6mZr01WW19qV?usp=sharing
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.	a - Jika Renstra telah dipublikasikan secepatnya/triulan yang sama dengan penetapannya, dan PK telah dipublikasikan secepatnya/ triulan yang sama dengan penetapannya	100	Dokumen Perencanaan kinerja telah dipublikasikan dalam Website	Screenshot publikasi	https://drive.google.com/drive/folders/1AtTkcSr_4L2snhkUNqhd1aWjkNVW8QXB?usp=sharing
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.	a - Jika seluruhnya telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai	100	Dokumen Perencanaan BPBL Ambon telah memuat target kinerja yang perlu dicapai	Dokumen Renstra dan Reviu Renstra	https://drive.google.com/drive/folders/1FSGZuF8MreO7K5eNZkbWES5cRmMYM?usp=sharing
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	a - Jika > 95% Tujuan/Sasaran telah jelas menggambarkan kinerja yang akan dicapai	100	Rumusan hasil dalam Renstra dan Reviu Renstra BPBL Ambon telah menggambarkan kinerja	Dokumen Renstra dan Reviu Renstra	https://drive.google.com/drive/folders/1kp7DpRaUicKjMHW_z4c14fBg5Eq8JG?usp=sharing
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.	a - Jika > 95% Indikator Kinerja memenuhi kriteria SMART dan PK memuat seluruh IKU	100	IKU BPBL Ambon telah memenuhi kriteria SMART	Dokumen SK IKU dan PK	https://drive.google.com/drive/folders/1MKR4VCDUW53NkXpOyY6_U5gHTz1lFE?usp=sharing
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).	b - Jika terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diganti setiap tahun dalam 1 periode Renstra	50	IKU BPBL Ambon tidak diganti setiap tahun, dan berkelanjutan	Dokumen SK IKU dan PK	https://drive.google.com/drive/folders/1Q9J1Io_juH46fcwNaF4gm38xRQsznHRU?usp=sharing
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.	a - Jika > 95% Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis	100	target kinerja BPBL Ambon yang ditetapkan dapat dicapai	Dokumen PK	https://drive.google.com/drive/folders/1eNuH3FgxtSKWulyzGBZKiz7dMvOVoh?usp=sharing
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).	b - Jika > 0 - 95% Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading)	50	dokumen perencanaan BPBL Ambon telah menggambarkan hubungan yang selaras dengan target kinerja	Dokumen Matrik Cascading	https://drive.google.com/drive/folders/13LcgufMQ7V3XxFwyZBJOCJEGj5dAnH?usp=sharing
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)	Ya - jika terdapat informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)	100	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)	Crooscutting PK	https://drive.google.com/drive/folders/1av17L3KzkQhhSdl6D0veU4625xK4DWz?usp=sharing
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan					
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.	a - > 95% sasaran telah teridentifikasi anggarannya	100	anggaran BPBL Ambon dalam perencanaan yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja	Dokumen PK dan Renja	https://drive.google.com/drive/folders/1pnu-z2hoM4LOEFT_KmuC2ZAFhLhJ9N?usp=sharing
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.	a - > 95% Indikator Kinerja telah teridentifikasi aktivitasnya	100	Rencana Aksi BPBL Ambon yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.	Dokumen PK dan Rencana Aksi atas PK	https://drive.google.com/drive/folders/19c-4SEtuiN5UPwZ2UDW7Xf-gvt9Burn?usp=sharing
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track	a - > 95% Target Indikator Kinerja telah tercapai	100	Target kinerja BPBL Ambon yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja Evaluasi Rencana Aksi telah dicapai dengan baik.	Dokumen Evaluasi Rencana Aksi, screenshot kinerjaku	https://drive.google.com/drive/folders/1aUrYbCzB54_4_U2dox4gEUc9xcv2t1DF?usp=sharing
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala	a - Pemantauan/monev RA sudah dipantau secara berkala dan terdapat tindak lanjut atas RA	100	Rencana aksi kinerja BPBL Ambon dapat berjalan dinamis	Dokumen Evaluasi Rencana Aksi	https://drive.google.com/drive/folders/1gRGOIH8Jx4wHAKT_D6hoNJI2kTK_E73?usp=sharing

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Jawaban	Nilai	Catatan	Daftar Evidence	Link Evidence
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya	a - Telah dilakukan analisis dan jika terdapat kelemahan di Dokumen Perencanaan telah diperbaiki	100	telah dilakukan perbaikan dokumen perencanaan BPBL Ambon untuk peningkatan kualitas kinerja	LKJ	https://drive.google.com/drive/folders/13KTDlItbqUqxZCVqE4sCpB2AL9YO594?usp=sharing
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik	a - Telah dilakukan penyesuaian/perbaikan > 95% Dokumen Perencanaan jika terdapat kinerja yang tidak tercapai atau tidak ada yang perlu diperbaiki karena kinerja telah tercapai	100	telah dilakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja BPBL Ambon dalam mewujudkan capaian kinerja	LKJ	https://drive.google.com/drive/folders/16T2SnJWVYGhSL20WY2o3vh1SPy-grWmf?usp=sharing
7	Setiap unit kerja level dibawahnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	a - > 95% Pimpinan Unit Kerja menandatangani PK	100	Pimpinan BPBL Ambon telah menandatangani PK Organisasi	Dokumen PK	https://drive.google.com/drive/folders/10g2h2ADNBHuUcuNwtMtqQ75ZRVhGyV2u?usp=sharing
8	Pimpinan terlibat dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	b - Pimpinan Unit Kerja memberikan pengarahan terhadap pencapaian >0- 95% Indikator Kinerja	50	Pimpinan BPBL Ambon terlibat secara aktif dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Dokumen Rapat Pimpinan pembahasan kinerja atau sejenisnya	https://drive.google.com/drive/folders/16u1KRPpAR6tW4WBh_Tg7Xj6eERgTDavEI?usp=sharing
9	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	a - > 95% Pegawai menandatangani SKP	100	setiap Pegawai BPBL Ambon memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Dokumen SKP dan Kuesioner	https://drive.google.com/drive/folders/1KIPAnTaVISzhSdJiALBBURhCfKvEejd?usp=sharing
10	Kinerja individu telah selaras dengan kinerja organisasi	a - > 95% Pegawai telah memiliki IKI yang selaras dengan kinerja organisasi	100	dokumen SKP pegawai atau kinerja individu BPBL Ambon telah memiliki keselarasan dengan kinerja organisasi	Dokumen SKP Pegawai, PK, Cascading IKU	https://drive.google.com/drive/folders/178tt5mt40F-7Y-1cjmUig-8qxYf7ED89?usp=sharing
2	PENGUKURAN KINERJA					
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan					
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.	Ya - apabila unit kerja telah memiliki Manual IKU	100	BPBL Ambon telah memiliki Manual IKU	Manual IKU Tahun 2023 dan 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1S785UULKUC088tPD4Vao3TYQ0VI-18?usp=sharing
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja	a - Apabila > 95% indikator kinerja pada PK telah memiliki manual IKU	100	Indikator Kinerja pada PK telah memiliki Manual IKU	Manual IKU Tahun 2023 dan 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1w5tmmU7KPPZVi5IA7WQImFkPckrE?usp=sharing
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.	a - Apabila > 95% indikator kinerja dilengkapi manual IKU yang andal	100	Indikator Kinerja telah dilengkapi Manual IKU yang Handal	Manual IKU Tahun 2023 dan 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1nmT9SNiW056y8MbBhCS4KAnlIliHbUt5?usp=sharing
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan					
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.	a - Pimpinan unit kerja terlibat pada seluruh pengukuran capaian kinerja (4 Laporan Triwulanan)	100	Kepala Balai BPBL Ambon terlibat pada seluruh pengukuran capaian kinerja.	LKJ 2023 dan 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1fEhcKWfbiCEEYnY11txFdB-ucx02KIA?usp=sharing
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.	a - Apabila > 95% data (capaian) kinerja yang dikumpulkan telah relevan	100	Data capaian kinerja yang dikumpulkan telah relevan	LKJ 2023 dan 2024 dan data dukung LKJ	https://drive.google.com/drive/folders/1UXTI3K657H3_NTg64Dk_G_erVR4T0v3h?usp=sharing
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.	a - Apabila > 95% data (capaian) kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan	100	Data capaian kinerja telah sesuai	LKJ 2023 dan 2024 dan data dukung LKJ	https://drive.google.com/drive/folders/1Ra4u-MfwH4gIowncct6qDHaMPZySvuy?usp=sharing
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.	Ya - apabila pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala (triwulanan)	100	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.	LKJ 2023 dan 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1K2G7CgFpPdtwnXD6ejrPU6ZCFt_E7r?usp=sharing
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.	a - > 95% level organisasi telah menerima LKJ unit dibawahnya	100	LKJ telah diterima oleh seluruh level organisasi	LKJ 2023 dan 2024 TW I dan data dukung LKJ	https://drive.google.com/drive/folders/1Du4Jkw4yHhndqqzVC03-bFep2Gn160a1?usp=sharing
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Ya -	100	Pengumpulan Data telah menggunakan Aplikasi	Screen shoot kinerjaku 2023 dan 2024 TW I	https://drive.google.com/drive/folders/1UXYSFUGR10WxRRtmAJk4XzORxshfZyBl?usp=sharing
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Ya -	100	Pengukuran Capaian Kinerja telah menggunakan Aplikasi	Screen shoot kinerjaku 2023 dan 2024 TW I	https://drive.google.com/drive/folders/1HhAZjBIDt0-ZkigQRVqxITkbrq7M8s0v?usp=sharing
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien					
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.	a - >60% Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan	100	Pemberian Tunjangan Kinerja pada BPBL Ambon berdasarkan pada Permen KP No 13 Tahun 2022	Permen KP No 13 tahun 2022 dan dokumen perhitungan tunjangan kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1cd9epamsH6kYdcf-zM5RTXO1K4IbIQ?usp=sharing
2	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja	a - > 95% Pengukuran kinerja telah memengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja atau jika tidak ada yang perlu diperbaiki;	100	Dalam Evaluasi Rencana Aksi telah meliputi terkait Pengukuran kinerja	Evaluasi Rencana Aksi	https://drive.google.com/drive/folders/1PerItUK6u2mqC2Dy5wqCkEWkSV3dIf3Z?usp=sharing
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja	a - > 95% Pengukuran kinerja telah memengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja atau jika tidak ada yang perlu diperbaiki	100	Pengukuran kinerja di BPBL Ambon telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran	LKJ dan RKA	https://drive.google.com/drive/folders/1NDIPBetlynZ6WpmMuhGoS6VMwGyBxU5?usp=sharing
4	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	b - Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran kegiatan rutin	50	Telah dilakukan Efisiensi penggunaan anggaran yang tidak mendukung capaian kinerja	LKJ	https://drive.google.com/drive/folders/1IMFZYU0v2zgEuNHhHqCqjIOYVbKpZs-?usp=sharing
5	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	a - > 70% Saran pada LKJ Triwulanan sudah ditindaklanjuti sebelum LKJ Triwulan berikutnya terbit	100	Saran pada LKJ Triwulanan telah ditindaklanjuti	LKJ	https://drive.google.com/drive/folders/1JQGIzYyuf2mQY5FbCs1pdBFzxCtBfH?usp=sharing
6	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	a - > 95% pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	100	Pegawai BPBL Ambon telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Kuisisioner	https://drive.google.com/drive/folders/1IKRkD1S1WSYCD9AT3EwTo14torjDmXV8?usp=sharing

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Jawaban	Nilai	Catatan	Daftar Evidence	Link Evidence
3	PELAPORAN KINERJA					
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja					
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.	Ya -	100	Laporan Kinerja BPBL Ambon telah disusun.	Laporan Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1DyWv0UEW83qMps4XNwvJ-NXAFvPIwX?usp=sharing
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.	a - Terdapat LKj minimal Triwulanan	100	Laporan Kinerja BPBL Ambon telah disusun secara Triwulanan	Laporan Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1O-jk5MfMihYHurZtt17ixlKtWdJKSSk8?usp=sharing
3	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.	Ya - Reviu atas Laporan Kinerja dilakukan oleh Eselon I dan/atau APIP	100	Laporan Kinerja BPBL Ambon telah dilakukan reviu oleh eselon I	Laporan Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1Uf0v_4SRF2XXTGOCgxEszbl11Q2uixTS?usp=sharing
4	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.	Ya - LKj telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang	100	Laporan Kinerja BPBL Ambon telah ditanda tangani oleh kepala balai	Laporan Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1Uf0v_4SRF2XXTGOCgxEszbl11Q2uixTS?usp=sharing
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.	Ya - Laporan Kinerja dapat diakses dengan mudah setiap saat (misalnya melalui website resmi KKP/Satker atau media lain yang dapat diakses secara mudah oleh publik	100	Laporan Kinerja BPBL Ambon telah dipublikasikan di website	Screen Shoot publikasi Laporan Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1NyhGdf3M91wb0wNdlWDvVolkEqK3C?usp=sharing
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.	a - Seluruh LKj disampaikan tepat waktu	100	Laporan Kinerja BPBL Ambon telah disampaikan tepat waktu.	Surat Pengantar LKj dan LKj	https://drive.google.com/drive/folders/1BOXNSr1N1YU-M00k48j3kbGkDjTnq4?usp=sharing
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya					
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.	Ya - LKj disusun sesuai dengan format Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	100	Laporan Kinerja BPBL Ambon telah disusun dengan format berdasarkan PermenPANRB nomor 53 Tahun 2014	Laporan Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1HU51F3RNN0M61Y1WePE40i2pkEteBY6i?usp=sharing
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.	a - LKj mengungkapkan >95% IKU	100	Laporan Kinerja BPBL Ambon telah mengungkap seluruh IKU.	Laporan Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/18V0UUECFBNU-tjzUq8kLN6QDD-2Cjsi?usp=sharing
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan.	a - > 95% indikator	100	Laporan Kinerja BPBL Ambon telah memberikan informasi analisis dan evaluasi target tahunan.	Laporan Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1WqEXimw7eh83Y4BBqIRQwWbh8rKY-8?usp=sharing
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	a - > 95% indikator	100	Laporan Kinerja BPBL Ambon telah memberikan informasi analisis dan evaluasi target jangka menengah.	Laporan Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1_WEAGTMexq2ZeU39JNB7hFysCDLo8uxz?usp=sharing
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	a - > 95% indikator	100	Laporan Kinerja BPBL Ambon telah memberikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja tahun sebelumnya.	Laporan Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1Nslm2YvCsEdXo3yrrqGom31qaeuOgiW?usp=sharing
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	a - > 95% indikator	100	Laporan Kinerja BPBL Ambon telah memberikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja UPT selevel	Laporan Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/12W76qis_f501RjBcelHaa1c95f_virW?usp=sharing
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan detail kinerja dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja.	a - > 95% indikator	100	Laporan Kinerja BPBL Ambon telah memberikan info detail kinerja dalam mencapai keberhasilan/kegagalan.	Laporan Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1QA1KpQ5OCEuY30KwOF3-HeKMSDKbu6-R?usp=sharing
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatanya.	a - > 95% indikator	100	Laporan Kinerja BPBL Ambon telah memberikan informasi kualitas atas keberhasilan/kegagalan untuk mencapai target.	Laporan Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1HyNMAI7OoOPW5ZUJCQZic_eCD6ik4EXu?usp=sharing
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Ya - telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	100	Laporan Kinerja BPBL Ambon telah memberikan info atas penggunaan sumber daya	Laporan Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/14eiONa2Kje8xKGIv5d5EM261x4FUJ69?usp=sharing
10	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	Ya - Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan nyata (konkrit, bersifat konstruktif/memperbaiki) dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)	100	Laporan Kinerja BPBL Ambon telah memberikan informasi atas rekomendasi perbaikan kinerja	Laporan Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1dvUOKey7NsxjxxFwqAeQNdwyg9Z_UBP?usp=sharing
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya					
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).	Ya - LKj telah ditandatangani oleh pimpinan Tidak	100	Laporan kinerja BPBL Ambon telah ditandatangani oleh Pimpinan.	Laporan Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1pBTGAdefoIrlMVuFgcE6GjCbz0rgvvyE?usp=sharing
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.	a - > 95% pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	100	Seluruh Pegawai BPBL Ambon peduli atas pengukuran kinerja.	Kuisisioner	https://drive.google.com/drive/folders/1K8U0m6U7Rv8-uxwbl9t_091xq4VH4rDf?usp=sharing
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	a - Jika > 95% rekomendasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja (telah ditindaklanjuti)	100	Rekomendasi dalam Laporan Kinerja Berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	LKJ Triwulanan	https://drive.google.com/drive/folders/1mTzVn19L26yM4nDyv1SJ284zIu50Us1Z?usp=sharing
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	a - Jika > 95% terdapat tindak lanjut atas rekomendasi terkait penyesuaian penggunaan anggaran dan/atau tidak terdapat rekomendasi terkait penyesuaian penggunaan anggaran dalam laporan kinerja berkala	100	Laporan kinerja BPBL Ambon telah memuat penyesuaian anggaran	Laporan Kinerja dan RKA	https://drive.google.com/drive/folders/1-umWt2zL3qG_21A9t-oXmD7C8ciktl?usp=sharing

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Jawaban	Nilai	Catatan	Daftar Evidence	Link Evidence
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	a - Jika > 95% terdapat tindak lanjut atas rekomendasi terkait evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja atau tidak terdapat rekomendasi terkait evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dalam laporan kinerja berkala	100	Rekomendasi dalam Laporan kinerja telah ditindaklanjuti	Laporan Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1z09prDMKe1gRD-aBG6my5daBsYB3T98?usp=sharing
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	a - Jika > 95% terdapat tindak lanjut atas rekomendasi terkait penyesuaian perencanaan kinerja atau tidak terdapat rekomendasi terkait penyesuaian perencanaan kinerja dalam laporan kinerja berkala	100	Rekomendasi untuk penyesuaian anggaran BPBL Ambon telah dilakukan	Laporan Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1c0bz8oIKuxtXkiigJb_RVomtTefBVF7?usp=sharing
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	a - Jika > 95% terdapat tindak lanjut atas rekomendasi terkait perubahan budaya kinerja organisasi kinerja atau tidak terdapat rekomendasi terkait perubahan budaya kinerja organisasi dalam laporan kinerja berkala	100	Rekomendasi perubahan budaya kerja telah dilakukan	Laporan Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1uOSO_icoB12FxxTniumzIA-Hl3X5aK3G?usp=sharing
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL					
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan					
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	Ya - jika terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	100	Pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mengacu pada pedoman evaluasi AKIP 2024 dari Inspektorat Jenderal KKP	Pedoman Evaluasi AKIP tahun 2024 lingkup Kementerian Kelautan Perikanan	https://drive.google.com/drive/folders/1pqYINZjagfGUw0zYbkb0OvHagnUcWry2?usp=sharing
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.	Ya - jika telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja level II	100	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja.	Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1jzIB7q2Nhu9MGsx18it6j2A21-Nh-OF?usp=sharing
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.	Ya - jika telah dilaksanakan secara berjenjang Tidak, jika belum dilaksanakan secara	100	Telah dilakukan Evaluasi Penilaian Kinerja organisasi dan individu pegawai BPBL Ambon.	PM SAKIP 2023 hasil pengisian PM SAKIP 2024, penilaian SKP 2023 - 2024, LKE Kinerjaku	https://drive.google.com/drive/folders/1yuyw79Gelyjv48H4ceryZU-qeQ6Ol-q?usp=sharing
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai					
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.	Ya - jika telah dilaksanakan sesuai pedoman Tidak, jika belum dilaksanakan sesuai pedoman	100	Evaluasi AKIP telah dilaksanakan sesuai Pedoman Evaluasi AKIP 2024	Pedoman Evaluasi AKIP tahun 2024 lingkup Kementerian Kelautan Perikanan	https://drive.google.com/drive/folders/1TLF0BCvUdWfYSR_1LCJkT2K9D0dD3dl?usp=sharing
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.	a - Jika terdapat tim yang disahkan Pimpinan Satker dan seluruh personil merupakan SDM yang memadai yaitu jika telah memiliki sertifikat diklat/workshop/ bimtek/pelatihan tentang AKIP atau memiliki pengalaman sebagai tim pengelolaan kinerja minimal selama 2 (dua) tahun	100	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di BPBL Ambon dilaksanakan oleh Tim Pengelola Manajemen Kinerja yang bersertifikat dan sudah terlibat dalam pengawasan AKIP minimal selama 2 tahun	Surat tugas Tim SAKIP 2024 dan Sertifikat APIP	https://drive.google.com/drive/folders/1j8R15KF5sdHh9R3XIM7U7yl7iBVkNSJ?usp=sharing
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.	Ya - jika Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilakukan dengan pendalaman yang memadai, yaitu jika dilakukan evaluasi dokumen, pengujian lapangan, dan pengujian kebenaran atas pembuktian di lapangan melalui reviu/wawancara	100	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilakukan pendalaman yang memadai oleh eselon I.	Laporan Evaluasi	https://drive.google.com/drive/folders/1bAJBer343CR_OuqnqUv5lDyEmc7PRABm?usp=sharing
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).	a - Jika Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) di seluruh komponen (Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi)	100	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Aplikasi.	Screen shoot aplikasi kinerjaku	https://drive.google.com/drive/folders/1Zr6WyxTFTVMe6HXiku261QIzX-P_QT?usp=sharing
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja					
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.	a - Jika > 95% rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti	100	Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.	Laporan hasil evaluasi PM SAKIP dan data dukung tindak lanjut	https://drive.google.com/drive/folders/1a0pyfAgMR1SyyGvghtbMdelG-sa6WKBBe?usp=sharing
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.	a - Jika terdapat peningkatan implementasi SAKIP	100	Tidak terdapat peningkatan implementasi SAKIP	PM SAKIP 2022 dan PM SAKIP 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1VHyzp7yLud9BYIBSWM1JrCu_1ifnbmH?usp=sharing
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	a - Jika > 95% Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	100	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	NPSS tahun 2022, 2023 dan smartt DJA	https://drive.google.com/drive/folders/1zmAHKftkvm6B4AkGoE5znfQAU3w9lYp?usp=sharing
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	a - Jika > 95% Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	100	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	NKA tahun 2022 dan 2023	https://drive.google.com/drive/folders/14Kkt4jW7DpqTTuWu0ikndPOfI0pV?usp=sharing
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	a - Jika > 95% hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja	100	Rekonsiliasi kinerja telah dilakukan oleh eselon I DJPB, dan tidak semua IKU 2022 dapat dibandingkan dengan IKU 2023.	1. Screenshoot kinerjaku 2022 dan 2023 2. Laporan Kinerja Tahunan 2022 dan 2023 3. Hasil Penilaian SAKIP 2022 dan 2023 4. Uraian perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1dImX7yMktoiEb676A5Gbc3PiGmE-POxy?usp=sharing



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.102/DJPB.1/HP.620/I/2025 6 Januari 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB" Triwulan IV Tahun 2024

Yth. Kepala Satker lingkup DJPB

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan IV Tahun 2024, bersama ini disampaikan capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB" sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 (Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh satker sampai dengan 31 Desember 2024 (Triwulan IV Tahun 2024).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga periode Triwulan I Tahun 2024 lingkup DJPB sebesar 93,94% (tuntas 790 dari 841 rekomendasi).
3. Data capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing Satker disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sesditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Lampiran Surat Dinas
Nomor : B.102/DJPB.1/HP.620/I/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

Data Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP"
Triwulan IV Tahun 2024

No	Unit Kerja	Capaian IKU
1	Setditjen Perikanan Budi Daya	93,94%
2	Direktorat Ikan Air Laut	92,68%
3	Direktorat Rumput Laut	100,00%
4	Direktorat Ikan Air Tawar	93,94%
5	Direktorat Ikan Air Payau	93,94%
6	BBPBAP Jepara	82,43%
7	BBPBL Lampung	100,00%
8	BBPBAT Sukabumi	100,00%
9	BPBAP Situbondo	87,72%
10	BPBAP Takalar	100,00%
11	BPBAT Sungai Gelam	90,00%
12	BPBAT Mandiangin	100,00%
13	BPBL Batam	100,00%
14	BPBL Lombok	100,00%
15	BPBL Ambon	100,00%
16	BPBAP Ujung Batee	100,00%
17	BPBAT Tatelu	100,00%
18	BLUPPB Karawang	91,46%
19	BPIUUK Karangasem	100,00%
20	BPKIL Serang	100,00%

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sesditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	154	032	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
2	035	032	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	Nilai	100.00	100.00	93.99	97.72	100.00	99.92	100.00	98.56	100%	0.00	98.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.80	9.77	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		97.91				100.00				
3	020	032	567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	Nilai	100.00	88.05	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.21	100%	0.00	98.21
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.21	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.03		100.00				100.00				
4	038	032	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	Nilai	100.00	89.92	97.57	100.00	100.00	99.12	100.00	97.91	100%	0.00	97.91
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.49	19.51	10.00	10.00	9.91	25.00				
					Nilai Aspek	94.96		99.17				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

5	086	032	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	Nilai	100.00	83.86	100.00	100.00	100.00	100.00	97.58	100%	0.00	97.58	
					Bobot	10	15	20	10	10	10					25
					Nilai Akhir	10.00	12.58	20.00	10.00	10.00	10.00					25.00
					Nilai Aspek	91.93		100.00								100.00
6	061	032	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	Nilai	100.00	84.75	99.37	97.00	100.00	99.25	97.21	100%	0.00	97.21	
					Bobot	10	15	20	10	10	10					25
					Nilai Akhir	10.00	12.71	19.87	9.70	10.00	9.93					25.00
					Nilai Aspek	92.38		98.91								100.00
7	001	032	567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	Nilai	100.00	77.23	99.54	100.00	100.00	95.26	96.02	100%	0.00	96.02	
					Bobot	10	15	20	10	10	10					25
					Nilai Akhir	10.00	11.58	19.91	10.00	10.00	9.53					25.00
					Nilai Aspek	88.62		98.70								100.00
8	129	032	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	Nilai	100.00	75.82	98.16	99.00	100.00	100.00	95.91	100%	0.00	95.91	
					Bobot	10	15	20	10	10	10					25
					Nilai Akhir	10.00	11.37	19.63	9.90	10.00	10.00					25.00
					Nilai Aspek	87.91		99.29								100.00
9	137	032	567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	Nilai	100.00	87.46	92.12	95.43	98.90	98.47	95.82	100%	0.00	95.82	
					Bobot	10	15	20	10	10	10					25
					Nilai Akhir	10.00	13.12	18.42	9.54	9.89	9.85					25.00
					Nilai Aspek	93.73		96.23								100.00
10	136	032	567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	Nilai	100.00	86.60	90.56	98.00	100.00	94.02	95.30	100%	0.00	95.30	
					Bobot	10	15	20	10	10	10					25
					Nilai Akhir	10.00	12.99	18.11	9.80	10.00	9.40					25.00
					Nilai Aspek	93.30		95.64								100.00



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

11	017	032	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	Nilai	80.00	84.67	97.75	100.00	100.00	100.00	100.00	95.25	100%	0.00	95.25
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	12.70	19.55	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	82.34			99.44			100.00				
12	179	032	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	Nilai	100.00	80.77	88.29	94.80	100.00	98.78	100.00	94.13	100%	0.00	94.13
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.12	17.66	9.48	10.00	9.88	25.00				
					Nilai Aspek	90.39			95.47			100.00				
13	128	032	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	Nilai	100.00	68.10	94.65	92.67	100.00	97.87	100.00	93.20	100%	0.00	93.20
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.22	18.93	9.27	10.00	9.79	25.00				
					Nilai Aspek	84.05			96.30			100.00				
14	045	032	567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	Nilai	100.00	93.22	94.14	98.00	100.00	100.00	70.83	90.32	100%	0.00	90.32
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.98	18.83	9.80	10.00	10.00	17.71				
					Nilai Aspek	96.61			98.04			70.83				
15	175	032	632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	100.00	37.31	97.60	96.62	99.64	92.31	100.00	88.97	100%	0.00	88.97
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.60	19.52	9.66	9.96	9.23	25.00				
					Nilai Aspek	68.66			96.54			100.00				
16	009	032	329088	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	73.56	70.67	0.00	0.00	100.00	100.00	70.17	80%	0.00	87.71
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.03	14.13	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	86.78			85.34			100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

17	017	032	129124	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	62.35	60.55	100.00	100.00	100.00	100.00	86.46	100%	0.00	86.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.35	12.11	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	81.18		90.14				100.00				
18	185	032	691247	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	94.11	50.00	0.00	0.00	99.56	100.00	69.07	80%	0.00	86.34
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.12	10.00	0.00	0.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	97.06		74.78				100.00				
19	030	032	049098	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	66.70	68.90	0.00	0.00	100.00	100.00	68.79	80%	0.00	85.98
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.01	13.78	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.35		84.45				100.00				
20	038	032	239139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	42.97	68.99	100.00	100.00	100.00	100.00	85.24	100%	0.00	85.24
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.45	13.80	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	71.49		92.25				100.00				
21	136	032	199138	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	37.49	67.53	100.00	100.00	99.84	100.00	84.11	100%	0.00	84.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.62	13.51	10.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	68.75		91.84				100.00				
22	123	032	079137	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	65.61	62.00	0.00	0.00	95.83	100.00	66.82	80%	0.00	83.53
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.84	12.40	0.00	0.00	9.58	25.00				
					Nilai Aspek	82.81		78.92				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

23	016	032	269121	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	50.58	69.33	0.00	0.00	99.89	100.00	66.44	80%	0.00	83.05
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.59	13.87	0.00	0.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	75.29		84.61				100.00				
24	039	032	249170	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	60.32	61.96	0.00	0.00	99.53	100.00	66.39	80%	0.00	82.99
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.05	12.39	0.00	0.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	80.16		80.75				100.00				
25	134	032	039164	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	80.28	65.16	0.00	0.00	84.11	88.33	65.57	80%	0.00	81.96
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.04	13.03	0.00	0.00	8.41	22.08				
					Nilai Aspek	90.14		74.64				88.33				
26	061	032	219099	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	45.64	77.87	0.00	0.00	80.26	100.00	65.45	80%	0.00	81.81
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.85	15.57	0.00	0.00	8.03	25.00				
					Nilai Aspek	72.82		79.07				100.00				
27	037	032	229111	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	54.78	58.18	0.00	0.00	100.00	100.00	64.85	80%	0.00	81.07
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.22	11.64	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.39		79.09				100.00				
28	001	032	069146	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	36.95	72.99	0.00	0.00	94.66	100.00	64.61	80%	0.00	80.76
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.54	14.60	0.00	0.00	9.47	25.00				
					Nilai Aspek	68.48		83.83				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

29	014	032	119142	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	27.88	56.69	100.00	100.00	100.00	100.00	80.52	100%	0.00	80.52
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.18	11.34	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.94		89.17				100.00				
30	178	032	340151	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	36.77	67.33	0.00	0.00	100.00	100.00	63.98	80%	0.00	79.98
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.52	13.47	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	68.39		83.67				100.00				
31	012	032	109132	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	36.89	72.59	0.00	0.00	88.52	100.00	63.90	80%	0.00	79.88
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.53	14.52	0.00	0.00	8.85	25.00				
					Nilai Aspek	68.45		80.56				100.00				
32	051	032	189144	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	36.47	67.29	0.00	0.00	95.57	100.00	63.49	80%	0.00	79.36
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.47	13.46	0.00	0.00	9.56	25.00				
					Nilai Aspek	68.24		81.43				100.00				
33	042	032	139139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	35.37	64.34	0.00	0.00	100.00	100.00	63.17	80%	0.00	78.97
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.31	12.87	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	67.69		82.17				100.00				
34	008	032	099326	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	35.17	64.28	0.00	0.00	99.72	100.00	63.10	80%	0.00	78.88
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.28	12.86	0.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	67.59		82.00				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

35	020	032	299396	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	25.99	69.82	0.00	0.00	100.00	100.00	62.86	80%	0.00	78.58
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.90	13.96	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.00		84.91				100.00				
36	095	032	029173	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	Nilai	100.00	39.97	54.03	0.00	0.00	90.43	100.00	60.84	80%	0.00	76.06
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.00	10.81	0.00	0.00	9.04	25.00				
					Nilai Aspek	69.99		72.23				100.00				
37	175	032	019063	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	33.98	71.27	0.00	0.00	99.74	86.00	60.83	80%	0.00	76.03
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.10	14.25	0.00	0.00	9.97	21.50				
					Nilai Aspek	66.99		85.51				86.00				
38	010	032	089144	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	15.35	66.14	0.00	0.00	100.00	100.00	60.53	80%	0.00	75.66
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.30	13.23	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	57.68		83.07				100.00				
39	060	032	209118	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	31.29	53.94	0.00	0.00	100.00	100.00	60.48	80%	0.00	75.60
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.69	10.79	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	65.65		76.97				100.00				
40	065	032	339097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	12.50	69.93	0.00	0.00	87.50	100.00	59.61	80%	0.00	74.51
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	1.88	13.99	0.00	0.00	8.75	25.00				
					Nilai Aspek	56.25		78.72				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

41	049	032	179114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	12.50	60.30	0.00	0.00	100.00	100.00	58.94	80%	0.00	73.67
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	1.88	12.06	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	56.25		80.15				100.00				
42	135	032	059191	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	28.55	59.20	0.00	0.00	100.00	88.33	58.21	80%	0.00	72.76
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.28	11.84	0.00	0.00	10.00	22.08				
					Nilai Aspek	64.28		79.60				88.33				
43	043	032	149125	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	32.03	53.88	0.00	0.00	0.00	100.00	50.58	70%	0.00	72.26
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.80	10.78	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	66.02		53.88				100.00				
44	046	032	169125	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	27.88	52.92	0.00	0.00	100.00	88.33	56.85	80%	0.00	71.06
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.18	10.58	0.00	0.00	10.00	22.08				
					Nilai Aspek	63.94		76.46				88.33				
45	045	032	159119	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	18.94	50.00	0.00	0.00	100.00	88.33	54.92	80%	0.00	68.65
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.84	10.00	0.00	0.00	10.00	22.08				
					Nilai Aspek	59.47		75.00				88.33				
46	012	032	237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	Nilai	100.00	72.60	98.12	94.40	99.15	97.63	0.00	69.63	100%	1.00	68.63
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.89	19.62	9.44	9.92	9.76	0.00				
					Nilai Aspek	86.30		97.32				0.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

47	015	032	309171	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	22.11	64.69	0.00	0.00	100.00	65.00	52.50	80%	0.00	65.63
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.32	12.94	0.00	0.00	10.00	16.25				
					Nilai Aspek	61.06		82.35				65.00				
48	062	032	289113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	28.40	75.00	0.00	0.00	100.00	30.00	46.76	80%	0.00	58.45
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.26	15.00	0.00	0.00	10.00	7.50				
					Nilai Aspek	64.20		87.50				30.00				
49	050	032	319099	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	35.77	64.75	0.00	0.00	0.00	30.00	35.82	70%	0.00	51.17
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.37	12.95	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	67.89		64.75				30.00				
50	063	032	259108	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	25.26	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	25.88	70%	0.00	36.97
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.79	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	62.63		60.44				0.00				

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

[Download Excel](#)

Tampilkan 10 entri

Cari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	85,93	100,00	85,71	15,75

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya **1** Selanjutnya



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.169/DJPB.1/TU.210/I/2025 8 Januari 2025
Sifat : Penting
Lampiran : Dua Lembar
Hal : Tingkat Kepatuhan PBJ
Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya TA. 2024

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya TA. 2024 bersama ini disampaikan capaian IKU tingkat kepatuhan PBJ lingkup DJPB TA. 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada masing-masing satker lingkup DJPB dengan parameter yang telah ditetapkan antara lain:
 - a. Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis;
 - b. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan;
 - c. Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE;
 - d. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan;
 - e. Laporan Penyelenggaraan PBJ; dan
 - f. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Eselon I triwulan I s.d triwulan III tahun 2022.
2. Berdasarkan hasil evaluasi tingkat kepatuhan PBJ lingkup DJPB mencapai nilai rata-rata sebesar 82,24 % atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 80% adapun rincian capaian tingkat kepatuhan PBJ dari masing-masing satker disampaikan pada lampiran 2.
3. Terkait pencapaian tersebut terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk pencapaian IKU dimaksud pada tahun berikutnya antara lain:
 - a. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa paling lambat pada triwulan I tahun berjalan;

- b. Melakukan pengendalian atas perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan pengadaan barang/jasa melalui pemenuhan form realisasi pengendalian dalam MR untuk selanjutnya melaporkan secara periodik kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Gemi Triastutik

Tembusan:

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Lampiran Surat Dinas

Nomor : B.169/DJPB.1/TU.210/I/2025

Tanggal : 8 Januari 2025

1. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
2. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
3. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
4. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
5. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
6. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
7. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam
8. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
9. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
10. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
11. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
12. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
13. Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang
14. Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekekangan Karangasem
15. Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Gemi Triastutik

Lampiran Surat Dinas

Nomor : B.169/DJPB.1/TU.210/I/2025

Tanggal : 8 Januari 2025

Nilai IKU Kepatuhan PBJ

No	SATKER	Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis	Perencanaan dan Persiapan Pengadaan	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE	Kesesuaian Tahap Pelaksanaan	Laporan Penyelenggaraan PBJ	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Eselon I triwulan I s.d triwulan III tahun 2022	NILAI
1	SEKRETARIAT DJTJEN PB	7,37	15	10	31,14	4,43	15	82,94
2	BBPBAT SUKABUMI	5,97	15	10	32,54	3,03	15	81,54
3	BBPBAP JEPARA	7,21	15	10	31,3	4,27	15	82,78
4	BBPBL LAMPUNG	6,13	15	10	32,38	3,19	15	81,7
5	BPBAT MANDIANGIN	7,22	15	10	31,29	4,28	15	82,79
6	BPBAT SUNGAI GELAM	6,12	15	10	32,39	3,18	15	81,69
7	BPBAT TATELU	7,12	15	10	31,39	4,18	15	82,69
8	BPBAP TAKALAR	6,22	15	10	32,29	3,28	15	81,79
9	BPBAP SITUBONDO	7,27	15	10	31,24	4,33	15	82,84
10	BPBAP UJUNG BATEE	6,07	15	10	32,44	3,13	15	81,64
11	BPBL AMBON	7,32	15	10	31,19	4,38	15	82,89
12	BPBL LOMBOK	6,02	15	10	32,49	3,08	15	81,59
13	BPBL BATAM	7,3	15	10	31,21	4,36	15	82,87

14	BLUPPB KARAWANG	6,04	15	10	32,47	3,1	15	81,61
15	BPIU2K KARANG ASEM	6	15	10	32,51	3,06	15	81,57
16	BPKIL SERANG	7,34	15	10	31,17	4,4	15	82,91
								82,24

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.235/DJPB.1/TU.210/I/2025 10 Januari 2025
Sifat : Segera
Hal : IKU Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
Tahun 2024

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya TA. 2024 bersama ini disampaikan capaian IKU tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup DJPB TA. 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada masing-masing satker lingkup DJPB dengan parameter yang telah ditetapkan antara lain:
 - a. Dokumen RKBMN Tahun 2024 dan tingkat pemanfaatan dalam penyusunan RKA-K/L Tahun 2024;
 - b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan III TA. 2024 ke Pengguna Barang;
 - c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat ke Pengguna Barang sampai dengan Triwulan III pada TA. 2024;
 - d. Penggunaan BMN hasil pengadaan Belanja modal TA. 2023 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian;
 - e. Penyusunan/Penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) Secara Tepat Waktu
2. Berdasarkan hasil evaluasi tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup DJPB mencapai nilai rata-rata sebesar 87,5% atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 80%, adapun rincian capaian tingkat kepatuhan pengelolaan BMN dari masing-masing satker disampaikan pada lampiran.
3. Terkait pencapaian tersebut terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk pencapaian IKU dimaksud pada tahun berikutnya antara lain:

- a. peningkatan pemanfaatan RKBMN pada saat penyusunan RKAKL.
- b. Melakukan Inventarisasi BMN untuk percepatan penghapusan BMN dan pengajuan Penghapusan BMN melalui Aplikasi SIMAN v2.
- c. Kepala UPT lingkup DJPB selaku KPB segera mengusulkan permohonan Penetapan Status Penggunaan atas BMN hasil pengadaan belanja modal sesuai ketentuan yang berlaku.

NO	SATKER	BOBOT MAKSIMAL PARAMETER DITETAPKAN					NILAI
		a	b	c	d	e	
		12.5	25	25	25	12.5	
1	SEKRETARIAT	10.2	12	25	25	12.5	84.7
2	BBPBAT SUKABUMI	10	15	25	25	12.5	87.5
3	BBPBAP JEPARA	10	15	25	25	12.5	87.5
4	BBPBL LAMPUNG	10.3	17	25	25	12.5	89.8
5	BPBAT MANDIANGIN	10.5	16	24.5	25	12.5	88.5
6	BPBAT SUNGAI GELAM	10.4	14	23.5	25	12.5	85.4
7	BPBAT TATELU	10.1	15	25	25	12.5	87.6
8	BPBAP TAKALAR	10.3	15	25	25	12.5	87.8
9	BPBAP SITUBONDO	10.5	13	23	25	12.5	84
10	BPBAP UJUNG BATEE	10.4	16	25	25	12.5	88.9
11	BPBL AMBON	10.1	15	25	25	12.5	87.6
12	BPBL LOMBOK	10.4	16	25	25	12.5	88.9
13	BPBL BATAM	10	15	25	25	12.5	87.5
14	BLUPPB KARAWANG	10.3	17	25	25	12.5	89.8
15	BPIU2K KARANG ASEM	10.5	15	24	25	12.5	87
16	BPKIL SERANG	10	15	25	25	12.5	87.5

Berdasarkan hasil evaluasi tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN DJPB mencapai target 87,5%.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

Tembusan:

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Lampiran Surat Dinas
Nomor : B.235/DJPB.1/TU.210/I/2025
Tanggal : 10 Januari 2025

DAFTAR NAMA PEJABAT YANG MENERIMA SURAT

1. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
2. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
3. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
4. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
5. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
6. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
7. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam
8. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
9. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
10. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
11. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
12. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
13. Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang
14. Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekeurangan Karangasem
15. Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik



DATA DUKUNG

Triwulan IV_2024

**RASIO JUMLAH PEMBERITAAN NETRAL
DAN POSITIF TERHADAP TOTAL
PEMBERITAAN TENTANG SUB-SEKTOR
PERIKANAN BUDIDAYA**

Disusun Oleh:
Tim Kinerja
Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

LAPORAN CAPAIAN RASIO JUMLAH PEMBERITAAN NETRAL DAN POSITIF TERHADAP TOTAL PEMBERITAAN TENTANG SUB-SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA TRIWULAN IV TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Secara umum komunikasi adalah proses pemindahan berita atau pesan dari seorang ke penerima dengan tujuan untuk mengubah perilaku atau keputusan si penerima pesan. Dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama dengan berbagai media untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk pemberitaan program – program kebijakan perikanan budidaya telah menyusun publikasi dalam bentuk rilis media dan konten infografis dengan mengangkat pemberitaan keberhasilan program perikanan budidaya di masyarakat.

Penyebaran informasi sector perikanan budidaya yang selama ini dilaksanakan adalah bentuk dokumentasi dan peliputan kegiatan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya bersama Menteri Kelautan dan Perikanan maupun Tim Komisi IV DPR RI serta stakeholder lainnya. Kegiatan ini dilakukan di berbagai lokasi perikanan budidaya maupun Unit Pelaksana Teknis lingkup DJPB dalam rangka mensosialisasikan program prioritas perikanan budidaya.

Selain pemberitaan yang berasal dari internal Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, pengumpulan pemberitaan sub sector perikanan budidaya juga diperoleh dari informasi atau berita media online yang memuat berita sub sector perikanan budidaya secara umum sehingga informasi yang diperoleh dapat dijadikan bahan inputan bagi peningkatan kualitas pemberitaan perikanan budidaya dalam mendukung kemajuan program kebijakan sector perikanan dan kelautan.

II. DESKRIPSI TONE BERITA

Media Relations menurut Dian Wardhani (2008:1) adalah aktivitas komunikasi public relations/humas untuk menjalin hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian pengertian serta dukungan dalam bentuk publikasi organisasi yang maksimal dan balance (berimbang). Adapun pendapat Lesly dalam Yosol (2011:29) mengatakan media relations sangat berhubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap organisasi. Dengan itu sebuah instansi harus memiliki hubungan media relations yang baik agar mendapat pemberitaan yang baik untuk instansinya.

Perkembangan media massa yang sangat pesat ini mempengaruhi kegiatan media relations yang dijalankan oleh instansi pemerintahan maupun swasta. Adapun kegiatan yang dilakukan Public Relations Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain mengamati perkembangan media, target sasaran, dan isu – isu yang berkembang di masyarakat agar dapat menentukan strategi media relations yang tepat untuk organisasinya.

Menurut standar analisis humas pada media tradisional yang dikeluarkan Institute for Public Relations (2012) Tone berita adalah penilaian yang dilakukan setelah membaca keseluruhan artikel (Eisenmann, 2012). Menurut Stacks (2006), tone mengukur apa yang dirasakan oleh target audiens tentang individu, perusahaan, produk atau topik, setelah membaca/melihat/mendengar berita di media massa. Tone biasanya terbagi atas positif, netral/balanced, dan negatif. Berikut indikator penentuan sebuah tone (Eisenmann, 2012):

Tabel 1. Deskripsi Tone Berita

No.	Tone Pemberitaan	Deskripsi
1.	Positif	Peliputan media membuat pembaca mendukung, merekomendasikan, dan/atau bersedia bekerjasama dengan perusahaan/brand
2.	Netral	Peliputan media tidak mengandung sentimen tertentu, hanya melaporkan fakta yang ada. Dalam pemberitaan yang negatif, sebuah artikel bisa saja netral jika hanya menyuguhkan fakta tanpa ada komentar editorial. Jika perusahaan/brand berada dalam kondisi yang tidak baik, paling tidak perusahaan/brand berupaya mendapatkan peliputan yang netral.
3.	Negatif	Peliputan media membuat pembaca tidak mau mendukung dan bekerjasama dengan perusahaan/brand.
4.	Balanced (Berimbang)	Hasil dari tone secara keseluruhan adalah berimbang.

III. RASIO JUMLAH PEMBERITAAN YANG NETRAL DAN POSITIF DIBANDING TOTAL PEMBERITAAN TENTANG SUB-SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA TRIWULAN IV 2024

1. Publikasi yang dilakukan bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan kehumasan yang dilakukan oleh Bagian Program, Data dan Informasi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon agar mampu berperan sebagai media pemberi informasi terhadap kebijakan maupun keberhasilan BPBL Ambon kepada masyarakat pembudidaya;
2. Capaian keberhasilan pencapaian ini didorong oleh gencarnya publikasi kegiatan BPBL Ambon yang bernilai positif dengan dilakukan penyebaran konten informasi teknis maupun kegiatan prioritas yang di upload pada kanal media BPBL

Ambon sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh terwujudnya pemberitaan positif sub sector perikanan budidaya di masyarakat;

3. Pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang sub sektor perikanan budidaya merupakan jumlah pemberitaan tentang perikanan budidaya yang dimuat di media massa baik lokal maupun nasional;
4. Realisasi rasio jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang sub sektor Perikanan Budidaya Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 100 % dimana pemberitaan sub sector perikanan budidaya yang berhasil dikumpulkan memiliki tendensi isu positif.
5. Keberhasilan capaian ini menunjukkan semakin membaiknya pemberitaan perikanan budidaya di berbagai media baik cetak maupun online.

IV. JUMLAH PEMBERITAAN PERIKANAN BUDIDAYA DENGAN TONE NETRAL DAN POSITIF SELAMA BULAN DESEMBER 2024

No.	Sumber Isu	Tanggal	Pernyataan	Kecenderungan (Positif atau Negatif)	Narasumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	https://www.antaraneews.com/berita/4543066/bnpt-upayakan-peningkatan-perekonomian-mitra-deradikalisasi-di-daerah	21 Desember 2024	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan dan badan usaha milik negara mengupayakan peningkatan perekonomian mitra deradikalisasi di daerah, seperti di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. "Kami memberikan bantuan berupa benih ikan lebih kurang 100.000 ekor ikan nila merah kepada Keramba Tirtamina yang merupakan mitra deradikalisasi. Kami juga berkolaborasi memberikan tali asih berupa bantuan dari BRI dalam rangka meningkatkan pelatihan untuk pengembangan ekonomi mikro, kecil, dan menengah," kata Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono	Positif	Pewartar: Rio Feisal Editor: Didik Kusbiantoro
2	https://www.antaraneews.com/berita/4534114/kkp-produk-perikanan-indonesia-diterima-140-negara-sepanjang-2024	17 Desember 2024	Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ishartini menyatakan bahwa produk perikanan	Positif	Pewartar: Muhammad Harianto Editor: Biqwanto Situmorang

			Indonesia diterima di 140 negara selama periode Januari hingga Oktober 2024. "Produk perikanan Indonesia diterima di 140 negara sepanjang tahun 2024. Kinerja baik ini tak lepas dari peran Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan mutu hasil perikanan memenuhi standar internasional,"		
3	https://www.antarane.ws.com/berita/4527919/menteri-trenggono-pastikan-implementasi-ekonomi-biru-bebas-korupsi	13 Desember 2024	Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan peringatan kepada seluruh jajarannya agar implementasi program-program ekonomi biru bebas dari praktik korupsi. "Tata kelola yang baik dan bersih menjadi salah satu modal untuk memastikan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan termasuk program Blue Economy terlaksana dengan baik, mencapai sasaran yang diharapkan,"	Positif	Pewartas: Muhammad Harianto Editor: Abdul Hakim Muhiddin
4	https://www.antarane.ws.com/berita/4520512/kkp-mengembangkan-desaperikanan-cerdas-di-bitung-untuk-eduwisata	09 Desember 2024	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan program Smart Fisheries Village (SFV) atau Desa Perikanan Cerdas	Positif	Pewartas: Muhammad Harianto Editor: Faisal Yunianto

			<p>untuk eduwisata bahari di Bitung, Sulawesi Utara.</p> <p>“SFV tempat kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan inkubasi bisnis secara terpadu, ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, komunitas pekerja, melestarikan lingkungan, dan menerapkan teknologi digital,”</p>		
5	https://www.antaraneews.com/berita/4520095/kkp-jelaskan-potensi-dan-kebijakan-pengembangan-perikanan-budi-daya	09 Desember 2024	<p>Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Siti Fatimah menjelaskan potensi yang dimiliki sektor akuakultur Indonesia serta kebijakan untuk mengatasi tantangan terkait pengembangan perikanan budi daya.</p> <p>"Kita memiliki potensi lahan cukup besar dimana di sini lahan perikanan budi daya masih luas 17,91 juta hektare dengan potensi pengembangan yang besar. Karena tingkat pemanfaatan lahan baru mencapai 5,35 persen,"</p> <p>Di samping potensi lahan budi daya yang luas, Siti menjelaskan Indonesia memiliki komoditas perikanan ekspor unggulan serta untuk menjadi penopang ketahanan pangan dalam negeri.</p>	Positif	<p>Pewarta: Farhan Arda Nugraha</p> <p>Editor: Triono Subagyo</p>

V. JUMLAH PEMBERITAAN PERIKANAN BUDIDAYA DENGAN TONE NETRAL DAN POSITIF SELAMA BULAN NOVEMBER 2024

No.	Sumber Isu	Tanggal	Pernyataan	Kecenderungan (Positif atau Negatif)	Narasumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	https://www.antaraneews.com/berita/4505229/menteri-kkp-revitalisasi-tambak-pantura-dilakukan-secara-bertahap	2 Desember 2024	<p>Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan program Revitalisasi Tambak Pantai Utara Jawa (Pantura) dilakukan secara bertahap. "KKP sendiri akan merevitalisasi 78 ribu hektare tambak kurang produktif di empat provinsi mulai dari Provinsi Banten hingga Jawa Timur. Revitalisasi akan dimulai pada tahun 2025 dan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2029," ujar Trenggono di Karawang, Jawa Barat pada Senin.</p> <p>Dia menambahkan, salah satu komoditas yang akan dibudidayakan adalah ikan nila salin.</p> <p>Ikan nila menjadi salah satu komoditas perikanan budidaya prioritas nasional yang dikembangkan, karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi untuk mencukupi kebutuhan pasar, baik dalam maupun luar</p>	Positif	Pewartu: Aji Cakti Editor: Faisal Yunianto

			<p>negeri, dan mendukung program ketahanan pangan nasional.</p> <p>Produksi ikan nila Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 1,37 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 5,4 persen per tahun. Hasil produksi tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri dan ekspor.</p>		
2	https://www.antaraneews.com/berita/4505173/kkp-modeling-kawasan-tambak-bins-karawang-jadi-penyuplai-protein-ikan	2 Desember 2024	<p>Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan <i>modeling</i> kawasan tambak Budi daya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang, Jawa Barat menjadi salah satu penyuplai protein ikan.</p> <p>"<i>Modeling</i> kawasan tambak Budi Daya Ikan Nila Salin Karawang menjadi salah satu penyuplai protein ikan serta dapat memberikan lapangan kerja bagi para masyarakat sekitar," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono di Karawang, Jawa Barat pada Senin.</p> <p>Dalam rangka mendukung ketahanan pangan serta program prioritas Makan Bergizi Gratis, Kementerian Kelautan dan Perikanan melanjutkan pelaksanaan program prioritas berbasis ekonomi biru</p>	Positif	Pewarta: Aji Cakti Editor: Faisal Yunianto

			<p>yang sudah dijalankan oleh KKP dengan mengedepankan ekologi dan keberlanjutan. <i>Modeling</i> tambak BINS Karawang diharapkan dapat menggenjot produktivitas perikanan untuk mendukung Asta Cita Presiden terkait Swasembada Pangan serta pemerataan ekonomi dan Makan Bergizi Gratis dengan protein ikan.</p>		
3	https://www.antarane.ws.com/berita/4499305/koperasi-nelayan-dukung-penuh-kebijakan-tata-kelola-lobster-terbaru	28 November 2024	<p>Ketua Koperasi Putra Lautan Deni Triana Putra mendukung penuh kebijakan tata kelola lobster yang diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 7 Tahun 2024.</p> <p>“Dampaknya para nelayan bisa menangkap benih bening lobster (BBL) dengan rasa aman dan nyaman, karena tidak melanggar peraturan,” ujar Deni, di Jakarta, Kamis. Praktik ilegal penyelundupan BBL, menurut ketua koperasi yang beranggotakan 400 orang ini, memang sangat merugikan nelayan karena mengancam keberlanjutan ekosistem lobster, selain tidak terdata akan mempengaruhi populasi di alam, sehingga menyulitkan pencarian BBL di masa mendatang.</p>	Positif	<p>Pewartu: Sinta Ambarwati Editor: Budisantoso Budiman</p>

			<p>Untuk memerangi praktik penyelundupan, kata Deni lagi, para nelayan saat ini diharuskan menjadi anggota koperasi. Selanjutnya koperasi yang bergerak membantu nelayan mengurus perizinan berusaha, lalu mengajukan penetapan kuota ke dinas perikanan provinsi melalui dinas kabupaten/kota.</p> <p>Prosedur itu menghasilkan data tangkapan yang akurat dan BBL yang diperdagangkan menjadi jelas asal usulnya. Karena hasil tangkapan dicatat oleh dinas perikanan, dan mendapatkan Surat Keterangan Asal sebagai syarat penjualan benur ke BLU.</p>		
4	https://www.antaraneews.com/berita/4494265/peneliti-brin-budidaya-jadi-solusi-atasi-penurunan-populasi-tuna	26 November 2024	<p>Peneliti Utama Pusat Riset Perikanan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wudianto mengatakan, program mendorong budidaya tuna menjadi solusi strategis untuk mengatasi penurunan populasi tuna di dunia, khususnya di wilayah Pasifik, yang saat ini mengalami overfishing. "Populasi tuna, baik Yellowfin Tuna maupun Bigeye Tuna, sudah menurun drastis karena penangkapan berlebih. Oleh karena itu, budidaya tuna adalah langkah yang sangat baik. Namun, diperlukan teknologi dan riset</p>	Positif	<p>Pewartu: Sinta Ambarwati Editor: Adi Lazuardi</p>

			<p>yang mumpuni untuk mendukung keberhasilannya,” kata Wudianto di Jakarta, Selasa.</p> <p>Pria yang juga anggota Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan ini menilai, budidaya tuna di Indonesia dapat dilakukan dengan dua pendekatan yakni pembesaran (farming) dengan mengambil benih tuna kecil dari alam untuk dibesarkan di keramba laut hingga mencapai ukuran komersial. Serta kedua, breeding yakni mengembangbiakkan tuna dewasa di fasilitas tangki besar, sehingga menghasilkan anakan yang dapat dibudidayakan.</p>		
5	https://www.antaraneews.com/berita/4493077/kkp-dorong-inovasi-teknologi-budi-daya-tuna-demi-kesejahteraan-nelayan	26 November 2024	<p>Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong inovasi teknologi budi daya tuna untuk mendukung keberlanjutan sumber daya laut, meningkatkan pengelolaan tuna sebagai komoditas utama, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.</p> <p>“Teknologi perikanan terus berkembang di berbagai negara, dan Indonesia tidak boleh ketinggalan. Dengan adopsi teknologi yang relevan, kami ingin memastikan bahwa</p>	Positif	<p>Pewartu: Muhammad Harianto Editor: Faisal Yuniarto</p>

			<p>nelayan lokal dapat ikut menikmati manfaat ekonomi secara langsung,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif dalam keterangan di Jakarta, Selasa.</p> <p>Dia menyampaikan bahwa KKP terus mengambil langkah strategis untuk meningkatkan pengelolaan ikan tuna sebagai komoditas utama perikanan nasional.</p>		
--	--	--	---	--	--

VI. JUMLAH PEMBERITAAN PERIKANAN BUDIDAYA DENGAN TONE NETRAL DAN POSITIF SELAMA BULAN OKTOBER 2024

No.	Sumber Isu	Tanggal	Pernyataan	Kecenderungan (Positif atau Negatif)	Narasumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	https://www.antaraneews.com/berita/4433169/djpb-siap-dukung-program-makan-bergizi-melalui-penyediaan-ikan	31 Oktober 2024	<p>Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPB - KKP) siap mendukung program makan bergizi dari Presiden Prabowo Subianto - Wapres Gibran Rakabuming Raka.</p> <p>Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu mengatakan program makan bergizi yang dicanangkan Presiden sangat bagus sekali, selain</p>	Positif	<p>Pewartu: Subagyo Editor: Evi Ratnawati</p>

			<p>sebagai upaya mempersiapkan generasi cerdas juga memerangi stunting yang akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di negeri ini.</p> <p>"Melalui perikanan budidaya berbasis ekonomi biru, tentunya produk hasil budi daya akan dapat selalu terjaga secara kuantitas dan kualitas," ujarnya melalui keterangan di Jakarta, Kamis.</p> <p>Sebagai sektor hulu, lanjutnya perikanan budi daya memiliki peran strategis dalam ekosistem pangan nasional yaitu sebagai penyedia sumber protein hewani yang berkelanjutan.</p> <p>Dikatakannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPB siap meningkatkan produktivitas perikanan budidaya baik dalam bentuk pemberian stimulan program bantuan dan pendampingan serta bimbingan teknis budidaya ikan dengan mendorong para pembudidaya selalu menerapkan CPIB, CBIB dan CPPIB.</p>		
2	https://www.antaraneews.com/berita/4427041/kkp-sebut-pelibatan-masyarakat-lokal-kunci-pengelolaan-konservasi-alam	28 Oktober 2024	<p>Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menyebut pelibatan masyarakat lokal menjadi kunci</p>	Positif	<p>Pewartu: Muhammad Zulfikar</p>

			<p>utama dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional.</p> <p>"KKP menyakini dengan melibatkan masyarakat lokal maka pengelolaan konservasi ini bisa berhasil," kata Kepala LKKPN Pekanbaru, Rahmat Irfansyah di Padang, Senin.</p> <p>Menurut Irfansyah, mengajak dan melibatkan masyarakat yang awalnya pelaku perusak lingkungan untuk beralih menjadi pihak yang mau mengelola kawasan konservasi bukanlah pekerjaan mudah. Sebab, hal tersebut berkaitan erat dengan mata pencaharian masyarakat.</p> <p>Namun, dengan mengedepankan upaya persuasif dan terus mengkampanyekan narasi-narasi positif penyelamatan lingkungan terutama di kawasan perairan nasional, masyarakat yang awalnya merusak lingkungan kini berubah menjadi penyelamat kawasan pesisir.</p>		Editor: Indra Gultom
3	https://www.antaraneews.com/berita/4413109/apri-budi-daya-rajungan-peluang-menuju-keberlanjutan-ekonomi-biru	28 Oktober 2024	Board of Director (BOD) Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI), Wita Setioko menyatakan bahwa budi daya rajungan (<i>Portunus pelagicus</i>) menjadi	Positif	Pewartanya: M Fikri Setiawan Editor: Abdul Hakim Muhiddin

		<p>sebuah peluang yang menjanjikan untuk keberlanjutan dalam menuju "ekonomi biru".</p> <p>"Berdasarkan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengisyaratkan bahwa budi daya menjadi hal untuk menghadapi tantangan serta menciptakan peluang bagi masyarakat untuk ke depannya," katanya dalam keterangan yang diterima di Bogor, Jawa Barat, Senin.</p> <p>Terkait peluang masa depan melalui percobaan pembenihan rajungan melalui kegiatan budi daya itu, kata dia, APRI telah melakukan kegiatan pembenihan rajungan bekerja sama dengan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara di Jawa Tengah untuk dapat melakukan pembenihan rajungan dengan skala yang lebih besar.</p> <p>Dalam kaitan itu, katanya, pemberian "shelter" dan pasir pada saat di kolam pembenihan dalam kegiatan budi daya dapat mengurangi tingkat kanibal rajungan.</p> <p>Karena itu, tambahnya, kegiatan budi daya menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam menjaga stok (rajungan) untuk dapat berkelanjutan.</p>		
--	--	--	--	--

4	https://www.antaraneews.com/foto/4408377/budidaya-kepiting-soka-dengan-keramba-apung-di-banda-aceh#google_vignette	19 Oktober 2024	<p>Warga memperlihatkan kepiting soka (<i>Scylla serrata</i>) hasil panen budidaya keramba apung di desa Lamkuweh, Banda Aceh,</p>	Positif	<p>Pewartu: Syaiful Hakim Editor: Kelik Dewanto</p>
5	https://www.antaraneews.com/berita/4406821/dkp-jabar-lepas-300-lobster-budidaya-lestarikan-guna-siklus-hidup	18 Oktober 2024	<p>Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat melepas 300 ekor lobster hasil budidaya dalam ruangan (stock enhancement) ke laut lepas, guna melestarikan siklus hidup hewan yang jadi komoditas laut unggulan Jabar itu. Pengembangan budidaya lobster dalam ruangan yang dimulai sejak 2020, kata Kepala DKP Jabar Hermansyah, merupakan salah satu upaya Pemprov Jabar untuk menjaga stabilitas populasi lobster.</p> <p>"Kita sudah memulai penelitian dan pengembangan ini sejak 2020, dan Alhamdulillah 2024 ini berhasil dengan merilis atau melepaskan kembali benih lobster ke laut. Memang jumlahnya belum banyak, tapi ini adalah langkah baik untuk masa depan lobster di Jawa Barat," kata Hermansyah dalam keterangan di Bandung, Jumat.</p> <p>Menjaga dan menyelamatkan lobster Jawa Barat dari kepunahan salah satunya dengan</p>	Positif	<p>Pewartu: Ricky Prayoga Editor: Abdul Hakim Muhiddin</p>

			budidaya, dinilai Hermansyah sangat penting, mengingat penangkapan benih lobster di Jabar tergolong masif dan intensif, sehingga dikhawatirkan akan memperpendek siklus hidup lobster.		
--	--	--	--	--	--

VII. PENUTUP

A. Simpulan

1. Capaian adalah rasio jumlah pemberitaan yang netral dan positif total pemberitaan tentang perikanan budidaya;
2. Rasio jumlah pemberitaan positif tentang perikanan budidaya di media online, pada triwulan IV tahun 2024 adalah 100% dimana semua pemberitaan terkait sub sector perikanan budidaya yang berhasil dikumpulkan bernilai tone positif.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian presentase jumlah pemberitaan positif tentang perikanan budidaya triwulan III, telah diperoleh capaian maksimal, Adapun rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kualitas pemberitaan sebagai upaya peningkatan publikasi terkait program prioritas perikanan budidaya;
2. Meningkatkan frekuensi pemberitaan perikanan budidaya baik mencakup teknis maupun non teknis pada berbagai kanal media yang dimiliki sehingga penyebaran informasi dapat dilakukan secara intens dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan fungsi koordinasi dengan berbagai pihak (media) baik local maupun nasional guna membantu meningkatkan sebaran informasi sub sector perikanan budidaya.

Ambon, 14 Januari 2025

Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Sarwono



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
GEDUNG MINA BAHARI IV LANTAI 5, 6, 7 DAN 8
TELEPON (021) 3519070 (2325), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.258/DJPB.1/TU.140/I/2025 12 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : satu berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024

Yth. (Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penilaian Pengawasan Kearsipan sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 pada Unit Pengolah Lingkup Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan, (daftar nilai terlampir).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Lampiran Surat Dinas
Nomor : B.258/DJPB.1/TU.140/I/2025
Tanggal : 12 Januari 2025

DAFTAR NAMA PEJABAT PENERIMA SURAT

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
2. Direktur Ikan Air Tawar
3. Plt. Direktur Ikan Air Payau
4. Direktur Ikan Air Laut
5. Direktur Rumput Laut
6. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
7. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
8. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
9. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam
10. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
11. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
12. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
13. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
14. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
15. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
16. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
17. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
18. Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang
19. Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keekerangan Karangasem
20. Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Gemi Triastutik

Lampiran Surat Dinas
 Nomor : B.258/DJPB.1/TU.140/I/2025
 Tanggal : 12 Januari 2025

**DAFTAR HASIL VERIFIKASI PENILAIAN INSTRUMEN PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL PADA UNIT PENGOLAH KANTOR
 PUSAT LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA TAHUN 2024**

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD (x 50%)	NILAI ASPEK SDK(x 50%)	NILAIASPEK PAD+SDK(100 %)	KATEGORI	PEMERINGKAT AN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP KANTOR PUSAT ESELON 1
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	49,89	49,14	99,04	AA (SANGAT MEMUASKAN)	5	1
2	Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	47,53	33,70	81,23	A (MEMUASKAN)	41	3
3	Direktorat Perbenihan	44,85	34,90	79,75	BB (SANGAT BAIK)	43	4
4	Direktorat Pakan dan Obat Ikan	50,00	34,44	84,44	A (MEMUASKAN)	36	2
5	Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	45,01	32,09	77,10	BB (SANGAT BAIK)	44	5

**DAFTAR HASIL VERIFIKASI PENILAIAN INSTRUMEN PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL PADA UNIT PENGOLAH UNIT
 PENGELOLA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA TAHUN 2024**

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD (x 50%)	NILAI ASPEK SDK(x 50%)	NILAIASPEK PAD+SDK(100 %)	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP UPT DJPB
1	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	43.92	46.08	90.01	AA (SANGAT MEMUASKAN)	47	6
2	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	47.83	46.13	93.96	AA (SANGAT MEMUASKAN)	23	3
3	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	46.83	44.44	91.27	AA (SANGAT MEMUASKAN)	39	5
4	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	48.35	32.26	80.61	A (MEMUASKAN)	105	11
5	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	45.26	46.83	92.09	AA (SANGAT MEMUASKAN)	35	4
6	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi	49.48	48.33	97.81	AA (SANGAT MEMUASKAN)	7	1
7	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin	47.83	34.65	82.49	A (MEMUASKAN)	86	10
8	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	48.90	35.00	83.90	A (MEMUASKAN)	68	7
9	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	47.23	27.61	74.84	(SANGAT BAIK)	120	13
10	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	36.84	33.01	69.85	B (BAIK)	137	15
11	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee	48.90	34.04	82.94	A (MEMUASKAN)	80	9
12	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu	46.63	29.99	76.61	B (SANGAT BAIK)	118	12

Lampiran Surat Dinas

Nomor : B.258/DJPB.1/TU.140/I/2025

Tanggal : 12 Januari 2025

13	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang	42.11	30.04	72.14	BB (SANGAT BAIK)	132	14
14	Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem	49.07	33.97	83.04	A (MEMUASKAN)	79	8
15	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang	48.68	47.96	96.64	AA (SANGAT MEMUASKAN)	9	2

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Gemi Triastutik



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.260/DJPB.1/KP.810/I/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Capaian IKU Indeks Pengelolaan SDM Aparatur

13 Januari 2025

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024, bersama ini disampaikan bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian Indeks Pengelolaan SDM Aparatur diukur berdasarkan komponen :
 - a. Persentase perbandingan usulan kebutuhan ASN dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Tersedianya data Diklat ASN yang akuntabel.
 - c. Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses mutasi (Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan Non JF Bidang Perikanan Budidaya, Pindah PNS, Pencantuman Gelar, Peninjauan Masa Kerja dan Pemberhentian PNS) yang ditetapkan dibanding dengan jumlah usulan proses mutasi dari unit kerja.
 - d. Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses ketatausahaan (Kartu Pegawai, Kartu Istri, dan Kartu Suami) yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses ketatausahaan yang diverifikasi.
 - e. Tersedianya informasi SDM Aparatur yang Akuntabel.
2. Target Pengukuran Indeks Pengelolaan SDM Aparatur lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada tahun 2024 adalah **86 dengan predikat diatas rata-rata dan level indeks 4**.
3. Capaian Indeks Pengelolaan SDM Aparatur lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya per tanggal 13 Januari 2025 adalah sebagaimana pada lampiran 2.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

Tembusan :
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Lampiran 1 Surat Dinas
Nomor : B.260/DJPB.1/KP.810/I/2025
Tanggal : 13 Januari 2025

Daftar Penerima Surat

A. Pusat

1. Direktur Ikan Air Laut
2. Direktur Rumput Laut
3. Direktur Ikan Air Tawar
4. Plt. Direktur Ikan Air Payau
5. Ketua Tim Kerja Program dan Kerja Sama

B. UPT

1. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
2. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
3. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
4. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
5. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
6. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
7. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
8. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam, Jambi
9. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
10. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
11. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
12. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
13. Kepala Balai Layanan Usaha dan Produksi Perikanan Budidaya Karawang
14. Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem
15. Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

**Rekapitulasi Capaian Indeks Pengelolaan SDM Aparatur Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
 Tahun 2024**

No	Unit Kerja	Komponen Indeks Pengelolaan SDM					Predikat	Level	
		Usul Kebutuhan	Data Diklat	Layanan Mutasi	Layanan Kesejahteraan	Informasi Kepegawaian			Jumlah
1	Sekretariat DJPB	20	15	23,21	20	20	98,21	Sangat Baik	6
2	Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan / Dit Ikan Air Tawar	17,78	15	17,5	20	20	90,28	Di atas Rata-Rata	4
3	Dit Perbenihan / Dit Rumput Laut	13,33	15	25	20	20	93,33	Baik	5
4	Dit Pakan dan Obat Ikan / Dit Ikan Air Tawar	20	15	25	20	20	100	Sangat Baik	6
5	Dit Produksi dan Usaha Budidaya / Dit. Ikan Air Payau	20	15	15	20	20	90	Di atas Rata-Rata	4
6	BBPBAP Jepara	20	15	20	20	20	95	Baik	5
7	BBPBAT Sukabumi	13,33	15	17,85	20	20	86,18	Di atas Rata-Rata	4
8	BBPBL Lampung	18,09	15	16,67	20	20	89,76	Di atas Rata-Rata	4
9	BPBAP Situbondo	20	15	16,67	20	20	91,67	Baik	5
10	BPBAP Takalar	12,73	15	17,85	20	20	85,58	Di atas Rata-Rata	4
11	BPBAP Ujung Batee	18	15	10	20	20	83	Rata-Rata	3
12	BPBAT Jambi	10	15	12,5	20	20	77,5	Di Bawah Rata-Rata	2
13	BPBAT Mandiangin	20	15	10	20	20	85	Rata-Rata	3

No	Unit Kerja	Komponen Indeks Pengelolaan SDM					Predikat	Level	
		Usul Kebutuhan	Data Diklat	Layanan Mutasi	Layanan Kesejahteraan	Informasi Kepegawaian			Jumlah
14	BPBAT Tatelu	16	15	10	20	20	81	Rata-Rata	3
15	BPBL Ambon	8,75	15	12,5	20	20	76,25	Di Bawah Rata-Rata	2
16	BPBL Batam	16,67	15	10	20	20	81,67	Rata-Rata	3
17	BPBL Lombok	13,33	15	10	20	20	80,83	Rata-Rata	3
18	BLUPPB Karawang	7,71	15	12,5	20	20	75,21	Di Bawah Rata-Rata	2
19	BPIUUK Karangasem	16	15	10	20	20	81	Rata-Rata	3
20	BPKIL Serang	13,33	15	10	20	20	78,83	Di Bawah Rata-Rata	2

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

**LAPORAN PENDATAAN
KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
(KUSUKA)
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON TAHUN 2024**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT
JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA BALAI PERIKANAN
BUDIDAYA LAUT AMBON
2024**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) adalah identitas Tunggal Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Dasar hukum pelaksanaan KUSUKA adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/Permen-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 5 September 2017 dan diubah dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor NO. 41 Tahun 2022, berlaku mulai tanggal 27 Desember 2022. KUSUKA sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha karena memiliki fungsi sebagai; 1). Sebagai basis data tunggal Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan. 2). Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai: a). data induk Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung sektor kelautan dan perikanan; b). data mandatori dan data integrator antaraplikasi di lingkungan Kementerian; dan c). data yang disediakan untuk dibagipakaikan di lingkungan Kementerian dan kementerian/lembaga terkait.

Terkait dengan fungsi KUSUKA sebagai prasyarat calon penerima BP (Bantuan Pemerintah) maka pada tahun 2024 Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon mendapatkan target kinerja pendataan kepemilikan KUSUKA sebanyak 80% pada penerima bantuan pemerintah berupa bantuan benih ikan laut, bantuan calon induk, bantuan bibit rumput laut, bantuan kebun bibit rumput laut (KBRL), dan bantuan Bioflok. Dengan demikian untuk mengukur pencapaian target kinerja pendataan KUSUKA tersebut, maka perlu dilakukan rekapan atau pendataan kepemilikan KUSUKA penerima bantuan pemerintah Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2024.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya kegiatan Pendataan KUSUKA BPBL Ambon Tahun 2024:

1. Mengidentifikasi jumlah kepemilikan KUSUKA penerima bantuan sarana budidaya bioflok, benih ikan laut, bantuan calon induk, bantuan bibit rumput laut dan sarana kebun bibit rumput laut (KBRL);
2. Bahan acuan pendataan bagi penerima bantuan yang belum memiliki KUSUKA;

Sasarannya untuk tercapainya target pendataan KUSUKA bagi penerima bantuan pemerintah BPBL Ambon tahun 2024 yang telah terdaftar dan terdata pada data base Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 80%.

II. METODOLOGI

2.1. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan selama kegiatan ini yaitu ; Alat tulis, Komputer, Jaringan internet, Printer, dokumen bantuan bantuan pemerintah yang disalurkan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon di Tahun Anggaran 2024.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam kegiatan penyusunan laporan Pendataan KUSUKA BPBL Ambon tahun 2024 adalah studi dokumen administrasi penerima bantuan pemerintah yang disalurkan oleh BPBL Ambon dan wawancara.

III. HASIL KEGIATAN

Hasil kegiatan Pendataan KUSUKA BPBL Ambon tahun 2024 disajikan dalam bentuk tabel berikut ini;

Tabel 1. Kepemilikan KUSUKA penerima bantuan yang disalurkan BPBL Ambon pada tahun 2024.

No	Nama Penerima Bantuan Pemerintah	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Kepemilikan KUSUKA
I	Bantuan Bibit Rumput Laut		
1	Lakapala	Wakatobi	Ada
2	Harta Utama	Seram Bagian Barat	Ada
3	Laut Biru	Seram Bagian Barat	Ada
4	Laut Saju	Seram Bagian Barat	Ada
5	Suka Maju	Seram Bagian Barat	Ada
6	Sinar Kembali	Seram Bagian Barat	Ada
7	Pesisir Saliong	Buru	Tidak ada
8	Koperasi Produsen Perikanan Selat Sampo	Wakatobi	Ada
II	Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut		
1	Citra Mandiri	Kepulauan Sula	Ada
2	Mina mandiri	Kepulauan Sula	Ada

No	Nama Penerima Bantuan Pemerintah	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Kepemilikan KUSUKA
3	Pasgatel	Kepulauan Sula	Ada
4	Santosa	Kepulauan Sula	Ada
5	Pulau Kucing	Kepulauan Sula	Ada
6	Bawal	Pulau Morotai	Ada
7	Tike Laha	Pulau Morotai	Ada
8	Kakap	Pulau Morotai	Ada
9	Pomakirio	Pulau Morotai	Ada
10	Tonidora	Pulau Morotai	Ada
11	Said Makmur	Tual	Ada
12	Talenta	Tual	Ada
13	Harmoko Jaya	Tual	Ada
14	Tunas Harapan	Tual	Ada
15	Jaya Bahari	Tual	Ada
16	Arfak Bay II	Kaimana	Ada
17	Somu I	Kaimana	Ada
18	Arfak Culture	Kaimana	Ada
19	Somu III	Kaimana	Ada
20	Somu IV	Kaimana	Ada
21	Bina Bahari	Halmahera Selatan	Ada
22	Jaya Bakti	Halmahera Selatan	Ada
23	Sinar Mas	Halmahera Selatan	Ada
24	Pasir Panjang Tanjung	Halmahera Selatan	Ada
25	Mano Jaya III	Halmahera Selatan	Ada
26	Sejahtera	Halmahera Timur	Ada
27	Sarimalaha	Halmahera Timur	Ada
28	Sehati	Halmahera Timur	Ada
29	Makro Alga Fayaul	Halmahera Timur	Ada
30	Bawak Waru	Lombok Timur	Ada
31	Laut Biru	Lombok Timur	Ada
32	EI Masaro	Kota Tual	Ada
33	Cahaya Laut	Kota Tual	Ada
34	Fair Maju	Kota Tual	Ada
35	Suka Maju	Kota Tual	Ada
36	Batas Kota Kiom Bawah	Kota Tual	Ada
III	Bantuan Sarana Bioflok		
1	Raja Lele Spadem	Merauke	Ada
2	Ratu Lele Selatan	Merauke	Ada
3	Berkah Ikan	Merauke	Ada
4	Awe Lestari	Merauke	Ada
5	Kimnya Papua Jaya	Merauke	Ada
6	Pati Lele Jaya	Merauke	Ada
7	Leleboy	Merauke	Ada
8	Kumis Lele Manja	Merauke	Ada
9	Jakarta Baru Maju	Seram Bagian Timur	Ada

No	Nama Penerima Bantuan Pemerintah	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Kepemilikan KUSUKA
10	Tegar Lestari	Seram Bagian Barat	Ada
11	Bumi Putra	Maluku Tengah	Ada
12	Budijaya	Maluku Tengah	Ada
13	Mitra Hidup	Maluku Tengah	Ada
14	Nila Ageng Sejahtera	Buru	Ada
15	Fres Water Aquaculture	Maluku Tengah	Ada
16	Pesantren Al Fatah	Maluku Tengah	Ada
17	Mekar Baru	Seram Bagian Barat	Ada
18	Suka Berani	Seram Bagian Timur	Ada
19	Nila Sari	Seram Bagian Timur	Ada
20	Niser	Buru	Ada
21	Mina Berkah Bupolo	Buru	Ada
22	Bupolo	Buru	Ada
23	Kakikolon	Buru	Ada
24	Nila Cipta Mandiri	Buru	Ada
25	Nila Jaya	Buru	Ada
26	Tilapia Kaiely	Buru	Ada
27	Simpro Mandiri	Solok	Ada
28	Tambak Biliak Sepakat	Solok	Ada
29	Ho'maniata	Halmahera Utara	Ada
30	Nila Sari	Halmahera Utara	Ada
31	Gema Perikanan	Halmahera Selatan	Ada
32	Tujuh Putri	Halmahera Selatan	Ada
33	Tagorangot	Halmahera Utara	Ada
34	Tarakani Daloha	Halmahera Utara	Ada
35	Sisabi Nyinga	Halmahera Barat	Tidak ada
36	Pammase	Sidenreng Rappang	Ada
37	Labampu	Sidenreng Rappang	Ada
38	Banga-Banga	Sidenreng Rappang	Ada
39	Bina Mandiri	Sidenreng Rappang	Ada
40	Sipakaenre	Sidenreng Rappang	Ada
41	Mandiri Akhir Zaman	Sidenreng Rappang	Ada
42	Makmur	Sidenreng Rappang	Ada
43	Oasis	Pinrang	Ada
44	Fattah Fish Farm	Sidenreng Rappang	Ada
45	Lapagala	Sidenreng Rappang	Ada
46	Celebes	Sidenreng Rappang	Ada
47	Mappawekke Farm	Sidenreng Rappang	Ada
IV	Bantuan Calon Induk		
1	Kerapu Sejahtera	Seram Bagian Barat	Ada

No	Nama Penerima Bantuan Pemerintah	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Kepemilikan KUSUKA
V	Bantuan Benih		
1	Kepiting Jaya	Maluku Tengah	ada
2	Pondok Wisata Farm	Merauke	tidak ada
3	Kop. Bajo Sejahtera	Kepulauan Sula	ada
4	Teluk Bajo	Kepulauan Sula	ada
5	Tabligh	Kepulauan Sula	ada
6	Tahagega I	Kepulauan Sula	ada
7	Marthafon	Ambon	ada
8	Bubara	Ambon	ada
9	Bintang Fajar	Konawe	tidak ada
10	Engglas Jaya	Seram Bagian Timur	ada
11	Engglas Indah	Seram Bagian Timur	ada
12	Indah Jaya	Seram Bagian Timur	ada
13	Masrah Indah	Buru	ada
14	Mallise	Bone	ada
15	Vat Wahan	Maluku Tengah	ada
16	Campea	Pinrang	ada
17	Indah Jaya	Seram Bagian Barat	ada
18	Hulan	Maluku Tengah	ada

Dari tabel diatas diketahui jumlah penerima bantuan pemerintah yang disalurkan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon adalah sebanyak 110 penerima. Dengan rincian 106 penerima telah memiliki kartu KUSUKA. Sedangkan penerima yang tidak memiliki kartu KUSUKA sebanyak 4 penerima dengan rincian 1 penerima pada kegiatan bantuan bantuan bibit rumput laut, 1 penerima pada kegiatan bantuan sarana budidaya bioflok dan 2 penerima bantuan benih ikan laut. Sehingga persentase capaian KUSUKA untuk penerima bantuan pemerintah yang disalurkan BPBL Ambon pada tahun 2024 adalah **96,36%**.

IV. PENUTUP

Demikianlah laporan pendataan KUSUKA pada penerima bantuan pemerintah yang disalurkan BPBL Ambon pada tahun 2024 dibuat, agar dapat menjadi acuan pengukuran kinerja BPBL Ambon, capaian pendataan KUSUKA yang berstatus VALID dan rekomendasi kelompok ataupun perorangan yang belum mendapatkan/terdaftar KUSUKA.

Ambon, 5 Januari 2025

Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen
Kepala Subbagian Umum BPBL Ambon



Erdy Asmaul Basir, A.Md, S.Pi

Penyusun Laporan
Teknisi Akuakultur Penyelia



Nastassya Gaspersz, A.Md